

**PENCIPTAAN BUDAYA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

*(Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kota Batu)*

Tesis

OLEH  
ALMUHAJIRIN  
NIM 17761004



**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENCIPTAAN BUDAYA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
(Studi Kasus di MI Darul Ulum Kota Batu)**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Studi  
Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

**OLEH  
ALMUHAJIRIN  
NIM 17761004**



Dosen Pembimbing:

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd	19650817 199803 1 003
Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd	197007282008011007

**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul "Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di MI Darul Ulum Kota Batu)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

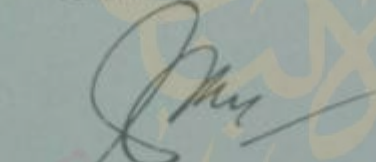
Malang, 20 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd  
NIP. 19650817 199803 1 003

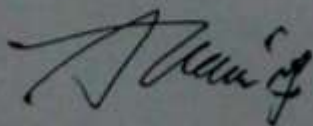
Pembimbing II



Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd  
NIP. 1970007282008011007

Mengetahui,

Ketua Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah



Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M. Ag  
NIP. 196712201998031002

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul "Penciptaan Budaya Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di MI Darul Ulum Kota Batu)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2020.

Dewan Penguji,

Dr. Muh. Hambali, M.Ag  
NIP. 1973040420141110003

Ketua

Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si  
NIP. 197008132001121001

Penguji Utama

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd  
NIP. 196308171998031003

Anggota

Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd  
NIP. 1970007282008011007

Anggota



Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almuhajirin  
NIM : 17761004  
Program Studi : Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
Judul Tesis : Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kota Batu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Malang,

Hormat Saya



**Almuhajirin**  
**NIM. 17761004**

## MOTTO

(QS. Al-Insyirah: 8)

... وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya: ...dan hanya kepada Tuhanmulah (hendaknya) kamu berharap.

*"Hidup merupakan sebuah perjuangan panjang. Dan hanya dapat dimenangkan dengan pantang menolak tugas, pantang tugas tak selesai. Yakin Usaha Sampai"*

## PERSEMBAHAN

Tiada kalimat yang paling mulia selain rasa syukur atas segala rahmat Allah serta syafa'at dari hamba pilihan Allah, Muhammad Rasulullah. Ananda persembahkan karya ini untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah *damai* di alam sana. Terimakasih telah melahirkan ananda ke muka bumi ini, dengan segala dinamika dan getirnya kehidupan yang ananda jalani, ananda bangga menjadi buah hati kalian. Istirahat lah dengan nyenyak mama papa, semoga kita kembali satu rumah lagi di Jannah-Nya kelak. Aamiin.

Selanjutnya, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kakanda Masperri, ayunda Esti Yuniarti dan adinda Ayyatullah Khomaini. Terimakasih untuk supportnya. Semoga kita selalu dikuatkan oleh-Nya dalam menjalani dialektika kehidupan.
- ❖ Guru, kawan *sharing* sekaligus mentor ku. Kak Dr. Afriantoni M.Pd yang kaya akan ide dan gagasan.
- ❖ Kakang Prayudi Rahmatullah, M. H, Adrenal Stezen, M.H. Terimakasih telah mengajari banyak hal di tanah Jawa ini.
- ❖ Keluarga besar *jabbe squad* (Jasmani, Suwandi, Idrus, Taher, Irmariyadi, Taufik, Fikri Ali, Iqbal sekum HMI Cabang Samarinda, Supriansyah, Mas Anas).
- ❖ Sahabat-sahabatku di tanah rantau (Suwandi, Guyub, Ridho, Rahmat Uki)

- ❖ *Special Thanks for* Tri Apriyanti, terimakasih untuk waktu mu yang selalu ada dan kesabaranmu yang berhasil membuat kita menaklukan kegamangan-kegamangan ini.
- ❖ Keluarga besar M-PGMI A angkatan 2018, kalian *the best*.
- ❖ Bapak Dr. H. Agus Maimun dan Bapak Dr. Susilo Mansurudin, M. Pd yang telah meluangkan waktu untuk mendidik dan melatih dalam rangka penyelesaian tesis ini dengan baik.
- ❖ Teman-teman HMI Cabang Malang (Musyrif Kamal Haq dan Wahyu).
- ❖ Bayu Agung Prasetya, aktivis anti korupsi *Malang Corruption Watch* (MCW).
- ❖ Leady Kholifatur Rohmah Ketua Umum IPPNU Kota Batu.
- ❖ Kucing kesayangan ku, Siti Zubaidah.

## KATA PENGANTAR



Teriring salam dan do'a penulis panjatkan kehadirat Allah Azza Wajalla karena akhirnya tesis ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis yang penulis buat dengan judul “Penciptaan Budaya Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di MI Darul Ulum Kota Batu)” dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan tesis ini banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan, namun berkat inayah Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M. Ag selaku Ketua Program Studi Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Agus Maimun, M. Pd dan Bapak Dr. Susilo Mansurudin, M. Pd yang telah banyak meluangkan waktu, sumbangan pikiran guna memberi bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta koreksinya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Drs. Ulul Azmi, S. Ag selaku kepala MI Darul Ulum dan segenap guru serta karyawan sekolah dan siswa-siswi yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Sarhudi (*alm*) dan Rusmawati (*almh*), terimakasih telah mengizinkan aku menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kalian. Semoga Allah swt melapangkan tempat peristirahatan kalian.
7. Kanda Dr. Afriantoni, M.Pd.I terimakasih kanda.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Saudara-saudaraku Masperi Supriadi, S. Pd. I, Esti Yuniarti, S. Pd. I, Ayyatullah Khomaini, Sri Bunianti, S. Pd, dan Abdul Ghofar yang sangat aku banggakan yang telah memotivasi selama ini.
10. Saudari Tri Apriyanti yang telah menjadi partner dalam perjalanan panjang ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2018 di Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Maulana Malik Ibrahim Malang, *wabil khusus* kelas A.
12. Teman-teman HMI Cabang Malang dan Teman-teman *Malang Corruption Watch* (MCW).

13. Keluarga besar *jabbe squad*.

14. Kucing kesayanganku, Siti Zubaidah yang cantik jelita.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'a yang telah diberikan menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah swt.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif agar dapat digunakan demi perbaikan tesis ini nantinya. Penulis juga mengharapkan agar tesis ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya.

Malang, Desember 2019

Almuhajirin  
NIM.17761004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	20
1. Manfaat Teoritik .....	20
2. Manfaat Praktis .....	20
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	21
F. Definisi Istilah .....	30
1. Budaya Sekolah .....	31
2. Pendidikan Anti Korupsi .....	31
3. Dampak Positif Budaya Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi .....	31
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Penciptaan Budaya Sekolah.....	32
1. Pengertian Penciptaan Budaya Sekolah.....	32
2. Dimensi Budaya Sekolah.....	37
3. Prinsip-Prinsip Pengemabangan Budaya Sekolah .....	40
4. Indikator Budaya Sekolah .....	41
B. Konsep Pendidikan Anti Korupsi .....	42
1. Pengertian Pendidikan .....	42
2. Pendidikan Anti Korupsi .....	44
3. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi .....	47
4. Indikator Pendidikan Anti Korupsi.....	48

C. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi .....	49
1. Model Terintegrasi dalam Mata pelajaran .....	49
2. Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler .....	49
3. Model Pembudayaan Aktivitas dan Suasana Sekolah .....	50
4. Integrasi dalam Mata Pelajaran .....	50
5. Mata Pelajaran dalam Muatan Lokal .....	50
6. Kegiatan Pengembangan Diri .....	51
D. Implikasi Budaya Sekolah Terhadap Karakter Anti Korupsi .....	52
E. Kerangka Berfikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	57
B. Kehadiran Peneliti .....	61
C. Lokasi Penelitian .....	62
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
1. Observasi .....	65
2. Wawancara .....	67
3. Dokumentasi .....	69
F. Teknik Analisis Data .....	70
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	74
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum MI Darul Ulum .....	78
1. Latar Belakang Historis .....	78
2. Profil MI Darul Ulum .....	80
3. Visi, Misi dan Tujuan .....	81
4. Kurikulum .....	85
5. Kondisi Madrasah .....	87
6. Struktur Organisasi .....	89
B. Paparan Data Penelitian .....	93
1. Perencanaan Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum .....	93
2. Implementasi Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum .....	112
3. Dampak Positif Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum .....	119
C. Temuan Penelitian .....	125
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Perencanaan Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum .....	127
1. Budaya Disiplin Waktu .....	127

2. Budaya Mandiri Menjaga Lingkungan Sekolah .....	129
3. Budaya Mandiri dalam Belajar .....	130
4. Budaya Tanggung Jawab Melalui Perpustakaan <i>Out Door</i> .....	132
<b>B. Implementasi Penciptaan Budaya Sekolah dalam</b>	
<b>Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum.....</b>	<b>134</b>
1. Kepala Madrasah Membangun Budaya Mandiri Melalui Keteladanan .....	135
2. Kepala Madrasah dan Guru Memberikan <i>stressing</i> Kepada Siswa agar Jujur dan tidak Mencontek .....	138
3. Kepala Madrasah dan Guru Membangun Budaya Disiplin Melalui Tata tertib Sekolah .....	140
4. Pelaksanaan Model Kelas Anti Korupsi Oleh Pihak Eksternal <i>Malang Corruption Watch</i> (MCW), IPNU dan IPPNU .....	143
<b>C. Dampak Positif yang ditimbulkan dari Penciptaan Budaya Sekolah</b> <b>dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum...</b>	<b>145</b>
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran-saran .....	151
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	<b>160</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	22
Tabel 2.1 Indikator Budaya Sekolah.....	42
Tabel 2.2 Indikator Pendidikan Anti Korupsi.....	49
Tabel 3.1 Pengkodean.....	71
Tabel 4.1 Daftar Sarana Prasarana MI Darul Ulum.....	87
Tabel 4.2 Jumlah siswa Empat Tahun Terakhir.....	88
Tabel 4.3 Kondisi Guru.....	88
Tabel 4.4 Jumlah siswa Kelas IV dan kelas V Tahun ajaran 2017-2018.....	109
Tabel 4.5 Temuan Penelitian.....	125



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Belajar Kognitif Sosial .....	55
Gambar 2.2. Kerangka Berfikir.....	56
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Model Interaktif .....	73
Gambar 4.1 Struktur Organisasi MI Darul Ulum Kota Batu Tahun Ajaran 2019/2020 M .....	92
Gambar 4.2 Perpustakaan di dalam Kelas.....	99
Gambar 4.3 Perpustakaan <i>Out Door</i> .....	100
Gambar 4.4 Perpustakaan Induk .....	101
Gambar 4.5 Lembar kontrol Perpustakaan.....	103
Gambar 4.6 Langkah-langkah Membuat Gunung dari Tanah Liat.....	118
Gambar 4.7 Hasil Karya Siswa/I di Pagar Sekolah .....	124

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara .....	160
Lampiran 2 Pedoman Observasi .....	163
Lampiran 3 Pedoman data Dokumenter .....	164
Lampiran 4 Struktur Organisasi MI Darul Ulum Kota Batu Tahun Ajaran 2019/2020 M, Kode Etik Guru, Piagam Prestasi Siswa dan Data Guru .....	165
Lampiran 5 Pelaksanaan Kelas Anti Korupsi di dalam Kelas, di Luar Kelas dan Wisuda Perdana Siswa Kelas Model Anti Korupsi .....	166
Lampiran 6 Hasil Karya Siswa/I di Dinding Pagar Sekolah.....	167
Lampiran 7 Perpustakaan <i>Out Door</i> , Perpustakaan dalam Kelas dan Perpustakaan Induk .....	168

## ABSTRAK

Almuhajirin, 2018. *Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di MI Darul Ulum Kota Batu)*. Tesis, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. H. Agus Maimun, M. Pd (2) Dr. Susilo Mansurudin, M. Pd.

**Kata Kunci:** Penciptaan Budaya, Budaya Sekolah, Pendidikan Anti Korupsi.

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara yang diukur. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Pendidikan diyakini mampu untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman korupsi. Langkah pencegahan (*preventif*) melalui lembaga pendidikan tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan, pertama; menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua; menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Berangkat dari permasalahan diatas, fokus penelitian adalah (1) Bagaimana perencanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan budaya anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu, (2) Bagaimana implementasi penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu, dan (3) Bagaimana dampak positif penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan rancangan studi kasus tunggal. Sesuai dengan Miles & Huberman, data yang terkumpul diorganisir, ditafsirkan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan kredibilitas yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode dan dependibilitas.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Budaya sekolah yang dibangun di MI Darul Ulum Kota Batu yang mencerminkan pendidikan anti korupsi yaitu budaya disiplin waktu, budaya mandiri dalam menjaga lingkungan sekolah, budaya mandiri dalam belajar, budaya tanggung jawab melalui perpustakaan *out door*, (2) Implementasi penciptaan budaya sekolah di MI Darul Ulum dilakukan melalui keteladana kepala sekolah dan guru serta adanya pelaksanaan model kelas anti korupsi oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU, (3) Dampak positif penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum yaitu siswa-siswi lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas, siswa dan guru lebih disiplin waktu, siswa jujur terhadap hasil pekerjaan sendiri, siswa bertanggung jawab terhadap amanah yang di emban dan menurunnya *bullying* di sekolah.

## ABSTRACT

Almuhajirin, 2018. *Creation of School Culture in Developing Anti Corruption Education (Case Study in MI Darul Ulum Batu City)*. Thesis, Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Major, Post Graduate, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (1) Dr. H. Agus Maimun, M. Pd (2) Dr. Susilo Mansurudin, M. Pd.

**Keywords:** Culture Creation, School Culture, Anti-Corruption Education.

Corruption is the most crucial problem facing the country and nation in Indonesia today. Based on the Corruption Perception Index in 2008, Indonesia ranks 89<sup>th</sup> out of 180 countries measured. The value obtained by Indonesia is 38 with a scale of 0-100, the lower the value the more corrupt country, and vice versa. Education is believed to be able to release the Indonesian nation from the grip of corruption. Preventive measures through educational institutions can indirectly via two approaches, first; targeting students, and second; use students empowerment to suppress the environment so that it is not *permissive to corruption*. Departing from the problems above, the focus of research is (1) How to plan the creation of school culture in developing anti-corruption culture in MI Darul Ulum Batu City? (2) How to implement the creation of school culture in developing anti-corruption education in MI Darul Ulum Batu City?, and (3) What is the positive impact of creating a school culture in developing anti-corruption education in MI Darul Ulum Batu City?

This research uses a qualitative approach, a type of case study with a single case study design. In accordance with Miles & Huberman, the data collected is organized, interpreted and analyzed and conclusions drawn. Data validity checking uses credibility which includes source triangulation, method triangulation and dependability.

The results showed: (1) School culture built in MI Darul Ulum that reflects anti-corruption education, namely time discipline culture, independent culture in protecting the school environment, independent culture in learning, culture of responsibility through *out door* libraries, (2) Implementation of school culture creation in MI Darul Ulum is done through the example of school principals and teachers as well as the implementation of the anti-corruption class model by *Malang Corruption Watch* (MCW), IPNU and IPPNU, (3) The positive impact of creating school culture in developing anti-corruption education in MI Darul Ulum namely students are more confident in doing their assignments, students and teachers are more disciplined in time, students are honest about the results of their own work, students are responsible for the mandate entailed and the decline *bullying* in at school.

## المخلص

المهاجريون ، 2018. إنشاء ثقافة مدرسية في تطوير التعليم لمكافحة الفساد (دراسة حالة في دارول أولوم كوتا باتو). أطروحة ، برنامج دراسة تعليم مدرسي ابتدئية ، كلية مولانا مالك إبراهيم للدراسات العليا ، مالانج. المستشارون (1) أجوس ميمون (2) سوسيلو منصور الدين ، م.

الكلمات المفتاحية: ابتكار الثقافة ، الثقافة المدرسية ، تعليم مكافحة الفساد.

فساد هو المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه بلد إندونيسيا اليوم. بناءً على مؤشر مدركات الفساد في عام 2018 ، احتلت إندونيسيا المرتبة 89 من بين 180 دولة تم قياسها. القيمة التي حصلت عليها إندونيسيا هي 38 بمقياس 0-100 ، وكلما انخفضت القيمة كلما كان البلد أكثر فسادًا ، والعكس بالعكس. يُعتقد أن التعليم قادر على تحرير الأمة الإندونيسية من قبضة الفساد. يمكن للخطوات الوقائية من خلال هذه المؤسسات التعليمية أن تمر بشكل غير مباشر بطريقتين ، الأولى ؛ استهداف الطلاب ، والثاني ؛ استخدام تمكين الطلاب لقمع البيئة بحيث لا يكون الفساد مسموحًا به. الخروج من المشاكل المذكورة أعلاه ، فإن محور البحث هو (1) كيفية التخطيط لإنشاء ثقافة مدرسية في تطوير ثقافة مكافحة الفساد في ، (2) كيفية تنفيذ إنشاء ثقافة المدرسة في تطوير التعليم لمكافحة الفساد في ، و (3) ما هو التأثير الإيجابي لخلق ثقافة المدرسة في تطوير التعليم لمكافحة الفساد في دارول أولوم كوتا باتو.

يستخدم هذا البحث نهجًا نوعيًا ، نوعًا من دراسة الحالة مع تصميم دراسة حالة واحدة. وفقا لمايلز وهويرمان ، يتم تنظيم البيانات التي تم جمعها وتفسيرها وتحليلها واستخلاص النتائج. يستخدم التحقق من صحة البيانات مصداقية والتي تشمل تثليث المصدر وتثليث الطريقة والاعتمادية.

أظهرت النتائج ما يلي: (1) ثقافة مدرسية مبنية في تعكس ثقافة مكافحة الفساد ، وهي ثقافة الانضباط الزمني ، والثقافة المستقلة في حماية البيئة المدرسية ، والثقافة المستقلة في التعلم ، وثقافة المسؤولية من خلال المكتبات الخارجية ، (2) يتم تنفيذ إنشاء ثقافة المدرسة في من خلال مثال مديري المدارس والمعلمين وكذلك تنفيذ نموذج فئة مكافحة الفساد من قبل ، (3) التأثير الإيجابي لخلق ثقافة المدرسة في تطوير التثقيف في مجال مكافحة الفساد في أي الطلاب هم أكثر ثقة في أداء مهامهم ، والطلاب والمدرسون أكثر انضباطًا في الوقت المناسب ، والطلاب صادقون في نتائج عملهم ، والطلاب مسؤولون عن التفويض الذي ينطوي عليه التراجع والبلطجة في المدرسة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Tidak hanya berjangkit di kalangan pejabat eksekutif, tetapi pelaku ini juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif dari pusat sampai ke daerah. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti halnya penyelewengan anggaran e-KTP yang mencapai triliunan rupiah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Kasus megaproyek sarana olahraga Hambalang menjadi isu nasional yang bertahan cukup lama. Proyek yang direncanakan pada tahun 2009 hingga 2010, setidaknya mengalami perubahan desain sebanyak tujuh kali. KPK pun sudah menyidik sedikitnya 271 orang. Enam di antaranya ditetapkan sebagai terdakwa, yakni Wafid Muharram, Deddy Kusnidar, Andi Alfian Mallarangeng,

---

<sup>1</sup> Abdulloh Hadziq, "Konsepsi Pendidikan Agama Anti Korupsi di Sekolah Dasar," *Elementary*, 5 (Juli-Desember, 2017), 214.

Anas Urbaningrum dan Machfud Suroso.<sup>2</sup> Adapun kerugian negara sebesar Rp 463 miliar lebih. Pada 22 Mei 2015 KPK menggeledah ruang kerja Menteri Agama, Suryadharma Ali di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama Sembilan jam dan menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Adapun nilai dana haji yang dikelola lebih dari Rp 1 triliun.<sup>3</sup> Mencuatnya kasus penyelewengan biaya haji ini akibat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf yang saat itu menjabat sebagai ketua PPATK mengatakan bahwa sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan haji sebesar 80 triliun dengan bunga sebesar Rp 2,3 triliun. PPATK mengatakan ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas.<sup>4</sup>

Kasus korupsi yang tidak kalah menarik perhatian publik adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditandatangani oleh Ketua BPK anwar Nasution, dalam laporan itu disebutkan dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia sejumlah Rp 100 miliar yang melalui dua tahap, yakni *pertama* pencairan dana Rp 68,5 miliar untuk membantu proses hukum kasus BLBI yang

---

<sup>2</sup> Mochtar Touwe dkk, "Investigasi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam Kasus Megaproyek Sarana Olahraga Hambalang", *Analisis*, 4, 89.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Rachman, "Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadharma Ali di Kompas.com (Periode Juni 2015)", *Ilmu Komunikasi*, 2 (2016), 129.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Rachman, "Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadharma Ali di Kompas.com (Periode Juni 2015), 128.

melibatkan lima mantan dewan gubernur dan mantan direksi BI. *Kedua*, pencairan kedua kali sebesar Rp 31,5 miliar diserahkan kepada Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk pembahasan dan diseminasi sejumlah UU tentang BI. Hasil audit menyebutkan dana untuk Komisi IX DPR periode 1999-2000 dicairkan melalui tujuh cek.<sup>5</sup> Kasus korupsi yang tercatat sebagai salah satu kasus besar adalah kasus Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan kerugian negara hingga Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS.<sup>6</sup>

Kasus korupsi yang terjadi di daerah tidak kalah heboh, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2004 hingga awal tahun 2015 terdapat 343 kepala daerah yang harus menghadapi proses hukum baik di Kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat perkara korupsi, yang sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah (*Kompas*, 4 Februari 2015). Sebagian dari mereka, seperti Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara), Awang Faruk Ishak (Gubernur Kaltim), Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu), Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Hendi Bundoro dan Siti Nurmarkesi

---

<sup>5</sup> Dewi Novianti, "Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada *detik.com* dan Tempo Interaktif", *Ilmu Komunikasi*, 8, (Agustus 2010), 170.

<sup>6</sup> Bangun Santoso, "5 kasus Korupsi Terbesar di Indonesia dengan Kerugian Negara Fantastis", *Suara.com*, Senin, 11 Februari 2019, <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis>, diakses 17 Agustus 2019.

(Bupati Kendal), Rina Iriani (Bupati Karanganyar), dan Amran Batalipu (Bupati Buol), harus mendekam di penjara.<sup>7</sup>

Pada tahun 2009 temuan dari kajian pemetaan korupsi pendidikan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang relatif cukup rawan korupsi. Banyak obyek korupsi yang terdapat disektor pendidikan seperti dana untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, operasional satuan pendidikan, gaji dan honor guru, aset pendidikan serta kegiatan pendidikan lainnya. Institusi dengan kewenangan yang tinggi dan didukung oleh anggaran yang besar berpeluang paling besar melakukan penyelewengan.<sup>8</sup> Dengan dasar ini, maka peluang korupsi terbesar dalam sektor pendidikan terletak pada Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) yang saat ini telah berganti nama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Institusi ini memiliki banyak kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berpengaruh pada seluruh sektor pendidikan Indonesia. Selain itu, kewenangan ini juga didukung oleh anggaran besar.

Hasil riset yang dilakukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2010 terdapat 50 sekolah di Jakarta dan tahun 2013, terdapat 100 sekolah di Jakarta, Garut dan Solo yang diindikasikan terjadi praktek korupsi. Sebagai

---

<sup>7</sup> Budi Setiyono, “Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: belajar dari Empat Studi Kasus”, *Politika*, 8 (April 2017), 28.

<sup>8</sup> Titik Handayani, “Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia”, *Kependudukan Indonesia*, IV (2009), 22.

contoh hasil laporan ICW tanggal 13 Januari 2005, korupsi dana pendidikan di Sekolah Dasar pencontohan Rawamangun Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kasus dugaan korupsi ini telah terjadi sejak tahun 2002 diduga mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah.<sup>9</sup> Situs *Suara Merdeka* tanggal 14 Desember 2005, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs. Santoso beserta enam kepala sekolah, yakni SMP 1, SMP 10, SMK 5 Semarang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Semarang terkait kasus penyaluran dana beasiswa fiktif senilai Rp 40 miliar.<sup>10</sup>

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara yang diukur. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam kawasan Asia, negara Indonesia berada pada urutan ke-3 sebagai negara terkorup. Prestasi itu cukup menggembirakan karena beberapa tahun sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Jerman

---

<sup>9</sup> Dasrizal, "Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang", *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8 (Oktober 2017), 67.

<sup>10</sup> Dasrizal, "Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang", 66.

<sup>11</sup> Wana Alamsyah dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Indonesian Corruption Watch, 2018), 1.

melakukan survei yang dimuat dalam majalah *Der Spiegel*, Indonesia adalah negara yang paling korup.<sup>12</sup>

UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi adalah “Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sembilan tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah; suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (penggelapan), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.<sup>13</sup>

Suradi dalam Mukhamad Murdiono menyatakan bahwa korupsi sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mencakup: (1) penyuapan (*bribery*), (2) konflik kepentingan (*conflicts of interest*), (3) pemaksaan yang bersifat ekonomi (*economic extortion*), dan (4) pemberian secara tidak sah (*illegal gratuities*).<sup>14</sup>

Dalam terminologi Fiqh Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywah* (suap) dan *at tajawwuz fi isti'mal al-haq* (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al nahb*). Korupsi termasuk

<sup>12</sup> Laurensius Arliman S, “Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Anti korupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi,” *Nurani*, 17 (Juni, 2017), 51.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>14</sup> Mukhamad Murdiono, “Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP,” *Socia*, 15. (Juni 2016), 169.

kejahatan terhadap harta benda manusia (*aklamwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* jelas diharamkan dalam alquran dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.<sup>15</sup>

Dalam ajaran Islam secara jelas mengharamkan perbuatan korupsi, seperti firman Allah swt dalam QS. Albaqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>16</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir telah membuat korupsi semakin menggurita. Hal ini karena korupsi bukan hanya terjadi pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah bahkan terjadi di tingkat pemerintahan terkecil di daerah. Korupsi selalu menjadi bahan yang tak pernah habis untuk dikaji, layaknya menimba air di sumur yang tak berdasar.

<sup>15</sup> Dewi Salistina, “Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral,” *Ta'allum*, 03 (November 2015), 168.

<sup>16</sup> Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Jabal, 2010), 29.

Ada banyak rekam jejak penelitian-penelitian berskala internasional tentang fakta korupsi di Indonesia. Pada akhir dasawarsa 1990-an, salah satu jurnal terkemuka di Amerika, *Foreign Affairs*, mengatakan bahwa korupsi telah menjadi *way of life* di Indonesia. Korupsi sudah menjadi cara atau jalan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. International Transparency, pada tahun 1997, dalam laporannya menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Pada tahun-tahun berikutnya, permasalahan korupsi di Indonesia juga tidak menemukan solusi ampuh. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia.<sup>17</sup>

Penelitian berskala internasional diatas menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi semacam warisan yang masih tetap dipelihara sampai detik ini. Artinya warisan ini sudah ada sejak era Orde Baru, hal ini dikarenakan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN) sangat melekat pada rezim Soeharto tersebut. Kalau ditelisik lebih jauh, korupsi di Indonesia telah terjadi sejak awal kemerdekaan. Hal ini karena praktek dan budaya korupsi selalu mengiringi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

---

<sup>17</sup> Kasinyo Harto, "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama," *Intizar*, 20, (2014), 122.

Permasalahan ini sangat massif, sistematis dan terorganisir sekali. Hal ini dapat dilihat dari laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tentang kegiatan tren penindakan kasus korupsi tahun 2018, ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp 5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar.<sup>18</sup>

Dari hasil temuan umum tersebut, menurut ICW setidaknya ada sejumlah variabel dalam kasus korupsi, antara lain: modus, sektor, daerah, lembaga, aktor, dan kinerja penegak hukum. Adapun variabel lainnya seperti korupsi berdasarkan sumber anggaran dan korupsi berdasarkan kegiatan-pengadaan dan non pengadaan.

Untuk lembaga terkorup, *Survey Global Corruption Barometer (GBC)* 2013 oleh *Transparency International (TI)* merilis lembaga yang paling korup adalah kepolisian dan parlemen (4,5), peradilan (4,4), partai politik (4,3), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7), dan media (2,4).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wana Alamsyah dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, 4.

<sup>19</sup> Nurul Anam, "Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Pesantren," *Edu Islamika*, 6 (September, 2014), 225.

Catatan ‘hitam’ diatas sangat memalukan dan memilukan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi penyakit “akut” stadium empat. Praktik penyelenggaraan negara tidak ubahnya seperti sarang penyamun dan perampok yang berkedok birokrat dan elit politik. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang secara formal diberi amanat rakyat dan dipercaya mampu menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Tentu saja mereka adalah manusia yang terdidik (*well educated*), tetapi kredibilitas dan akuntabilitas mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir penyakit kronis ini. Diantaranya dibentuklah lembaga khusus yang menangani permasalahan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Sejak berdiri sampai hari ini, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, KPK telah bekerja keras untuk menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Namun karena korupsi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, akhirnya telah membentuk mental negatif bangsa. Secara yuridis, KPK bekerja menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Dalam menyelesaikan mental bangsa yang sakit ini, pendekatan hukum saja tidak dapat menghapus kultur korupsi karena sama saja memangkas daun tanpa membat habis akarnya.

Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 23 Oktober 2008 yang lalu, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi

kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Dalam kesempatan ini KPK menyebutkan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sedangkan untuk tingkat SD, materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat sekolah menengah pertama seputar definisi korupsi. Pada tingkat pendidikan berikutnya, sekolah menengah atas, modul memuat materi tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi.<sup>20</sup>

Lebih lanjut usaha pemerintah dalam melakukan upaya yang bersifat *preventif*, misalnya dengan diterbitkannya sejumlah aturan yang berkenaan dengan pendidikan, di antaranya: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Kedua peraturan

---

<sup>20</sup> Kasinyo Harto, "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama," 123.

di atas dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.<sup>21</sup>

Doktrin anti korupsi yang telah dikenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas disebut dengan Sembilan Nilai (SEMAI) kehidupan. Nilai-nilai ini dirumuskan dari nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai-nilai kehidupan yang harus diamalkan agar setiap pribadi memiliki perilaku anti koruptif.<sup>22</sup>

Sembilan Nilai (SEMAI) anti korupsi pernah dikenalkan oleh KPK sebagai bentuk gerakan anti korupsi. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sebuah kalimat “JUPE TANGKER MANDI SEBEDIL” yang meliputi nilai; jujur, peduli, tanggungjawab, kerja keras, mandiri, disiplin, sederhana, berani, dan adil.<sup>23</sup>

Pendidikan diyakini mampu untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkaman korupsi. Langkah pencegahan (*preventif*) melalui lembaga pendidikan tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan, pertama; menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua; menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, pasal I, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha

<sup>21</sup> Sa'i, "Penanaman Rasa Tabu Korupsi Pada Anak Sekolah Dasar," *Al-Ijtima'iyyah*, 4 (Juli – Desember 2017), 14.

<sup>22</sup> Fira Mubayyinah, "SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Al Hikmah* 1 (2017), 224.

<sup>23</sup> Imadah Thoyyibah, "Pendidikan Dasar Anti Korupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam," *Menara Ilmu*, XII (Februari 2018), 51.

<sup>24</sup> Lukmanul Hakim, "Model Integrasi Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam," *Ta'lim*, 10 (2012), 144.

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>25</sup> Jadi, pendidikan adalah usaha yang sadar dan terorganisir untuk mencetak manusia seutuhnya. Karena esensi dari pendidikan adalah memanusiakan manusia dan muara pendidikan adalah proses berubahnya tingkah laku manusia luar dan dalam kearah yang positif.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat mempengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan, sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I (Ketentuan Umum), pasal 1.

tidak. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia.<sup>26</sup>

Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi.<sup>27</sup>

Jadi, pendidikan anti korupsi pada hakikatnya adalah pendidikan karakter, hal ini berbanding lurus dengan apa yang dicita-citakan dalam kurikulum 2013. Karena Sembilan nilai anti korupsi merupakan bagian dari 18 karakter yang ada di kurikulum 2013.

Melihat realita bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan merugikan negara, maka sebagai bentuk ikhtiarnya mutlak dilakukan pengenalan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Usia anak sekolah dasar adalah usia yang baik untuk menanamkan nilai-nilai karakter, hal ini dikarenakan anak sekolah dasar sangat mudah meniru (*imitation*) perilaku lingkungan.

---

<sup>26</sup> Laurensius Arliman S, "Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Anti korupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi," 57.

<sup>27</sup> Choiriyah dkk, "Konsep Pembelajaran Pkn dalam Menanamkan Pendidikan Anti korupsi Sejak Dini disekolah Dasar," *Taman Cendekia*, 01 (Juni 2017). 2.

Albert Bandura menyatakan bahwa proses belajar manusia biasanya terjadi dengan mengamati konsekuensi perilaku model.<sup>28</sup> Pembelajar memperoleh informasi lewat pengamatan terhadap konsekuensi perilakunya sendiri atau perilaku orang lain. Informasi yang diperoleh lewat pengamatan ini dapat digunakan dalam berbagai macam situasi jika ia membutuhkannya. Berbekal informasi yang diperoleh dari pengamatan terdahulu, seorang individu akan memperkirakan bahwa jika mereka bertindak dengan cara tertentu dalam situasi tertentu, maka akan muncul konsekuensi tertentu.<sup>29</sup> Teori Bandura dinamakan teori kognitif sosial karena ia menekankan fakta bahwa hampir semua informasi diperoleh dari interaksi dengan orang lain.<sup>30</sup> Dinamakan kognitif sosial karena Bandura mengusulkan satu paradigma tunggal untuk menjelaskan perolehan perilaku. Komponen-komponennya adalah: (a) model perilaku; (b) konsekuensi dari model; dan (c) proses kognitif pembelajar.<sup>31</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang dipelajari oleh manusia terjadi melalui peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh (*modeling*). Perubahan perilaku siswa melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespons sebuah stimulus tertentu. Siswa juga dapat mempelajari

---

<sup>28</sup> B.R Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, terj. Tri Wibowo B.S, Edisi VII (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 386.

<sup>29</sup> B.R Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, 366.

<sup>30</sup> B.R Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, 388.

<sup>31</sup> Margaret E. Gredler, *Learning and Instruction (Teori dan Aplikasi)*, terj. Tri wibowo B.S, Edisi VI (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 466.

respons-respons baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain, misalnya guru atau orang tuanya.

Berdasarkan teori Albert Bandura diatas, maka nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan melalui peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh (*modeling*) siswa melalui aktivitas-aktivitas disekolah, dalam hal ini adalah budaya sekolah. Oleh karena itu, pembiasaan melalui budaya sekolah akan membentuk kognisi dan perilaku siswa.

Proses peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh (*modeling*) dalam usaha pengenalan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa dapat dilakukan dengan cara menciptakan budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Penciptaan budaya sekolah tersebut akan menjadi kebiasaan dari seluruh warga sekolah termasuk siswa didalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data awal tentang pendidikan anti korupsi di madrasah ibtidaiyah yang ada di ruang lingkup Malang. Peneliti berkoordinasi langsung dengan lembaga yang bergerak dibidangnya yaitu *Malang Corruption Watch* (MCW). Hasilnya didapatkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Kota Batu telah di edukasi tentang pendidikan anti korupsi melalui program-program yang dibawakan oleh pihak *Malang Corruption Watch* (MCW) yang pada saat itu juga bekerja sama dengan PC Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Batu. Menurut pihak *Malang Corruption Watch* (MCW) yang

dalam hal ini disampaikan oleh Divisi Pendidikannya, Bayu Agung Prasetya, menyatakan bahwa pembentukan nilai-nilai anti korupsi telah diselenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan baru MI Darul Ulum saja di Kota Batu yang langsung di edukasi tentang pendidikan anti korupsi. MI Darul Ulum merupakan sekolah swasta yang terletak di Jl. Lahor, No. 251, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pantauan pada media online *Times Indonesia* yang terbit pada hari Sabtu, 08 Desember 2018 dengan judul “MI Darul Ulum Buka Kelas Anti Korupsi”. MI Darul Ulum dijadikan sekolah model kelas anti korupsi, *launching* kelas anti korupsi dilaksanakan pada hari sabtu (8 Desember 2018) atau sehari sebelum hari anti korupsi yang jatuh pada hari minggu 9 Desember 2018.<sup>32</sup>

Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Batu, Leady Kholifatur Rohmah mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk dari upaya menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini. Di Kota Batu, bahkan mungkin di Indonesia, program ini baru dilaksanakan di MI Darul Ulum ini yang menerapkan kelas anti korupsi. Indikator keberhasilan adalah dalam 8 kali pertemuan siswa memahami materi.

Program ini diawali dengan seleksi para siswa kelas IV dan V. Dari 88 siswa hanya akan diambil 30 siswa saja. Kelas Anti Korupsi ini hanya

---

<sup>32</sup> <https://www.timesindonesia.co.id/read/192221/20181208/191143/mi-darul-ulum-buka-kelas-anti-korupsi/>, diakses 17 Agustus 2019.

dilaksanakan pada hari Sabtu saja selama 8 kali pertemuan. Output dari program ini, menurutnya membuat para siswa tahu, kemudian pada tingkatan SMP atau MTs memahami dan tingkatan SMA atau Madrasah Aliyah bisa mengaplikasikannya. “Seluruh materi dari MCW, sudah ada kurikulumnya, penyampaiannya berbentuk film, diskusi hingga pengaplikasian dalam keseharian,” ujarnya.

Sementara dalam observasi, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah darul Ulum, bapak Ulul Azmi, beliau mengatakan:

“Pendidikan anti korupsi selama ini hanya sebatas wacana dan berhenti ketika mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kita tidak mau seperti itu mas, kita harus berbuat segera dalam hal melakukan perlawanan terhadap korupsi, salah satunya melalui pendidikan anti korupsi ini. Kita berbuat terlebih dahulu, setelah itu kita lakukan evaluasi. Memang untuk programnya teman-teman Malang Corruption Watch (MCW), IPNU dan IPPNU yang membuat, kemudian pihak sekolah memfasilitasi dan melakukan diskusi tentang bagaimana modelnya dan tentunya selesai program ini kita adakan evaluasi. Sejauh ini sekolah sudah me-launching kantin kejujuran, untuk penjaganya adalah siswa-siswa sendiri yang telah di edukasi pendidikan anti korupsi. Selain media kantin kejujuran, perilaku nilai anti korupsi tercermin dalam aktivitas sehari-hari disekolah”<sup>33</sup>

Berdasarkan paparan diatas, peneliti perlu mengkaji dan mendalami upaya-upaya sekolah dalam rangka membentuk siswa yang mempunyai karakter anti korupsi melalui penciptaan budaya sekolah. Apakah memang upaya-upaya tersebut ada implikasinya terhadap penanaman karakter anti korupsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penciptaan Budaya

---

<sup>33</sup> Wawancara, 14 Agustus 2019, pukul 10.35 wib.

sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti korupsi (Studi Kasus di MI Darul Ulum Batu, Malang)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi?
3. Bagaimana dampak positif yang ditimbulkan dari penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami beberapa point sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang perencanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan MI Darul Ulum Batu, Kota Batu.
2. Mendeskripsikan tentang strategi pelaksanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan MI Darul Ulum Batu, Kota Batu.

3. Memahami dampak positif yang ditimbulkan dari penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan MI Darul Ulum Batu, Kota Batu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritik dan praktis yang bermanfaat bagi kepentingan diantaranya:

1. Manfaat teoritik
  - a. Dapat memberikan kontribusi akademik dan mengembangkan teori tentang penciptaan budaya sekolah dan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, dan para pengelola lembaga pendidikan.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi lembaga pendidikan dasar khususnya dalam melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter anti korupsi.

- b. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat berguna sebagai media untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengalaman mengenai pendidikan anti korupsi yang dimulai dari sekolah dasar.

#### E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan eksplorasi penelitian, terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Rosida Tiurma Manurung, *“Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik, Jurnal Socioteknologi, 27 (Desember 2012).*
2. Siti Ekowati Rusdini, Maman Rachman, Eko Handoyo, *“Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kudus,” Educational Social Studies Journal, 1 (Maret 2016).*
3. Choiriyah, Nadziroh, Wachid Pratomo *“Konsep Pembelajaran PKn dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar,” Jurnal Taman Cendekia, 01 (Juni 2017).*
4. Sa’i, *“Penanaman Rasa Tabu Korupsi Pada Anak Sekolah Dasar,” Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 4 (Juli – Desember 2017).*
5. Rizqy Narendra Jati, *Internalisasi Nilai-nilai Anti korupsi Peserta Didik Pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).*

6. Mahmud, *Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Anti korupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
7. Ilham Andika Putra, Cecep Darmawan, Syaifullah Syam, “*Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi*,” *Jurnal Sosieta*, 8, 2018.
8. Ahmad Zuber, “*Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*,” *Journal of Development and Social Change*, 1 (Oktober 2018).

**Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.**

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Rosida Tiurma Manurung, (2012).	Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik, <i>Jurnal Sositologi</i> , Institut Teknologi Bandung.	Pembahasan pada aspek pendidikan anti korupsi.	Fokus pada integrasi konsep dan nilai-nilai moral ke dalam perilaku yang berkarakter dan humanistik.	Penelitian ini berjudul penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Batu. Fokus penelitian ini pada penciptaan budaya sekolah dan strategi sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi.
2	Siti Ekowati Rusdini dkk, (2016).	Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kudus,	Pembahasan pada aspek pendidikan anti korupsi.	Fokus pada nilai kejujuran yang dalam pendidikan anti korupsi.	

		<i>Journal of Educational Social Studies</i> , Universitas Negeri Semarang.		
3	Choiriyah dkk, (2017).	Konsep Pembelajaran PKn dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar, <i>Jurnal Taman Cendekia</i> , Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.	Pembahasan pada aspek pendidikan anti korupsi.	Fokus melalui media pelajaran PKn.
4	Sa'i, (2017).	Penanaman Rasa Tabu Korupsi Pada Anak Sekolah Dasar, <i>Jurnal Al-Ijtima'iyyah</i> , UIN Ar-Raniry Darussalam	Pembahasan pada aspek nilai-nilai anti korupsi.	Fokus pada penanaman rasa tabu melakukan korupsi.
5	Rizqy Narendra Jati, (2017).	Internalisasi Nilai-nilai Anti korupsi Peserta Didik Pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta, <i>Tesis</i> , UIN Sunan Kalijaga.	Pembahasan pada aspek nilai-nilai anti korupsi.	Fokus melalui media pembelajaran PAI dan Budi Pekerti.
6	Mahmud, (2017).	Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Anti korupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota	Pembahasan pada aspek nilai-nilai anti korupsi.	Fokus pada integrasi penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran PPKn dan IPS.

		Yogyakarta), <i>Tesis</i> , UIN Sunan Kalijaga.		
7	Ilham Andika Putra, (2018).	Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi, <i>Jurnal Sosietas</i> , Universitas Pendidikan Indonesia.	Pembahasan pada aspek pendidikan anti korupsi.	Fokus pada pola asuh otoriter-demokratis.
8	Ahmad Zuber, (2018).	Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK, <i>Journal of Development and Social Change</i> , Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia.	Pembahasan pada aspek pendidikan anti korupsi.	Fokus penelitian pada kurikulum pendidikan anti korupsi.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rizqy Narendra Jati,<sup>34</sup> hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui proses belajar mengajar pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada pembelajaran PAI, nilai anti korupsi yang ditanamkan sesuai dengan amanat Sembilan Nilai (SEMAI). yaitu: kejujuran, disiplin, tanggungjawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil dan berani. Kemudian proses internalisasi nilai anti korupsi pada pembelajaran PAI di SMAN 2 Yogyakarta dilakukan dengan tiga tahapan, yakni: tahap pengetahuan tentang moral, tahap perasaan tentang moral, dan tahap perbuatan/tindakan moral. Dan ada beberapa faktor pendukung dalam

<sup>34</sup> Rizqy Narendra Jati, *Internalisasi Nilai-nilai Anti korupsi Peserta Didik Pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta, Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

internalisasi nilai-nilai anti korupsi, yaitu: pertama, ada dukungan dari berbagai pihak, dalam hal ini guru, komite sekolah, karyawan, dan warga sekolah. Kedua, adanya kerjasama dengan pukat dari Fakultas Hukum UGM, dukungan dari wali murid. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: belum semua guru menginternalisasikan nilai anti korupsi secara sistematis.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mahmud,<sup>35</sup> hasil penelitian menunjukkan, pertama, pentingnya nilai-nilai anti korupsi karena pembentukan dan perkembangan kepribadian peserta didik, pembentukan nilai-nilai dalam pendidikan, serta pengetahuan anti korupsi sejak dini. Kedua, integrasi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn dan IPS aspek implementasi teoritis adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada aspek implementasi praktis melalui pembiasaan, kegiatan rutin, dan keteladanan. Selain itu analisis konstruksi sosial terhadap nilai-nilai pendidikan anti korupsi, didapati bahwa nilai terjadi karena adanya interaksi antara pembawa nilai, guru bagi peserta didik, dan memberikan dan memberikan pengaruh kepadanya untuk melaksanakan melalui tiga tahapan, yakni: ekspresi perilaku peserta didik, pelembaan nilai, kesadaran atau penghayatan nilai.

---

<sup>35</sup> Mahmud, *Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Anti korupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rosida Tiurma Manurung,<sup>36</sup> berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai moral (integrated curriculum) ke dalam perilaku yang berkarakter dan humanistik. Pendidikan anti korupsi dapat didesain dan diimplementasi dalam satuan pembelajaran mulai tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi dengan strategi dan metode yang terukur.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sa'i,<sup>37</sup> hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh merupakan provinsi terkorup ke dua di Indonesia. Satu cara yang diharapkan dapat mencegah korupsi di masa yang akan datang adalah dengan membina mental anak didik, yaitu menanamkan rasa tabu melakukan korupsi. Ini perlu dilakukan karena penanaman rasa tabu ketika masih kecil, akan mewarnai kehidupan hingga ke usia tua. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan ke arah itu sudah ada. Akan tetapi setelah diadakan penelitian, ternyata peraturan itu belum dilaksanakan secara terprogram. Alasan tenaga pendidik belum melaksanakan itu karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang dibuat secara rinci, baik dalam kurikulum atau silabus nasional maupun kurikulum atau silabus local. Supaya itu cepat terwujud, maka hendaknya Pemerintah Daerah, Majelis Pendidikan Daerah, dan

---

<sup>36</sup> Rosida Tiurma Manurung, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik," *Sosioteknologi*, 27 (Desember 2012).

<sup>37</sup> Sa'i, "Penanaman Rasa Tabu Korupsi Pada Anak Sekolah Dasar," *Al-Ijtima'iyyah*, 4 (Juli – Desember 2017).

lembaga lain yang memegang kebijakan di bidang pendidikan harus segera membuat regulasi baru di bidang ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zuber,<sup>38</sup> hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan anti korupsi merupakan konsep yang ditawarkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Adapun beberapa model yang digunakan antara lain: (1) Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri, (2) Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran, (3) Model di Luar Pembelajaran, (4) Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah, (5) Model Gabungan. Sedangkan untuk metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi, dapat dilakukan dengan: (1) Metode demokratis, (2) Metode Pencarian bersama, (3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama, (4) Metode keteladanan, (5) Metode Live In, (6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Choiriyah dkk,<sup>39</sup> berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penanaman pendidikan anti korupsi melalui pelajaran PKn di SDN 01 Plumbon, SDN 01 Tawangmangu dan SDN 01 Tengkluk berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pendidikan anti korupsi sudah diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di ketiga sekolah. Nilai-nilai anti korupsi yang

---

<sup>38</sup> Ahmad Zuber, "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," *Journal of Development and Social Change*, 1 (Oktober 2018).

<sup>39</sup> Choiriyah dkk, "Konsep Pembelajaran PKn dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar," *Taman Cendekia*, 01 (Juni 2017).

diajarkan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai keterbukaan, dan nilai tanggung jawab. Pada pelaksanaan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara penerapan di visi dan misi serta budaya sekolah yang meliputi berbagai kegiatan perilaku warga sekolah, kantin kejujuran dan kedisiplinan serta tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat atau kendala yaitu: (1) kurangnya kesadaran siswa, (2) masih adanya kebiasaan perilaku koruptif. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu: (1) keteladanan, (2) pembiasaan, (3) pemberian sanksi yang tegas. (4) lomba dan narasumber (5) peningkatan ketaqwaan.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Siti Ekowati Rusdini dkk,<sup>40</sup> hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran melalui pembelajaran pendidikan anti korupsi, Gerakan Anti Menyontek (GAM), program warung kejujuran, telepon kejujuran, pemakaian pin anti korupsi, Examen Conscientiae, serta peringatan Hari Anti korupsi dalam rangka menanamkan nilai kejujuran pada siswa. Simpulan penelitian ini adalah dengan pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dapat meningkatkan sikap jujur pada siswa yang dapat dilihat dalam buku transaksi warung kejujuran menunjukkan

---

<sup>40</sup> Siti Ekowati Rusdini dkk, "Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kudus," *Educational Social Studies*, 1 (Maret 2016).

jumlah uang yang masuk dan barang yang keluar sudah sesuai, siswa malu untuk melakukan perbuatan menyontek serta siswa berani menegur teman yang berbuat curang.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Ilham Andika Putra dkk,<sup>41</sup> hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh otoriter-demokratis dalam menanamkan pendidikan anti korupsi di Kota Bandung sangat penting, dimana keluarga sebagai pendidikan pilar pendidikan pertama dan tempat sosialisasi sekunder dan sebelum anak masuk lingkungan dan diajarkan dengan pendidikan diluar, pendidikan orang tua harus kuat karena orang tua adalah fondasi awal, pendidikan disini adalah pendidikan tentang penerapan pola asuh yang baik dan juga pengetahuan tentang anti korupsi yang baik. Jika keluarga tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pendidikan anti korupsi maka akan berdampak pada anak yang akan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan korupsi nantinya. Pola asuh yang dipilih oleh orang tua juga akan berdampak pada mudah dan sulitnya penanaman pendidikan karakter anti korupsi. Pola asuh yang terbaik adalah otoriter-demokratis, dikarenakan anak akan terus terawasi dan diarahkan dengan nilai-nilai anti korupsi. Pola asuh otoriter-demokratis adalah pola asuh yang paling ideal untuk menanamkan pendidikan anti korupsi dengan menyeimbangkan dan mengkolaborasikan keduanya otoriter yang tegas harus sekali-sekali menjadi demokratis agar anak

---

<sup>41</sup> Ilham Andika Putra dkk, "Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi," *Sosietas*, 8, 2018.

bisa berkembang dengan baik dan demokratis harus sekali-sekali otoriter agar anak berada pada jalur yang benar dengan adanya pengawasan yang baik oleh orang tua. Atau bahkan antara suami dan istri menerapkan kedua pola asuh ini, agar lebih mudah dalam mengintegrasikannya dalam mendidik anak.

Dari kedelapan penjelasan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Penelitian berusaha meneliti dan memahami konsep pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum, Kota Batu.
2. Peneliti juga mengkaji tentang proses pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui penciptaan budaya sekolah di MI Darul Ulum, Kota Batu.
3. Peneliti juga berusaha untuk mengetahui dan memahami dampak positif yang ditimbulkan dari penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum, Kota Batu.

#### **F. Definisi Istilah**

Definisi istilah berguna untuk menghindari terjadinya miss konsepsi, maka penulis memberikan penjelasan beberapa yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Budaya sekolah

Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian yang dijalankan oleh kepala sekolah, guru, staf, dan siswa di MI Darul Ulum, Kota Batu.

### 2. Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai korupsi, bentuk dan aspek-aspeknya, serta membangun karakter manusia yang anti terhadap praktek dan perilaku korupsi.

### 3. Dampak positif yang ditimbulkan dari penciptaan budaya sekolah dalam penerapan pendidikan anti korupsi

Dampak positif yang ditimbulkan dari penciptaan budaya sekolah dalam penerapan pendidikan anti korupsi adalah konsekuensi langsung dari budaya sekolah terhadap perilaku warga sekolah yang mencerminkan kebiasaan anti korupsi

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Penciptaan Budaya sekolah

##### 1. Pengertian Penciptaan Budaya sekolah

Penciptaan berasal dari kata dasar “cipta” yang mendapatkan imbuhan *pe* dan *an*. Awalan *pe* dan akhiran *an* pada kata penciptaan memiliki makna yang bertalian dengan kata verbal *me* atau proses.<sup>42</sup> Kata cipta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.<sup>43</sup> Sedangkan kata penciptaan ialah proses, cara, perbuatan menciptakan.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi kata penciptaan diatas, sebenarnya tidak berbeda dengan kata pengembangan. Karena pada dasarnya kata penciptaan bermakna proses, cara dan perbuatan yang menciptakan. Maka pengembangan adalah aktivitas yang membantu untuk merencanakan kegiatan untuk meningkatkan pengembangan diri secara maksimal.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Minhaji dan Nurul Qomariyah, “Religious Environment: Penciptaan Suasana Religius di Sekolah”, *Lisan Al-Hal* 10 (Desember, 2016), 235.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/cipta>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/cipta>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>45</sup> Melvin Grady Lolowang dkk, “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Berlian Kharisma Pasifik Manado,” *EMBA*, 4 (Juni 2016), 179.

Pengembangan menurut Magginson dan Mathews dalam Ahmad Fatah Yasin adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan potensi dan efektifitas.<sup>46</sup> Pengembangan bila dilihat dalam konteks pendidikan adalah suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecendrungan lebih tinggi dan meluas serta mendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan.<sup>47</sup> Jadi penciptaan adalah suatu proses yang dilakukan secara terorganisir dan terencana untuk memperbaiki sebagai upaya menciptakan kualitas pendidikan sesuai kebutuhan.

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa secara esensi tidak ada perbedaan antara makna penciptaan dan pengembangan. Hanya saja penulis menyimpulkan bahwa kata penciptaan lebih bersifat konsepsional, sedangkan kata pengembangan lebih bersifat operasional.

Budaya sekolah terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan sekolah. Koentjaraningrat menyatakan budaya sekolah adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>48</sup> Budaya merupakan produk lembaga yang berakar dari sikap mental, komitmen,

---

<sup>46</sup>Ahmad Fatah Yasin, "Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Studi Kasus di MIN 1)," *el-Qudwah*, 1 (April 2011), 166.

<sup>47</sup>M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Ed. Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 208.

<sup>48</sup>Agus Yuliono, "Pengembangan Budaya Sekolah Berprestasi: Studi Tentang Penanaman Nilai dan Etos Berprestasi di SMA Karangturi," *Komunitas*, 3 (2011), 170.

dedikasi dan loyalitas setiap personil lembaga.<sup>49</sup> Richey dalam Mohammad Ansyar menyatakan bahwa budaya adalah terkait faktor-faktor seperti kebiasaan, cara tradisional berfikir dan berbuat, norma sosial dan standar moral, serta bahasa dan pola bicara.<sup>50</sup> Broom dan Selznick mendefinisikan kebudayaan terkait pendidikan mencakup pengetahuan, keterampilan, kepercayaan dan anggota suatu masyarakat.<sup>51</sup>

Sekolah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bab 2, pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>52</sup> Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran yang dikelompokkan menurut tingkatan, jurusan dan sebagainya.<sup>53</sup> Sekolah merupakan lembaga yang bertanggungjawab mendidik peserta didik yang berkualitas dan merupakan agenda utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan suatu

---

<sup>49</sup> Neprializa, "Manajemen Budaya Sekolah," *Manajer Pendidikan*, 9 (Juli 2015), 419.

<sup>50</sup> Mohammad Ansyar, *Kurikulum; Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), 6.

<sup>51</sup> Mohammad Ansyar, *Kurikulum; Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*, 6.

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), <https://kbbi.web.id/cipta>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

negara.<sup>54</sup> Jadi sekolah adalah lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tingkatan dan jurusannya. Taba dalam Mohammad Ansyar terkait tentang fungsi sekolah adalah sebagai pemelihara dan penerus kebudayaan yang telah ada, di era kini sekolah dituntut bukan hanya sebagai penerus atau pentransfer muatan budaya saja, tetapi juga untuk mengembangkan budaya masyarakat itu sendiri.<sup>55</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tingkatan dan jurusannya untuk mengembangkan budaya yang ada dimasyarakat sebagai pelaksanaan pendidikan suatu negara.

Langgulung mengatakan bahwa budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah.<sup>56</sup> Deal dan Peterson dalam supardi menyatakan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala

---

<sup>54</sup> Mohammad Mustari, "Budaya Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Indonesia," *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1, (Juli 2013), 185.

<sup>55</sup> Mohammad Ansyar, *Kurikulum; Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*, 14.

<sup>56</sup> Yudha Pradana, "Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah (Studi Deskriptif di SD Amaliah Ciawi Bogor)," *Untirta Civic Education Journal*, 1 (April 2016), 60.

sekolah, guru, petugas administrasi, siswa dan masyarakat sekolah.<sup>57</sup> Budaya sekolah adalah kegiatan siswa berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah yang terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah.<sup>58</sup> Daryanto mengatakan bahwa budaya sekolah bukan hanya refleksi dari sikap para personil sekolah, namun juga merupakan cerminan kepribadian sekolah yang ditunjukkan oleh perilaku individu dan kelompok dalam sebuah komunitas sekolah.<sup>59</sup> Budaya sekolah yang ideal adalah budaya sekolah yang kuat. Budaya yang kuat merupakan budaya dimana nilai-nilai inti dipegang secara intensif dan dianut bersama oleh seluruh warga sekolah serta mempengaruhi intensitas perilaku warga sekolah.<sup>60</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan nilai-nilai yang disepakati, ditaati dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah yang kemudian menjadi kebiasaan dalam rangka membentuk perilaku seluruh warga sekolah seperti yang diharapkan.

---

<sup>57</sup> Eva Maryamah, "Pengembangan Budaya Sekolah," *Tarbawi*, 2 (Juli-Desember 2016), 89.

<sup>58</sup> Melani Septi Arista Anggraini, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SDN Kotagede 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017," *Jurnal Pendidikan*, 3 (Mei 2017), 152.

<sup>59</sup> Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, 3.

<sup>60</sup> Warsilah dkk, "Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah di UPT SD Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman," *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3 (April 2015), 98.

## 2. Dimensi Budaya Sekolah

Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud, yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lain-lain, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>61</sup>

Deal dan Peterson dalam Ariefa Efaningrum menjelaskan bahwa setidaknya ada empat kultur sekolah, yaitu; pertama, visi dan nilai. Visi merupakan citra ideal dan unik tentang masa depan atau orientasi masa depan terhadap kondisi ideal yang dicita-citakan. Nilai merupakan persenyawaan dari pemikiran, perasaan dan preferensi. Kedua, upacara dan perayaan. Momentum-momentum penting di sekolah dapat dirayakan secara sederhana untuk menyuntikkan semangat yang dimiliki sekolah. Ketiga, sejarah dan cerita. Setiap budaya sekolah ada aliran sejarah dan peristiwa masa lalu yang turut membentuk budaya berkembang pada masa kini. Keempat, arsitektur dan artefak. Sekolah biasanya memiliki symbol-simbol seperti: arsitektur, motto, kata-kata dan tindakan. Setiap sekolah memiliki logo, motto, lagu (mars dan hymne) dan seragam sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Eva Maryamah, "Pengembangan Budaya Sekolah," 88.

<sup>62</sup> Ariefa Efaningrum, "Kultur Sekolah," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2 (Mei 2013), 25.

Senada dengan itu, Muhaimin menyatakan bahwa budaya sekolah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (values) yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan yang ada didalam sekolah tersebut.<sup>63</sup>

Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada di dalam sekolah. Dari pikiran-pikiran itulah akan menjadi bahan utama pembentuk budaya sekolah. Dari budaya tersebut kemudian muncul dalam berbagai simbol dan tindakan yang kasat indra yang dapat diamati dan dirasakan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Sobirin sebagaimana dikutip oleh Miftahol Ansyori lebih simpel menjelaskan elemen budaya organisasi (termasuk didalamnya budaya sekolah) terdiri dari dua elemen pokok yaitu elemen yang bersifat idealistik dan elemen yang bersifat behavioral.<sup>64</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan ada dua unsur, yakni:

1. Budaya sekolah yang tidak kasat mata

Unsur ini adalah bersifat filosofi atau pandangan dasar sekolah mengenai realitas yang kompleks, nilai-nilai yang menjadi karakter

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 48.

<sup>64</sup> Miftahol Ansyori, *Pembentukan Perilaku Keagamaan Melalui Budaya Sekolah (Studi Multi Kasus Pada SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan dan MI Sirojut Tholibin I Pamekasan)*, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 25.

sekolah. Dan biasanya dapat di lihat secara konseptual dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai sekolah.

## 2. Budaya sekolah yang kasat mata

Unsur ini adalah bentuk konkrit dari unsur yang tidak kasat mata, meliputi:

- a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
- b. Kurikulum
- c. Struktur organisasi
- d. Ritual dan upacara
- e. Prosedur belajar mengajar
- f. Peraturan sekolah
- g. Pola interaksi warga sekolah

Lalu, dimensi budaya sekolah yang menjadi objek penelitian adalah dimensi behavioral. Elemen behavioral yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah elemen yang kasat mata, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para siswa. Elemen behavioral dalam penelitian ini seperti kegiatan rutinitas, kegiatan spontanitas, dan kegiatan lain yang merepresentasikan nilai-nilai anti korupsi.

### 3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Budaya Sekolah

Prinsip mempunyai arti asas, pokok, penting, fundamen dan aturan pokok.<sup>65</sup> Moekijat dalam Daryanto mendefinisikan prinsip sebagai suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan.<sup>66</sup>

Mulyasa menyatakan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budaya sekolah, yaitu;<sup>67</sup>

- a. Merumuskan masalah;
  - 1) mengidentifikasi masalah, dan
  - 2) menganalisis kebutuhan
- b. Merumuskan dan menganalisis tujuan pembaruan pendidikan
- c. Menentukan persyaratan untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor penunjang dan penghambat.
- e. Memilih dan menentukan strategi yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor penunjang dan penghambat.
- f. Melaksanakan strategi yang dipilih, termasuk manajemen, dan kontrol terhadap strategi tersebut.

---

<sup>65</sup> Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, 432.

<sup>66</sup> Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, 17.

<sup>67</sup> Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Cet. I; Jakarta: Bumi aksara, 2011), 114.

- g. Menilai terhadap efektivitas pembaruan pendidikan yang telah dilaksanakan.
- h. menyempurnakan dan menyebabkan hasil pembaruan pendidikan.

Budaya sekolah yang efektif akan memberikan efek positif bagi semua unsur dan personil sekolah. Menurut Daryanto ada beberapa hal prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan budaya dan iklim sekolah sebagai berikut.<sup>68</sup>

- a. Berfokus pada visi, misi dan tujuan sekolah.
- b. Penciptaan komunikasi formal dan informal.
- c. Inovatif dan bersedia mengambil resiko.
- d. Memiliki strategi yang jelas.
- e. Berorientasi kinerja.
- f. Sistem evaluasi yang jelas.
- g. Memiliki komitmen yang kuat.
- h. Keputusan berdasarkan konsensus.
- i. Sistem imbalan yang jelas.
- j. Evaluasi diri.

#### 4. Indikator Budaya Sekolah

Dari beberapa uraian pakar diatas, maka peneliti menyimpulkan ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan indikator budaya sekolah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut;

<sup>68</sup> Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, 18.

**Tabel 2.1 Indikator Budaya Sekolah.**

No	Aspek	Indikator Budaya Sekolah
1	Nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa membersihkan lingkungan sekolah atas kesadaran diri sendiri.</li> <li>2. Siswa melakukan sholat dhuha berjamaah.</li> <li>3. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu.</li> </ol>
2	Kebiasaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa datang ke sekolah sebelum pukul 06.45 wib.</li> <li>2. Siswa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru.</li> </ol>
3	Hasil Karya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa menghias sekolah dengan hasil karya yang diciptakan.</li> <li>2. Siswa merepresentasikan nilai-nilai anti korupsi dalam bentuk karya.</li> </ol>

## B. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

### 1. Pengertian Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>69</sup>

Ahmad D. Marimba dalam Isti Nurhayati mengemukakan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan dalam

<sup>69</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

hal ini adalah: 1) usaha (kegiatan) yang bersifat bimbingan dan dilakukan secara sadar, 2) ada pendidik dan peserta didik, 3) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang digunakan.<sup>70</sup>

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “*paedagogie*” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*pais*” artinya anak dan “*again*” artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak.<sup>71</sup>

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.<sup>72</sup>

Pendidikan merupakan sebuah sistem. Sebagai sistem, aktivitas pendidikan terbangun dalam beberapa komponen, yaitu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Semua komponen yang membangun sistem pendidikan, saling berhubungan,

---

<sup>70</sup> Isti Nurhayati, “Implikasi Budaya Sekolah Terhadap Peri Kehidupan Akademis,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11 (Februari 2016), 141.

<sup>71</sup> Aas Siti Sholichah, “Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 07 (April 2018), 25.

<sup>72</sup> Nurkholis, “Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi,” *Jurnal Kependidikan*, 1 (November 2013), 26.

saling tergantung, dan saling menentukan satu sama lain. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.<sup>73</sup>

Azyumardi Azra dalam Sabar Budi Raharjo memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa pendidikan lebih sekedar pengajaran, artinya suatu proses di mana suatu bangsa membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.<sup>74</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha yang sadar untuk mengembangkan potensi manusia yang dalam prosesnya melalui suatu sistem yang saling berkaitan guna mempersiapkan generasi suatu bangsa.

## 2. Pendidikan Anti Korupsi

Pemberantasan korupsi tidak cukup teratasi hanya dengan mengandalkan proses penegakkan hukum. Menghilangkan korupsi juga perlu dilakukan dengan tindakan preventif, dan sekolah menjadi tempat yang strategis dalam pencegahan anti korupsi sedini mungkin. Melalui sekolah,

---

<sup>73</sup> Sulaiman Saat, "Faktor-Faktor Determinan Dalam Pendidikan," *Al-Ta'dib*, 8 (Juli-Desember 2015), 1.

<sup>74</sup> Sabar Budi Raharjo, "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16 (Mei 2010), 231.

penanaman nilai-nilai anti korupsi sudah diperkenalkan, dipraktekkan dan akan menjadi kebiasaan untuk tidak korupsi.

Muhamad Nurdin menyatakan pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat.<sup>75</sup>

Pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.<sup>76</sup>

Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.<sup>77</sup>

Pendidikan anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi dan sebagai upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak dengan tegas setiap bentuk tindak korupsi. Penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi sangat penting

---

<sup>75</sup> Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 175.

<sup>76</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Cet I; Semarang: Ombak, 2013), 43.

<sup>77</sup> Agus Supandi dkk, "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Rangka mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi," *Research and Development Journal of Education* 1 (April 2015), 32.

dilakukan dengan harapan agar generasi muda secara sadar dan bertanggung jawab mampu untuk mencegah perbuatan korupsi bahkan dapat memberantas perilaku korupsi.<sup>78</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai dan perilaku tentang korupsi sehingga siswa mampu mengendalikan diri dari perilaku koruptif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperkenalkan doktrin anti korupsi disebut dengan Sembilai Nilai Kehidupan (SEMAI). Nilai-nilai ini dirumuskan dari nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai-nilai kehidupan yang harus diamalkan agar setiap pribadi memiliki perilaku anti koruptif.<sup>79</sup>

Adapun kesembilan nilai tersebut sebenarnya berbanding lurus dengan 18 nilai atau karakter yang ada di kurikulum 2013. SEMAI yang diperkenalkan oleh KPK adalah: jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, kerja keras, berani dan adil, biasa disingkat "JUPE TANGKER MANDI SEBEDIL".

---

<sup>78</sup> Ezy dkk, "Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang," *Journal of Civic Education*, ISSN: 2622-237X, hlm, 12.

<sup>79</sup> Fira Mubayyinah, "SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Al-Hikmah*, 1 (2017), 224.

### 3. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Eko Handoyo menyatakan ada tiga tujuan pendidikan anti korupsi, yakni; *pertama*, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua*, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan *ketiga* pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.<sup>80</sup>

David Wijaya menyatakan ada lima tujuan pendidikan anti korupsi, yakni;<sup>81</sup>

- a. Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (antikorupsi), yaitu jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, berani, peduli dan bermartabat.
- b. Mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air serta didukung wawasan kebangsaan yang kuat.
- c. Menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.

---

<sup>80</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, 44.

<sup>81</sup> David Wijaya, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Indeks, 2014), 25.

- d. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.
- e. Menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, serta bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan diatas, dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan tiga domain penting yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesiskan ide-ide dan materi baru. Kedua, domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi, maka dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi ketiga domain di atas harus diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit.

#### **4. Indikator Pendidikan Anti Korupsi**

Dari beberapa uraian pakar diatas, maka peneliti menyimpulkan ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan indikator pendidikan anti korupsi, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.2 Indikator Pendidikan Anti Korupsi.**

No	Aspek	Indikator Pendidikan Anti Korupsi
1	Disiplin	1. Siswa datang ke sekolah sebelum pukul 06.45 wib. 2. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu.
2	Mandiri	1. Siswa tidak mencontek saat diberikan tugas. 2. Siswa puas dengan hasil kerjanya sendiri.

### C. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Muhammad Nurdin menyatakan setidaknya ada tiga strategi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah, yaitu;<sup>82</sup>

#### *1. Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran*

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajaran. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.

#### *2. Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstrakurikuler*

Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah/madrasah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada

<sup>82</sup> Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi*, 180.

lembaga diluar sekolah/madrasah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### ***3. Model Pembudayaan Aktivitas dan Suasana Madrasah***

Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya, sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi siswa sekolah dasar, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa dikemudian hari.

David Wijaya menyatakan bahwa ada tiga macam strategi implementasi pendidikan anti korupsi, sebagai berikut:<sup>83</sup>

#### ***1. Integrasi dalam Mata Pelajaran yang ada***

Dalam hal ini, sekolah harus mengembangkan silabus, RPP, bahan ajar dan penilaian pada kompetensi sesuai dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dikembangkan.

#### ***2. Mata Pelajaran dalam Muatan Lokal***

Pendidikan anti korupsi dikembangkan dan ditetapkan oleh sekolah dengan mengakomodasi kearifan dan keunggulan lokal serta kebutuhan peserta didik di daerah setempat.

---

<sup>83</sup> David Wijaya, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, 30.

### ***3. Kegiatan Pengembangan Diri***

Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu;

- a. Pembudayaan dan pembiasaan, yaitu pengkondisian, kegiatan rutin, keteladanan, dan kegiatan spontan.
- b. Kegiatan terprogram melalui ekstrakurikuler (pramuka, PMR, UKS, olahraga, OSIS) serta bimbingan dan konseling.

Selain tiga macam strategi diatas, David Wijaya menyatakan bahwa ada tiga bentuk partisipasi publik untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasinya agar sekolah menjadi institusi yang berbudaya integritas (anti korupsi) di dalam setiap aktivitasnya, antara lain sebagai berikut.<sup>84</sup>

#### ***1. Keteladanan***

Semua pihak (pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan tokoh masyarakat) memberikan contoh atau keteladanan dalam berperilaku adil, jujur, disiplin, tanggung jawab serta peduli terhadap peserta didik.

#### ***2. Sosialisasi***

Semua pihak (pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan tokoh masyarakat) berperan aktif dalam mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dan lingkungannya.

#### ***3. Dukungan Dana, Sarana dan Prasarana***

---

<sup>84</sup> David Wijaya, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, 32.

Semua pihak (Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat) berpartisipasi aktif dalam bentuk dukungan dana, sarana dan prasarana untuk kelancaran sekolah mejadi suatu zona anti korupsi. Semua pihak melakukan pemantauan, pendampingan serta pembinaan terhadap kinerja sekolah dalam upaya membangun budaya anti korupsi.

#### **D. Implikasi Budaya Sekolah Terhadap Karakter Anti Korupsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>85</sup> Implikasi budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi berarti keterlibatan atau akibat langsung dari realitas budaya sekolah terhadap karakter anti korupsi pada peserta didik.

Hal ini menegaskan bahwa budaya sekolah yang dilakukan secara rutin akan membentuk karakter warga sekolah. Karena penanaman nilai-nilai tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa penanaman nilai-nilai harus mencakup aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Maka, budaya sekolah menjadi wadah yang mencakup ketiga aspek itu.

Dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Albert Bandura yang menyatakan bahwa proses belajar manusia biasanya terjadi

---

<sup>85</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi>, (diakses, 10 Agustus 2019).

dengan mengamati konsekuensi perilaku model.<sup>86</sup> Pembelajar memperoleh informasi lewat pengamatan terhadap konsekuensi perilakunya sendiri atau perilaku orang lain. Informasi yang diperoleh lewat pengamatan ini dapat digunakan dalam berbagai macam situasi jika ia membutuhkannya. Berbekal informasi yang diperoleh dari pengamatan terdahulu, seorang individu akan memperkirakan bahwa jika mereka bertindak dengan cara tertentu dalam situasi tertentu, maka akan muncul konsekuensi tertentu.<sup>87</sup> Teori Bandura dinamakan teori kognitif sosial karena ia menekankan fakta bahwa hampir semua informasi diperoleh dari interaksi dengan orang lain.<sup>88</sup> Dinamakan kognitif sosial karena Bandura mengusulkan satu paradigma tunggal untuk menjelaskan perolehan perilaku. Komponen-komponennya adalah: (a) model perilaku; (b) konsekuensi dari model; dan (c) proses kognitif pembelajar.<sup>89</sup>

Bandura menyatakan bahwa proses kognitif berperan penting dalam belajar. Kemampuan pembelajar untuk mengkodekan dan menyimpan pengalaman ke dalam bentuk simbolik dan merepresentasikan konsekuensi masa depan dalam pikiran merupakan hal yang penting untuk perolehan dan perubahan

---

<sup>86</sup> B.R Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, terj. Tri Wibowo B.S, Edisi VII 386.

<sup>87</sup> B.R Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, 366.

<sup>88</sup> B.R Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, 388.

<sup>89</sup> Margaret E. Gredler, *Learning and Instruction (Teori dan Aplikasi)*, terj. Tri wibowo B.S.), 466.

perilaku manusia. Oleh karena itu, pemrosesan kognitif terhadap peristiwa menjadi pedoman perilaku manusia.<sup>90</sup>

Bandura menguraikan bahwa proses belajar sosial kognitif melalui beberapa tahapan, yakni;

#### 1. Proses Atensi (perhatian)

Bandura menganggap belajar adalah proses yang terus berlangsung, tetapi ia menunjukkan bahwa hanya yang diamati sajalah yang dapat dipelajari. Perilaku baru tidak bisa diperoleh kecuali pengamat memperhatikan dan memahaminya secara akurat.

#### 2. Proses Retensi (ingatan)

Proses ini bertanggung jawab atas pengkodean simbolik perilaku dan penyimpanan kode visual atau verbal dalam memori. Proses ini penting karena pembelajar tidak dapat mengambil manfaat dari perilaku yang diamati saat tidak ada model kecuali mereka dikodekan dan disimpan untuk digunakan dikemudian hari.

Dalam proses retensi, informasi disimpan secara simbolis melalui dua cara, secara imajinatif dan verbal. Simbol-simbol yang disimpan secara imajinatif adalah gambaran tentang hal-hal yang dialami model. Sedangkan simbolisasi verbal adalah perilaku bisa ditangkap dengan baik dalam wadah kata-kata.

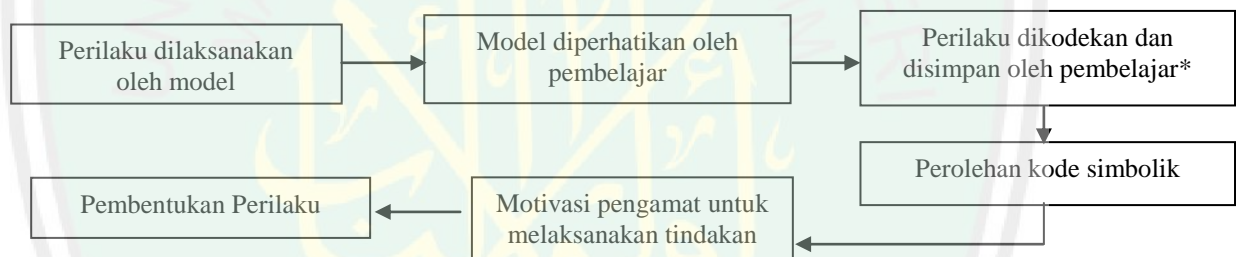
---

<sup>90</sup> Margaret E. Gredler, *Learning and Instruction (Teori dan Aplikasi)*, terj. Tri wibowo B.S.), 439.

### 3. Proses Reproduksi Motorik (pembentukan perilaku)

Setelah pengamat mendapatkan kode simbolik, kinerja dari perilaku yang dikuasai akan tergantung pada reproduksi motorik. Reproduksi motorik mencakup pemilihan dan pengorganisasian respons pada level kognitif, diikuti dengan pelaksanaan. Proses pembentukan perilaku menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa.

Tahapan proses belajar kognitif sosial Bandura dapat diilustrasikan pada gambar berikut:<sup>91</sup>

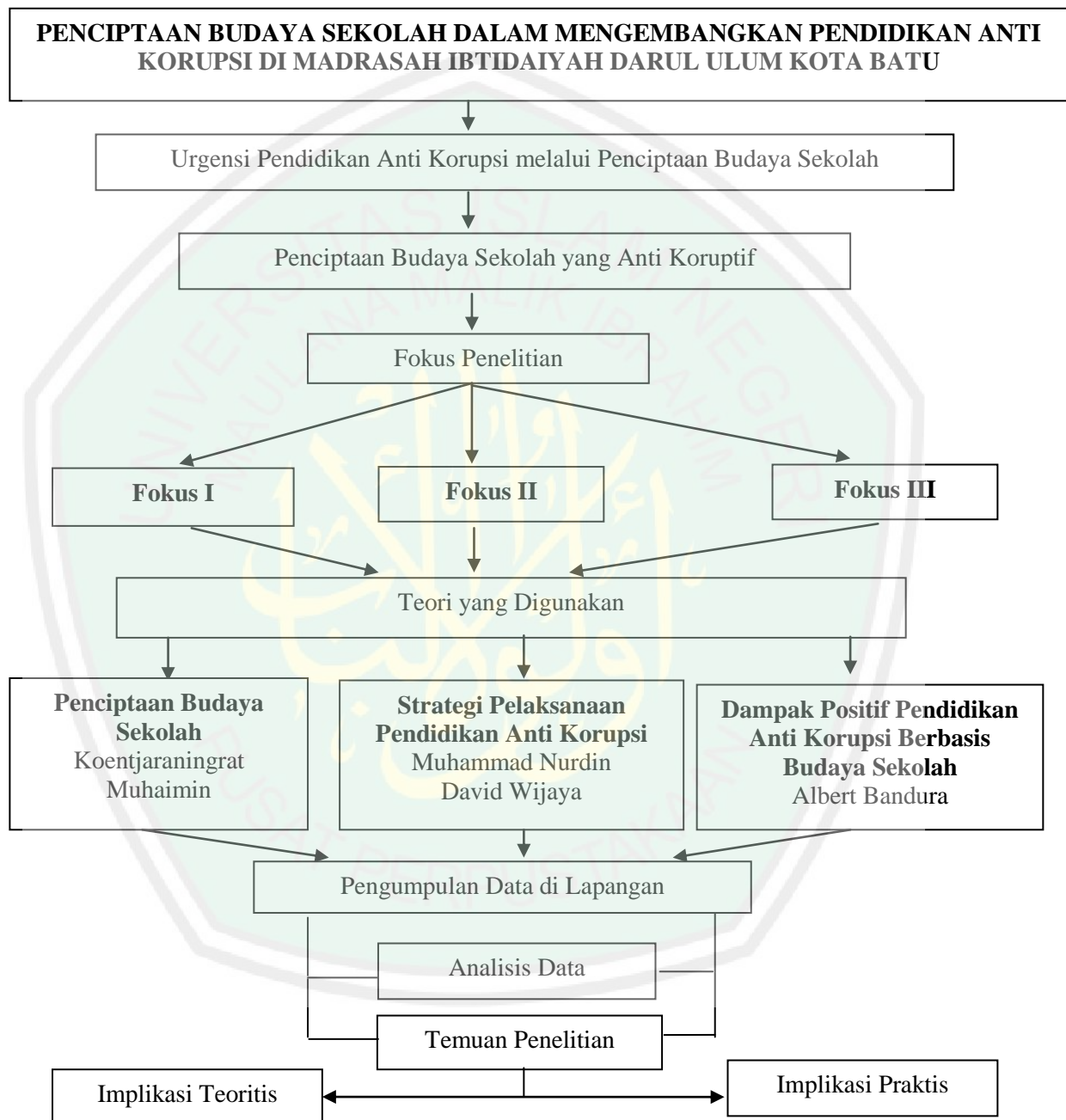


*\*Difasilitasi oleh penguatan pada model*

**Gambar 2.1** Proses belajar kognitif sosial (Sumber: Margaret, 2011).

<sup>91</sup> Margaret E. Gredler, *Learning and Instruction (Teori dan Aplikasi)*, terj. Tri wibowo B.S.), 438.

### E. Kerangka Berfikir Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi



**Gambar 2.2. Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Lexy Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>92</sup>

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>93</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Edisi IV, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4.

Lebih lanjut Creswell menguraikan ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif, sebagai berikut;<sup>94</sup>

1. Lingkungan alamiah (*natural setting*); peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Peneliti kualitatif tidak membawa individu-individu ke dalam laboratorium (atau situasi yang telah di-*setting* sebelumnya).
2. Peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*); peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan.
3. Beragam sumber data (*multiple sources of data*); peneliti kualitatif mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan informasi.
4. Analisis data induktif dan deduktif (*inductive and deductive data analysis*); peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan temanya dari bawah ke atas dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak.
5. Makna dari para partisipan (*participants' meaning*); dalam keseluruhan penelitian kualitatif, peneliti terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian,

---

<sup>94</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Edisi IV, 247-250.

bukan makna yang disampaikan oleh peneliti atau penulis lain dalam literatur-literatur tertentu.

6. Rancangan yang berkembang (*emergent design*); dalam penelitian kualitatif, proses penelitian selalu berkembang dan dinamis.
7. Refleksivitas (*reflexivity*); peneliti kualitatif merefleksikan peran mereka dalam penelitian dan latar belakang pribadi, budaya, dan pengalamannya berpotensi membentuk interpretasi, seperti tema-tema yang mereka kembangkan dan makna-makna yang mereka anggap sebagai sumber data.
8. Pandangan menyeluruh (*holistic account*); peneliti kualitatif membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas proses atau suatu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Edisi IV, 19

Jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial.<sup>96</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan rancangan kasus tunggal. Robert K. Yin menjelaskan penelitian studi kasus tunggal dapat dilakukan untuk beberapa studi kasus, yakni; *pertama*, manakala kasus tersebut menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik. *Kedua*, apabila kasus yang diteliti menyajikan suatu kasus *ekstrem* atau *unik*. *Ketiga*, manakala kasus yang diteliti adalah penyingkapan kasus itu sendiri. Untuk poin yang ketiga ini dilakukan apabila peneliti mempunyai kesempatan untuk mengamati dan menganalisis suatu fenomena yang tak mengizinkan penelitian ilmiah.<sup>97</sup>

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap secara berkala fenomena yang tampak di MI Darul Ulum Kota Batu, yaitu adanya upaya untuk mencegah korupsi melalui kegiatan warga sekolah yang termanifestasi dalam budaya sekolah. Data yang akan peneliti cari difokuskan pada upaya penanaman atau internalisasi nilai karakter anti korupsi melalui budaya sekolah di MI Darul Ulum Kota Batu.

---

<sup>96</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

<sup>97</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus; Desain dan Metode*, terj. M.Djauzi Mudzakir, (Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 47-49.

Berdasarkan paparan diatas dapat digarisbawahi bahwa penelitian kualitatif dengan metode studi kasus tunggal bertujuan untuk memahami tentang penciptaan suasana budaya sekolah dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi yang dimanifestasikan melalui budaya sekolah. Dipilihnya studi kasus tunggal ini juga karena peneliti menggunakan satu objek atau kasus di satu tempat yaitu MI Darul Ulum Kota Batu, hal ini dikarenakan dari informan yang sudah peneliti wawancara yakni *Malang Corruption Watch* (MCW) dan kepala madrasah ibtidaiyah Darul Ulum menyatakan bahwa untuk ruang lingkup Malang Raya, kelas anti korupsi baru dilaksanakan di MI Darul Ulum dan hal ini juga dapat di lihat dari informasi yang dimuat dalam media *Times Indonesia* yang terbit pada hari Sabtu, 08 Desember 2018.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Creswell menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan instrumen kunci. Artinya peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan.<sup>98</sup> Oleh karena itu, kehadiran peneliti menjadi bagian yang mutlak. Peneliti bertindak langsung sebagai perencana, pengumpul dan penganalisis data, sekaligus melaporkan hasil penelitiannya. Kehadiran peneliti di lokasi guna untuk mengetahui langsung situasi dan kondisi di sekolah.

---

<sup>98</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, 248.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pertemuan dengan pihak madrasah ibitidaiyah Darul Ulum, Kota Batu dalam rangka mengurus izin guna melakukan penelitian di lembaga tersebut.
2. Peneliti menyerahkan surat observasi dan proposal penelitian kepada kepala madrasah ibtidaiyah Darul Ulum, Kota Batu sebagai bahan penelitian.
3. Peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan.
4. Peneliti mengolah data menggunakan analisis data kualitatif dalam hal ini, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih MI Darul Ulum Kota Batu yang terletak di Jl. Lahor, No. 251, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih MI Darul Ulum Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. MI Darul Ulum Kota Batu merupakan SD swasta yang berdaya saing di Batu. Hal ini dapat dilihat dari akreditasi lembaga yang sudah mendapatkan nilai A.
2. MI Darul Ulum Kota Batu merupakan sekolah pertama yang melaksanakan pendidikan anti korupsi di Kota Batu.

#### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Creswell mengungkapkan bahwa data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data ini merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (utamanya kata-kata partisipan) atau gambar ketimbang angka.<sup>99</sup>

Menurut Rulam dalam Rifa 'Afuwah menjelaskan tentang cara memperoleh data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh, diolah dan disajikan oleh peneliti dari data sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.<sup>100</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi verbal yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan, yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman video/audio tape serta pengambilan foto. Sedangkan data yang berasal dari hasil pengamatan langsung peneliti dan catatan lapangan, dapat diperoleh setelah melakukan observasi terhadap subjek penelitian yang terkait dengan penciptaan suasana budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu. Data sekunder diperoleh peneliti dari informasi dari pihak lain yang disajikan dalam bentuk publikasi atau jurnal terkait subjek penelitian.

---

<sup>99</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, 276.

<sup>100</sup> Rifa 'Afuwah, *Strategi Pengembangan Budaya Agama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa (Studi Multi Kasus di MTs Surya Buana dan SMP Negeri 13 Malang)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2104), 55.

Data berbeda dengan sumber data, meskipun kedua hal tersebut saling berhubungan. Pertimbangan pemilihan masalah penelitian adalah tersedianya sumber data, “sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.”<sup>101</sup> Hubungan peneliti dan informan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan keterampilan komunikasi yang dibina peneliti sejak awal menjajaki lokasi penelitian. Adapun sumber data informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa.

Kepala sekolah mempunyai peranan yang *central* karena kepala sekolah merupakan penanggung jawab penuh lembaga. Kepala sekolah menjadi sumber utama dalam penelitian ini sehubungan dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh guru, siswa dan warga sekolah terutama terkait dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi berbasis budaya sekolah di MI Darul Ulum Kota Batu.

Guru mempunyai peranan yang penting sebagai pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan sekolah dalam hal ini adalah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi berbasis budaya sekolah. Maka semua aspek guru harus mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Guru menjadi informan dalam penelitian sehubungan dengan peranannya dalam kegiatan pembelajaran dan interaksinya dengan siswa. Dalam hal ini guru kelas IV dan VI

---

<sup>101</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 107.

di amardrasah ibtidaiyah darul Ulum, Kota Batu yang menjadi informan sumber data.

Selain itu informan berikutnya adalah siswa. Siswa berperan penting dalam kegiatan penciptaan suasana budaya sekolah yang anti koruptif. Siswa sebagai bagian dari realitas sosial disekolah tentu menjadi pelaku dalam membudayakan perilaku anti korupsi. Dalam penelitian ini, siswa kelas IV dan V madrasah ibtidaiyah Darul Ulum, Kota Batu yang telah diseleksi untuk mengikuti kelas anti korupsi yang menjadi sumber data.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: (1) observasi; (2) wawancara semistruktur; (3) dokumentasi. Pembahasan tentang ragam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan ketika peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas di lokasi

penelitian. Observasi dapat dilakukan mulai dari non-partisipan hingga partisipasi utuh.<sup>102</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif moderat. Sugiyono menyatakan bahwa observasi partisipatif moderat adalah dalam kegiatan observasi terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.<sup>103</sup> Oleh karena itu, peneliti secara langsung berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sekolah yang berhubungan dengan budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi.

Adapun keunggulan teknik observasi adalah observasi membawa peneliti ke dalam konteks kini dan di sini (*now and here*.) Dalam konteks semacam ini, peneliti dapat (1) memahami motif, keyakinan, kerisauan, perilaku serta kebiasaan subjek yang diamati; (2) melihat dan menghayati sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang utuh; (3) memperoleh data dari tangan pertama.<sup>104</sup>

Dalam proses observasi, hal-hal yang diamati antara lain:

- a. Keadaan fisik, meliputi lingkungan sekolah serta sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan anti korupsi.

---

<sup>102</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, 254.

<sup>103</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2018), 311.

<sup>104</sup> Rifa 'Afuwah, *Strategi Pengembangan Budaya Agama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa (Studi Multi Kasus di MTs Surya Buana dan SMP Negeri 13 Malang)*, 60.

- b. Proses kegiatan belajar baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- c. Peneliti akan memperhatikan, mencatat fenomena, dan mengamati secara langsung terhadap praktik dan aktifitas dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keterampilan, lingkungan sekolah, tradisi, iklim sekolah, dan lain-lain yang kaitannya dengan budaya sekolah yang anti korupsi.

## 2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan cara *face to face* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu).<sup>105</sup>

Burhan Bungin menyatakan wawancara adalah proses interaksi dengan informan guna memperoleh data atau informasi untuk kepentingan tertentu.<sup>106</sup> Jadi wawancara adalah teknik pengumpulan data yang utama.

Isi wawancara mengenai; (1) pengalaman informan, yaitu apa yang dikerjakan, (2) pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran atau pikirannya tentang sesuatu, (3) perasaan, (4) pengetahuan, fakta-fakta

---

<sup>105</sup> John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, 254.

<sup>106</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 157.

yang diketahui, (5) penginderaan, apa yang dilihat, didengar dan diraba, (6) latar belakang pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara semistruktur. Moleong menyatakan bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri pertanyaan yang akan diajukan.<sup>107</sup> Wawancara terstruktur dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sementara itu wawancara semistruktur sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>108</sup> Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Proses wawancara yang akan dilakukan berdasarkan item-item pernyataan yang telah tersusun dan terencana. Di samping itu, peneliti adakalanya melakukan wawancara tak terstruktur, yang mana wawancara guna mempertajam jawaban dan informasi yang telah

---

<sup>107</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 190.

<sup>108</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 318.

diterima dan itu tidak tercantum dalam pedoman wawancara sebagaimana wawancara terstruktur.

Selain itu, untuk mendukung wawancara tersebut agar lebih signifikan, maka peneliti akan menggunakan alat atau media yang dapat digunakan dalam wawancara seperti *smartphone* untuk merekam, buku catatan. Alat tersebut peneliti gunakan untuk menunjang kelancaran dan kevalidan data yang peneliti peroleh di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Sugiono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>109</sup> Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa patung, gambar, film dan lain-lain. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi adalah metode dengan berbagai macam dokumen, seperti berkas, dan arsip.

Menurut Burhan Bungin dokumen adalah sebagian besar data yang tersedia berupa surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan dan sebagainya. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen

---

<sup>109</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 326.

dalam arti luas termasuk monument, artefak, foto, *tape*, CD, *hardisk*, *flashdisk* dan sebagainya.<sup>110</sup>

Dalam hal ini peneliti menghimpun dokumen-dokumen antara lain profil sekolah, struktur organisasi, data siswa, data guru, sarana prasarana, denah sekolah, serta data-data lain yang mendukung. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen foto kegiatan penelitian yang peneliti lakukan di MI Darul Ulum Kota Batu.

Pada tahap ini peneliti harus mampu menelaah rekaman dan dokumen mengenai penciptaan suasana budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu, sehingga ditemukan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Moleong mengklasifikasikan tiga model analisis data penelitian kualitatif, yaitu; (1) metode perbandingan tetap (*constant comparative method*), seperti yang dikemukakan oleh Glaser & Straus, (2) metode analisis data menurut Spradley dan (3) metode analisis data menurut Miles & Huberman.<sup>111</sup>

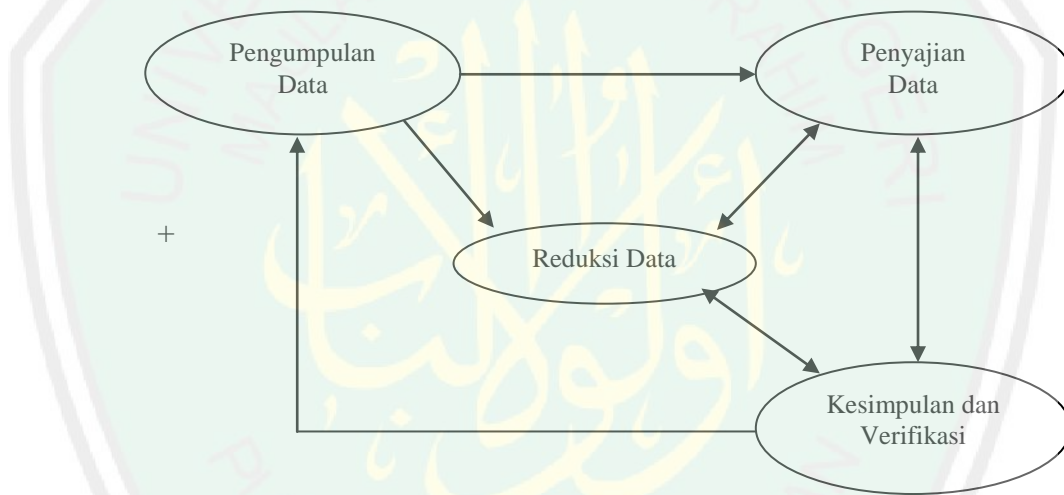
---

<sup>110</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 122.

<sup>111</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 190.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data menurut Miles & Huberman model interaktif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik analisis data model interaktif tersebut dapat dilihat pada bagan berikut;



**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Model Interaktif (Sumber: Matthew, 2014)**

Teknik analisis data model interaktif dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana langkah-langkah sebagai berikut;

#### 1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan sejak peneliti memasuki lokasi penelitian sampai semua data yang diperlukan terkumpul.

Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.<sup>112</sup> Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.

Artinya, reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Karena kegiatan reduksi data adalah proses mengidentifikasi data dan mengkode data. Maka dalam pengkodean data digunakan tiga kolom yang terdiri dari nomor, aspek pengkodean, dan kode. Seperti tabel dibawah ini;

---

<sup>112</sup> Matthew B. Miles & A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 16.

**Tabel 3.1 Pengkodean.**

No	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Teknik Pengumpulan data	
	a. Observasi	Obs
	b. Wawancara	Ww
	c. Dokumentasi	Dok
2.	Sumber Data	
	a. Kepala Sekolah	KS
	b. Guru	GR
	c. Siswa	Ssw
3	Fokus Penelitian	
	a. Perencanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi	F1
	b. Strategi pelaksanaan pendidikan anti korupsi.	F2
	c. Dampak positif budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi.	F3

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>113</sup>

### 4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.<sup>114</sup> Pada tahap ini dapat diketahui arti dari

<sup>113</sup> Matthew B. Miles & A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17.

<sup>114</sup> Matthew B. Miles & A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kesimpulan akhir diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Sugiyono menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>115</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, ada standar khusus yang harus dipenuhi. Setidaknya ada empat tipe standar atau kriteria utama untuk menjamin keterpercayaan hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan

---

<sup>115</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 343.

terdapat empat kriteria untuk menjaga keabsahan data yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*).<sup>116</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan dua teknik pengecekan keabsahan data, yaitu:

1. *Credibility* (Uji Kredibilitas/kepercayaan)

Terdapat beberapa teknik pemeriksaan dalam kriteria kredibilitas, yaitu; perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.<sup>117</sup>

Untuk menjamin kredibilitas data dalam penelitian ini, maka pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut.<sup>118</sup> Moleong membedakan Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>119</sup>

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

---

<sup>116</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 324.

<sup>117</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 327.

<sup>118</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

<sup>119</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, serta data hasil pengamatan dengan dokumen yang berkaitan. Peneliti melakukan pengecekan untuk menguji keabsahan data serta mengetahui hubungan antara berbagai hubungan antara berbagai data sehingga kesalahan analisis dapat dihindari.

Peneliti berusaha membandingkan hasil wawancara dari informan, yaitu; kepala sekolah, guru, siswa serta dokumen-dokumen terkait.

b. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan melibatkan banyak informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi hingga data mencapai titik jenuh. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid karena peneliti tidak hanya melibatkan dan menilai dari satu cara pandang saja, tetapi melalui beberapa cara pandang yang berbeda untuk menemukan satu titik temu. Misalnya, setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru, kemudian hasil wawancara tersebut dikonfirmasi.

2. *Dependability* (Dependibilitas)

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap proses penelitian. Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu diperlukan auditor terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang bertindak menjadi sebagai auditor peneliti adalah Dr. H. Agus Maimun, M.Pd dan Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd, selaku pembimbing tesis.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kota Batu yang meliputi, paparan data dan temuan penelitian.

#### **A. Gambaran Umum MI Darul Ulum Kota Batu**

##### **1. Latar Belakang Historis**

Lembaga Pendidikan Darul Ulum Kota Batu merupakan satuan pendidikan setingkat Sekolah Dasar yang didirikan atas prakarsa masyarakat Dusun Macari Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, yang bertujuan ikut berperan aktif mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa di Dusun Macari dan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan ini dirintis sejak tahun 1967 dengan nama Sekolah Dasar Islam (SDI) Riyadlus Sholihin. Selanjutnya, SDI Riyadhus Sholihin berubah nama menjadi SDI Darul Ulum dikarenakan saat itu ada pemikiran bahwa sekolah dasar ini menjadi binaan langsung dari Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Regulasi pemerintah terus berubah. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Swasta semacam madrasah diharuskan berbadan hukum, maka Pengurus SDI Darul Ulum bersepakat untuk bernaung di bawah Lembaga

Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP. Ma'arif NU) dan berganti nama dengan Madrasah Ibtidai'yah (MI) Darul Ulum. Secara geografis, MI Darul Ulum terletak di tengah perkotaan. Jarak Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Batu dengan madrasah berkisar 1 kilometer arah barat. Dan dengan jarak yang sama ke arah timur dari madrasah terletak Alun-Alun Kota Batu.<sup>120</sup>

Dusun Macari memiliki sejarah panjang di antara dusun-dusun yang ada di wilayah Batu. Hal ini ditandai bahwa sejak lama didirikan Masjid pertama di kota Batu pada kurun waktu 1800-1825 M. Oleh karenanya, dusun ini juga disebut dengan nama dusun pesantren yang berarti tempat menimba ilmu kegamaan. Sebelum masa kemerdekaan, wilayah yang hanya terdiri atas dua rukun warga tersebut pernah berdiri gedung sekolah anak-anak Belanda (HBS (Hoobere Burger School) atau sekolah warga negara tinggi. Pada tahun 1860 didirikan sekolah menengah kelanjutan dari Europe Largere School (ELS) yang diperuntukkan bagi golongan Eropa, bangsawan golongan bumi putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa Barat, khususnya pada Belanda. Pada tahun 1947 gedung sekolah itu di bakar oleh masyarakat Macari Dua puluh tahun setelah pembakaran sekolah Belanda tersebut, rintisan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dimulai.

---

<sup>120</sup> Dokumentasi,(Batu, 28 Oktober 2019).

## 2. Profil Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum

### a. Data Sekolah

- 1) Nama Madrasah : MI. Darul Ulum
- 2) Alamat : Jl. Lahor No. 251 Pesanggrahan Batu
- 3) No. Telp./ Fax : (0341) 597429
- 4) Nama Yayasan/  
Penyelenggaraan Sekolah : MI. Darul Ulum
- 5) Alamat : Jl. Lahor No. 251 Pesanggrahan Batu
- 6) Status Sekolah : Swasta
- 7) Status Akreditasi : A
- 8) Tahun Berdiri : 1966
- 9) Tahun Beroperasi : 1966
- 10) Status Tanah : Milik Sendiri

### b. Kondisi Obektif

#### 1) Letak Sekolah

- a) Alamat : Jalan Lahor 251
- b) Desa : Pesanggrahan
- c) Kecamatan : Batu
- d) Kabupaten/Kota : Batu
- e) Provinsi : Jawa Timur

#### 2) Tanah

- a) Batas Tanah

- (1) Utara : Halaman Masjid
- (2) Selatan : Perkampungan penduduk
- (3) Barat : Gedung TK. RA. 02
- (4) Timur : Jalan Lahor (perkampunagn penduduk)

b) Lahan

- [1] Luas tanah : 680m<sup>2</sup>
- [2] Asal usul : Tanah Waqaf
- [3] Luas bangunan : 435 m<sup>2</sup>
- [4] Status : Hak milik

3) Gedung

- a) Pendirian tahun 1966 = 1 unit yang terdiri dari 6 kelas dan 1 kantor
- b) Jumlah ruangan:
  - [1] Ruang belajar : 9 ruang
  - [2] Ruang guru : 1 ruang
  - [3] Ruang kantor : 1 ruang

### 3. Visi, Misi, dan Tujuan

Setiap program kerja yang diagendakan tentulah berdasarkan pada satu tujuan yang hendak dicapai agar terdapat persamaan pandangan dan mempermudah dalam melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, MI Darul Ulum memiliki visi, misi dan tujuan, sebagai berikut;

a. Visi MI Darul Ulum Kota Batu

“Menjadi Madrasah Ibtida’yah Berkualitas dalam Menyiapkan Generasi Bangsa Indonesia yang Unggul dan Bermartabat, serta Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islam ala Ahlussunah Wal jama’ah An-Nahdliyah”.

b. Misi MI Darul Ulum Kota Batu

Mengacu pada visi madrasah di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan prestasi di bidang akademik dan non-akademik;
  - a) Meningkatkan minat baca dengan program *out door library* dan *class library*.
  - b) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memaksimalkan pemanfaatan bantuan pemerintah yang berupa alat peraga pendidikan dan mengupayakan sumber belajar langsung dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar, seperti mewujudkan *kawasan edukasi alam* sbagai sumber belajar tambahan pelajaran IPA, PLH dan mata pelajaran terkait, pengadaan teropong bintang sebagai sumber pembelajaran.

- c) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
  - d) Meningkatkan sarana penunjang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
  - e) Meningkatkan efektifitas dan sinkronisasi pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler dengan kurikulum.
- 2) Peningkatan semangat berkompetisi dalam meraih prestasi
- a) Memberikan penghargaan kepada semua warga sekolah yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.
  - b) Mengadakan pembinaan khusus kepada siswa berprestasi.
  - c) Menyelenggarakan program pembiasaan seperti pembiasaan hidup bersih, melaksanakan sholat dhuha, menghafal surat-surat pendek dalam Alquran.
- 3) Pemahaman, penghayatan dan pengamalan konsep Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- a) Menumbuhkan kesadaran tentang konsep Islam dalam kehidupan sebagai sumber kearifan dan berperilaku.
  - b) Membiasakan seluruh warga madrasah untuk berperilaku yang berdasarkan konsep Islam dalam realita kehidupan.
  - c) Penekanan pada kegiatan ibadah praktek di sekolah untuk diamalkan ketika di rumah.

d) *Parenting Education* yang dikemas dalam kegiatan rutin pengajian Sabtu Pahing untuk menjalin sinergitas orang tua wali murid dan warga madrasah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Tujuan MI Darul Ulum Kota Batu

Sejalan dengan Tujuan Pendidikan Dasar dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yaitu meletakkan dasar kecerdasan , pengetahuan , kepribadian, akhlak mulia , serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh MI. Darul Ulum adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan benar.
- 2) Membentuk generasi muslim yang mempunyai aspek fikir dan dzikir berlandaskan aqidah dan syariat Islam ala Ahlusunnah waljamaah.
- 3) Semua masyarakat sekolah menciptakan suasana yang ramah dan kondusif
- 4) Seluruh kelas menerapkan pembelajaran PAKEM.
- 5) Di setiap kelas tersedia pohon ilmu dan sarapan ilmu.
- 6) Tingkat kekerasan di sekolah menurun.
- 7) Di setiap kelas tersedia fasilitas pembelajaran yang memadai.

- 8) Melaksanakan pengembangan diri siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstra kurikuler sesuai karakteristik daerah pertanian dan wisata

#### 4. Kurikulum

Reformasi yang terjadi di Indonesia melahirkan perubahan-perubahan regulasi di berbagai bidang. Tak terkecuali bidang pendidikan. Peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah menjadikan perubahan paradigma berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pendidikan. Hal ini telah mendorong adanya perubahan dari berbagai aspek pendidikan termasuk kurikulum. Dalam kaitan ini kurikulum sekolah dasar pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru sehingga mengalami perubahan-perubahan kebijakan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengubah wajah dan perjalanan dunia pendidikan di Nusantara. Sebut saja Pasal 36 Ayat 2 ditegaskan, bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Atas dasar pemikiran itu maka dikembangkanlah apa yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian guru diharapkan menjadi lebih mengenal dengan baik dan lebih merasa memiliki

kurikulum tersebut. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar kurikulum selalu sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diharapkan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. KTSP dengan demikian merupakan acuan bagi perwujudan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi dengan didukung tenaga pendidik yang mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) bagi peserta didik.

Melihat sejarah panjang geografis dan sosial lingkungan MI. Darul Ulum, Kecamatan Batu Kota Batu, maka dikembangkan KTSP sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar yang memperhatikan kebutuhan lokal dan Nasional. Kurikulum ini disusun oleh satu tim penyusun yang terdiri atas unsur sekolah dan Pengurus Yayasan/Komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, serta dengan bimbingan nara sumber dari Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Batu dan Tim Bimbingan Teknis Pengembangan KTSP Pendidikan Dasar Kota Batu.

## 5. Kondisi Madrasah

### a. Sarana prasarana

**Tabel 4.1 Daftar Sarana Prasarana MI Darul Ulum.**

No	Jenis Ruang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak		
				Ringan	Sedang	Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ruang Kantor	1	-	-	-	1
2	Ruang Guru	1	-	-	-	1
3	Ruang Belajar	9	5	2	-	
4	Masjid	1	1	-	-	-
5	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-	-
6	Ruang UKS	-	-	-	-	-
7	Ruang Multimedia	-	-	-	-	-
8	Ruang Lab. IPA	-	-	-	-	-
9	Gudang	-	-	-	-	-
10	WC/Kamar Mandi	2	-	-	-	-
11	Komputer Sekolah	2	1	-	-	-

### b. Kondisi siswa

Jumlah keseluruhan siswa-siswi MI Darul Ulum setiap tahunnya mengalami dinamisasi. Pada tahun 2018-2019 saat ini berjumlah 206 siswa/i. Dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 9 kelas, adapun rinciannya yaitu terdiri dari kelas I sebanyak 1 kelas, kelas II sebanyak 1 kelas, kelas III sebanyak 1 kelas, kelas IV sebanyak 2 kelas, kelas V sebanyak 2 kelas dan kelas VI sebanyak 2 kelas. Siswa MI Darul Ulum di dominasi oleh masyarakat setempat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Jumlah siswa Empat Tahun Terakhir.**

No	Tahun Ajaran	Jumlah Siswa
1	2015/2016	209
2	2016/2017	213
3	2017/2018	210
4	2018/2019	206

## c. Kondisi Guru

Jumlah keseluruhan tenaga guru dan karyawan MI Darul Ulum sebanyak 18 orang yang terdiri dari Guru Diperbantukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS DPK) sebanyak 2 orang, Guru Tetap Yayasan (GTY) sebanyak 6 orang, guru Honor Daerah atau kontrak (KTR) sebanyak 2 orang, Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 5 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1 orang dan Pegawai Tetap (PT) sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Kondisi Guru.**

No	Nama	Ijazah Terakhir	Jabatan	Status
1	Ulul Azmi, S. Ag	S 1 Tarbiyah Matematika Tahun 1994	Kepala Madrasah	GTY
2	Slamet Riyadi, S. Pd. I	S 1 PAI Tahun 2002	Guru Kelas 4	PNS
3	Siti Aminah, S. Pd.I	S 1 PAI Tahun 2006	Guru Kelas 6	PNS
4	Suliono, S.T	S 1 Teknik Pertanian Tahun 2001	Guru Kelas 5 Bag. Kurikulum	KTR
5	Mufidah, S. Ag	S 1 PAI Tahun 1996	Guru Kelas 6 Bag. Kesiswaan	KTR
6	Sholihul Hadi, S. Pd. I	S 1 PAI Tahun 2009	Guru Kelas 4 Bag. Sarpras	GTY

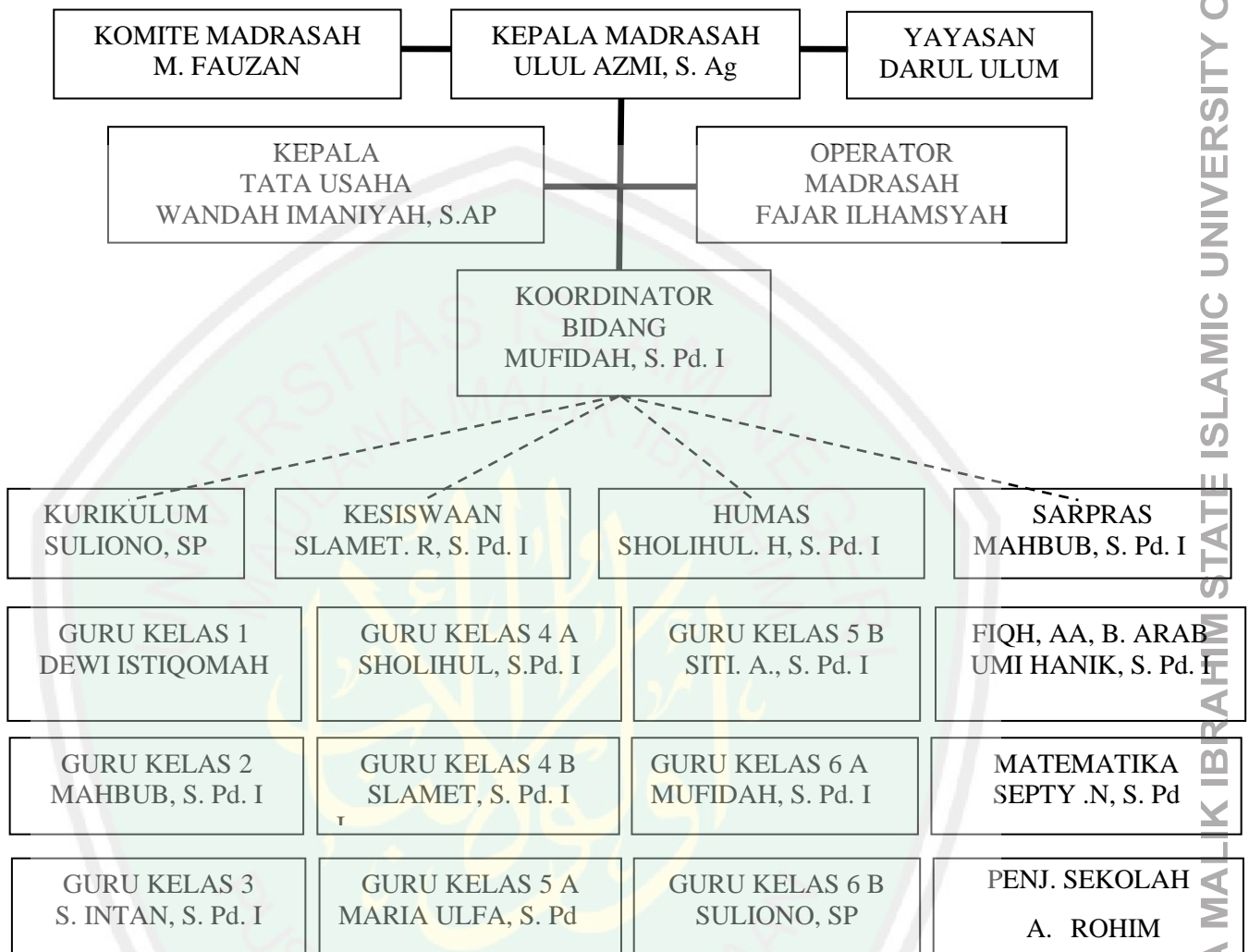
7	Umi Hanik, S. Pd	S 1 Pend. Bahasa Indonesia Tahun 2012	Guru Kelas 3 Bendahara	GTY
8	Maria Ulfa, S. Pd	S 1 Pend. Bahasa Indonesia Tahun 2010	Guru Kelas 4	GTY
9	Muh. Mahbub Muzakki, S. Pd. I	S 1 PAI Tahun 2010	Guru Kelas 2	GTY
10	Dewi Istiqomah	SMK Jurusan Akuntansi Tahun 2004	Guru Kelas 1	GTY
11	Deny Nuri Purnomo, S. Pd	S 1 Olahraga Tahun 2012	Guru PJOK	GTT
12	Wahidah Imaniyah, S.E	S 1 Adm. Negara Tahun 2018	Tata Usaha	PTT
13	Sayyidatuna Intan Mahmudah, S. Pd. I	S 1 PGMI Tahun 2019	B. Arab, Fiqh, Quran Hadits	GTT
14	Sugianto	SMA Jurusan IPS Tahun 2005	Pembina Ekstra Kurikuler Drum Band	GTT
15	Asri Ramadhani, S. Pd	S 1 Pend. Luar Sekolah Tahun 2017	Pembina Ekstra Kurikuler Pramuka	GTT
16	Fajar Ilhamsyah	SMA Jurusan IPA Tahun 1994	Operator	PTT
17	Sukmasari Septy Mastity, S. Pd	S 1 Pend. Matematika Tahun 2015	Guru Matematika	GTT
18	Abdurrochim	MAN Tahun 1989	Penjaga Sekolah	PT

## 6. Struktur Organisasi

Berikut penjelasan dari struktur organisasi di MI Darul Ulum Kota Batu.

- a. Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab serta pengambil keputusan tentang segala sesuatu terkait dengan eksistensi madrasah.
- b. Komite Madrasah adalah suatu organisasi yang dibentuk di MI Darul Ulum sebagai badan yang bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah maupun lembaga yang lain, sebagai mitra yang harus saling bekerjasama antara pihak madrasah dengan komite dengan konsep manajemen berbasis madrasah.
- c. Kepala Tata Usaha adalah staf pimpinan yang melaksanakan kegiatan administrasi madrasah secara menyeluruh.
- d. Operator Madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendataan pendidikan yang saat ini terintegrasi dalam Data Emis, SIMPATIKA dan lain sebagainya. Seorang operator Madrasah tidak bisa dipandang sebelah mata akan tugas dan tanggung jawabnya. Operator Madrasah harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara baik, sehingga amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Koordinator Bidang adalah staf pimpinan yang membawahi beberapa bidang, yakni kurikulum, kesiswaan, sarpras dan humas.
- f. Waka Urusan Kurikulum adalah staf pimpinan yang bertugas untuk mengurus tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan segala yang berkaitan dengan implementasi kurikulum.

- g. Waka Urusan Kesiswaan adalah staf pimpinan yang bertugas untuk mengurus bidang kesiswaan.
- h. Waka Urusan Humas adalah staf pimpinan yang bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat serta teknologi informasi promosi madrasah.
- i. Waka Urusan Sarpras adalah staf yang bertugas untuk mengkoordinir tentang kebutuhan sarana prasarana serta menginventarisir sarana prasarana yang telah ada.
- j. Koordinator BK adalah anggota staf pimpinan yang bertugas mengkoordinir kegiatan bimbingan konseling di madrasah.
- k. Guru/wali Kelas adalah guru yang ditunjuk menjadi wali pada kelas tertentu, bertanggung jawab untuk pengelolaan kelas pada kelas yang bersangkutan.
- l. Guru Bidang Studi adalah guru yang bertanggung jawab atas bidang studi tertentu sesuai dengan spesialisasinya.
- m. Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler adalah guru yang bertanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler di madrasah.
- n. Penjaga Sekolah adalah orang yang diberi amanah untuk menjaga kondusifitas sekolah baik ketika proses pembelajaran berlangsung maupun ketika proses pembelajaran telah selesai.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi MI Darul Ulum Kota Batu  
Tahun Ajaran 2019/2020 M (Sumber: Dokumentasi Jumlah Guru Tahun Ajaran 2018-  
2019)**

## B. Paparan Data Penelitian

### 1. Perencanaan Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan mengenai penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum, melalui wawancara dengan beberapa informan yang dianggap kompeten dan representatif dalam memaparkan tentang konsep budaya sekolah yang mencerminkan pendidikan anti korupsi, maka penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, pihak eksternal yang terlibat dalam *design* pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum, yakni Malang Corruption Watch (MCW) dan Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU) serta Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama (IPPNU) Kota Batu.

Sebelum adanya kerjasama antara MI Darul Ulum, *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU dalam mengaktualisasikan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum, sudah ada budaya sekolah yang dibangun di lingkungan sekolah seperti budaya disiplin waktu dan budaya mandiri. Budaya disiplin waktu meliputi beberapa kegiatan, yakni datang tepat waktu, melaksanakan tahlilan dan sholat dhuha di masjid sebelum kelas efektif di mulai yang di ikuti oleh seluruh siswa dan guru. Kelas efektif di mulai pada pukul 07.15 Wib. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ulul Azmi;

“Budaya sekolah yang kita bangun sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sederhana, seperti budaya disiplin waktu dan mandiri mas. Kita biasakan anak-anak dan guru datang jam 06.30 wib. Kemudian sekitar 20 menit kita tahlilan dan sholat dhuha di masjid Al-Mukhlisin yang di pimpin oleh guru, pak Slamet Riyadi beliau *Ustadz* yang kebetulan menjadi guru disini. Kemudian jam 07.15 wib kelas efektif kita mulai. Bagi anak yang telat, konsekuensinya mereka kita beri hukuman menghafal surat-surat pendek dan paling lambat minggu depannya harus menyeter ke guru. Kemudian kegiatan yang mandiri, ketika kami (guru) tiba disekolah pagi hari, kami melihat anak-anak sudah membersihkan kaca sekolah, menyapu halaman sekolah, untuk piket kelas tetap ada sesuai dengan jadwal mereka. Untuk kebiasaan mandiri itu memang saya yang mengawali dengan cara menyapu halaman sekolah, saya bawa sendiri sapu. Hari ini kita bahkan kekurangan sapu karena setiap anak menggunakannya. Kemudian kebiasaan mandiri dalam konteks belajar, anak-anak malu untuk mencontek. Mereka lebih bangga dengan hasil kerja sendiri walaupun nilainya tidak begitu memuaskan”.<sup>121</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa budaya sekolah yang sudah diimplementasikan di MI Darul Ulum setidaknya ada dua, yakni budaya disiplin waktu dan membiasakan anak-anak untuk mandiri, baik mandiri yang bersifat membersihkan lingkungan sekolah dan mandiri dalam konteks belajar. Untuk budaya disiplin waktu menjadi kewajiban bersama antara warga sekolah, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Maria Ulfa selaku wali kelas V A;

“Kita, pukul setengah tujuh sudah datang, kemudian langsung tahlilan dan sholat dhuha. Untuk tahlilan dan dhuha kita laksanakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jum’at. Hari Senin kita upacara bendera dan hari Sabtu kita melaksanakan senam pagi. Kegiatan tersebut

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

dilakukan oleh guru dan siswa. Untuk siswa yang telat akan dihukum, tentunya dengan hukuman yang mendidik”.<sup>122</sup>

Senada dengan pernyataan Nanda Kartika Aprilia Sari salah satu siswi kelas V A menyatakan bahwa:

“Saya datang ke sekolah jam 06.15 wib kak, saya sengaja pergi jam segitu karena saya ke sekolah berjalan kaki. Waktu tempuh dari rumah ke sekolah sekitar 6-7 menit. Saya pernah telat sekali, dan disuruh menghafal surat pendek”.<sup>123</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa siswa dan guru memiliki kewajiban yang sama, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, pukul 06.30 wib sudah berada di sekolah. Bagi siswa yang telat akan mendapatkan hukuman menghafal surat-surat pendek.

Budaya disiplin waktu menjadi perhatian dari pihak sekolah, karena untuk menumbuhkan kesadaran tepat waktu sampai sekarang belum dapat dikatakan memuaskan. Hal ini salah satu faktornya dikarenakan sebelum masa kepemimpinan bapak Ulul Azmi, kebiasaan sekolah sebelumnya masuk pukul 07.15 wib dan kelas efektif di mulai pukul 07.30 wib. Dalam hal ini bapak Ulul Azmi menyatakan sebagai berikut;

“Saya baru memimpin selama tiga (3) tahun mas, sebelum saya memimpin, kebiasaan sekolah disini memulai jam pelajarannya pukul 07.30 wib. Setelah saya memimpin, saya perlahan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran pukul 07.15 wib. Memang kesadaran akan disiplin waktu ini membutuhkan pembiasaan yang lama”.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa selaku wali kelas 5 A pada tanggal 02 November 2019.

<sup>123</sup> Wawancara dengan Nanda Kartika Aprilia Sari siswi kelas 5 A pada tanggal 04 November 2019.

<sup>124</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

Selain budaya disiplin tepat waktu, budaya lain yang dibangun di MI Darul Ulum adalah budaya mandiri. Budaya mandiri ini terbagi menjadi dua, yaitu mandiri dalam menjaga dan membersihkan lingkungan sekolah serta mandiri dalam hal belajar. Mandiri dalam konteks menjaga lingkungan sekolah adalah membersihkan halaman sekolah dengan cara menyapu, membersihkan kaca kelas dan kaca ruangan guru, merapikan buku-buku di perpustakaan. Semua kegiatan itu dilakukan sebelum tahlilan dan dhuha dilaksanakan di masjid. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Ulul Azmi:

“Ketika saya tiba di sekolah, siswa-siswi sudah menyapu halaman sekolah, ada yang membersihkan kaca kelas, kaca ruangan guru, kaca ruangan saya. Ada yang bagian merapikan buku-buku di perpustakaan. Pokoknya ketika saya tiba di sekolah siswa-siswi sudah mengambil perannya masing-masing tanpa mengganggu yang piket kelas. Untuk yang piket kelas tetap melaksanakan piket sesuai dengan jadwal mereka. Sebenarnya dulu saya yang mengawali untuk membersihkan halaman sekolah, saya bawa sapu dari rumah. Sekarang, *Alhamdulillah* kalau mau menyapu halaman sekolah kami kekurangan sapu setiap paginya”.<sup>125</sup>

Dari pernyataan pak Ulul Azmi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa budaya mandiri yang dibangun pada mulanya diawali oleh pak Ulul Azmi sendiri, beliau awal-awal memimpin dulu sering menyapu halaman sekolah dan beliau membawa sapu sendiri dari rumah. Hal itu dilakukan bermaksud memberi teladan kepada guru dan siswa. Sekarang teladan itu sudah menjadi kebiasaan di MI Darul Ulum.

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

Budaya mandiri selanjutnya adalah budaya mandiri dalam konteks belajar. Kebiasaan untuk mandiri dalam melaksanakan tugas belajar sudah baik. Siswa-siswi dalam belajar ditekankan untuk mandiri, tidak boleh mencontek. Bagi yang ketahuan mencontek maka akan mendapatkan sanksi yaitu diberikan soal lain dan siswa tersebut mengerjakannya diluar kelas. Jadi memang pihak sekolah menyediakan beberapa bangku diluar kelas. Kegunaannya sebagai tempat pengasingan sejenak bagi siswa-siswi yang ketahuan mencontek. Cara guru mengetahui siswanya mencontek yaitu dengan memberikan semacam *stressing* kepada siswa-siswi agar mandiri dan jujur terhadap diri sendiri. Misalnya, ketika anak merasa dirugikan oleh siswa yang lain akibat pekerjaannya di contek maka siswa yang merasa dirugikan boleh melapor ke guru. Hal ini sesuai pernyataan ibu Maria Ulfa selaku koordinator BK sekaligus sebagai Wali Kelas 5 A:

“Anak-anak itu mas paling tidak suka pekerjaannya di contek. Mereka akan merasa risih. Dengan sendirinya mereka akan melapor ke guru yang sedang mengajar di kelasnya. Mereka tidak takut untuk melapor karena kita memang tekankan untuk berani mandiri dan jujur pada diri sendiri, selain itu komunikasi kita sama anak-anak sangat terbuka, sampai-sampai ada anak yang cerita ke saya bahwa dia sudah akil baligh yang ditandai dengan mimpi basah. Keterbukaan komunikasi inilah yang mendorong kita mudah mengetahui anak yang mencontek. Hukuman bagi yang mencontek kita asingkan di bangku luar kelas, kita beri soal yang lain”.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa selaku Koordinator BK sekaligus sebagai wali kelas 5 A pada tanggal 02 November 2019.

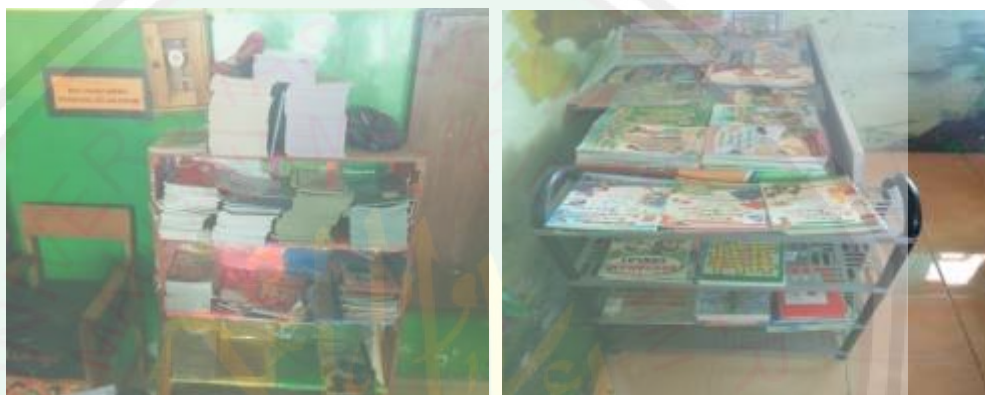
Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *stressing* untuk mandiri dan jujur pada diri sendiri cukup ampuh diterapkan supaya siswa-siswi tidak mencontek. Siswa-siswi tidak takut melaporkan kepada guru kalau dia merasa dirugikan karena hasil pekerjaannya di contek oleh siswa yang lain, hal ini di dorong oleh komunikasi yang terbangun antara siswa dan guru sangat terbuka.

Hasil temuan di lapangan, setelah peneliti mengamati secara seksama dan mendalam ternyata ada budaya tanggung jawab yang telah terimplementasikan di MI Darul Ulum. Adapun media dalam mengembangkan budaya tanggung jawab ini yaitu perpustakaan. Budaya tanggung jawab melalui perpustakaan ini lebih ditekankan kepada pengurus perpustakaan, bagaimana mereka mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Menjadi pengurus perpustakaan berarti melatih mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Perpustakaan yang ada di MI Darul Ulum terdiri dari tiga macam, yakni; perpustakaan di dalam setiap kelas, satu perpustakaan yang berada dalam satu ruangan atau perpustakaan induk dan perpustakaan yang bersifat *out door* yang berada di depan setiap kelas. Perpustakaan di dalam setiap kelas dikelola oleh guru kelas masing-masing sebagai penanggung jawab, sedangkan perpustakaan induk dan perpustakaan *out door* di depan setiap kelas dikelola oleh siswa. Jumlah seluruh pengurus perpustakaan *out door* sekita 15 orang siwa-siswi.

Ibu Mufidah selaku Koordinator Bidang memaparkan secara umum tentang perpustakaan, sebagai berikut:

“Perpustakaan kita ada tiga bagian, dua berada di luar dan ada perpustakaan di setiap kelas. Untuk perpustakaan di dalam kelas, guru kelas menjadi penanggung jawabnya sedangkan perpustakaan yang di luar dikelola oleh siswa-siswi”.<sup>127</sup>



**Gambar 4.2 Perpustakaan di dalam kelas (Sumber: Dokumentasi, 2019)**

Perpustakaan di luar kelas ada sebanyak enam meja, posisinya berada tepat di depan setiap kelas. Siswa-siswi yang menjadi penanggung jawab perpustakaan *out door* dipilih oleh Kepala Perpustakaan, dan setiap satu tahun sekali pengurus perpustakaan *out door* ini berubah. Setiap satu meja perpustakaan dikelola oleh dua orang siswa. Tugas setiap bulan dari siswa-siswi pengurus perpustakaan yang berjumlah enam meja di depan kelas adalah melaporkan jumlah buku yang dipinjam dan yang dikembalikan, sedangkan untuk tugas setiap harinya melaporkan denda kepada Kepala Perpustakaan. Selanjutnya setiap satu bulan sekali, hasil

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ibu Mufidah selaku Koordinator Bidang pada tanggal 04 Desember 2019.

rekap selama selama bulan di catat di perpustakaan induk yang dikelola juga oleh siswa.



**Gambar 4.3 Perpustakaan *out door* (Sumber: Dokumentasi, 2019)**

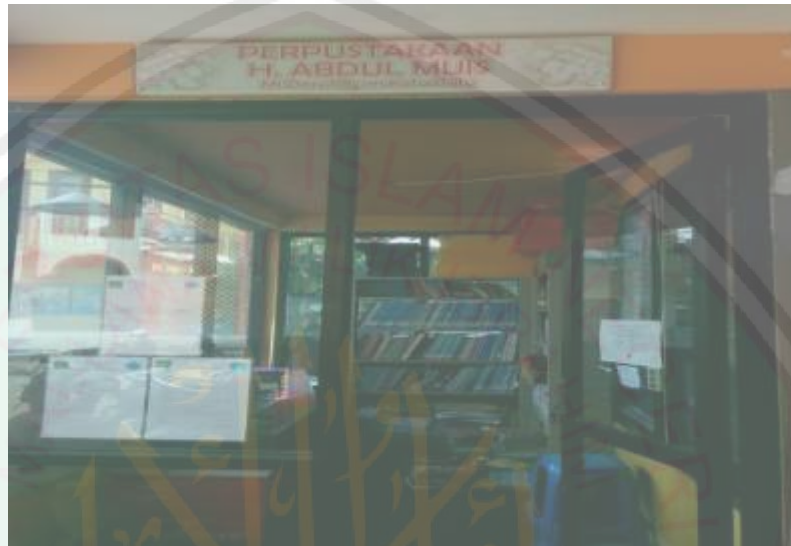
Hal ini sesuai pernyataan Kepala Perpustakaan Ibu Siti Aminah, sebagai berikut:

“Ada enam meja untuk perpustakaan *out door* dan setiap satu mejanya dikelola oleh dua orang siswa. Jadi setiap hari anak-anak pengurus perpustakaan enam meja itu melaporkan ke saya berapa denda yang terlambat mengembalikan buku maupun yang menghilangkan buku. Bagi yang telat kita berlakukan bayar denda Rp 1000 per harinya. Bagi yang menghilangkan buku, kita kasih hukuman membeli buku yang sama, kalau harganya mahal maka kita suruh bayar Rp 10.000 saja mas. Untuk laporan perbulannya, pengurus melaporkan berapa jumlah buku yang dipinjam dan yang dikembalikan. Setelah satu bulan penuh, hasilnya akan kita laporkan ke pengurus perpustakaan induk.”<sup>128</sup>

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa siswa-siswi mengelola perpustakaan secara mandiri. Kepala perpustakaan hanya memantau jalannya perkembangan perpustakaan. Hukuman bagi yang telat

<sup>128</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku Kepala Perpustakaan Bidang pada tanggal 04 Desember 2019.

mengembalikan buku akan di denda seribu rupiah per harinya, dan bagi yang menghilangkan akan mengganti dengan buku yang sama dan kalaupun harganya mahal maka disuruh membayar Rp. 10.000.



**Gambar 4.4 Perpustakaan induk (Sumber: Dokumentasi, 2019)**

Untuk memudahkan pengurus perpustakaan mengontrol laju peminjaman dan pengembalian buku, setiap satu orang siswa mempunyai kartu kontrol masing-masing. Untuk mengetahui siapa yang telat dan tidak, sistem peminjaman dan pengembaliannya diatur oleh Kepala Perpustakaan. Ketika ada siswa yang akan meminjam buku, maka ia akan menyerahkan lembar kontrol kepada pengurus perpustakaan. Pengurus perpustakaan akan mencatat tanggal peminjaman, dan selama peminjaman itu lembar kontrol di pegang oleh pengurus. Ketika pengembalian buku, siswa yang meminjam akan menemui pengurus, lalu pengurus perpustakaan akan mengisi tanggal

pengembalian yang telah tersedia di lembar kontrol. Bagi yang telat akan mudah terdeteksi.

Penghargaan bagi yang sering meminjam buku akan diberikan alat tulis per tiga bulan sekali, dan yang menarik adalah setiap akhir tahun pengurus perpustakaan akan diajak jalan-jalan sebagai penghargaan karena telah mengurus perpustakaan selama satu tahun, adapun uang untuk jalan-jalan tersebut berasal dari uang denda yang telah terkumpul. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Aminah:

“Memang setiap anak kita beri lembar kontrol sendiri-sendiri. Biar kita mudah mengontrolnya. Setiap tiga bulan sekali kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang paling banyak meminjam buku, kita beri alat tulis. Bagi anak-anak pengurus perpustakaan, nanti akhir tahun kita ajak jalan-jalan sebagai apresiasi karena telah mengurus perpustakaan, ya uang jalan-jalan itu kita dapat dari hasil denda.”<sup>129</sup>

Senada dengan pernyataan diatas, Tri Aisyah Rahma pengurus perpustakaan menyatakan:

“Setiap kita ada kartu perpustakaan masing-masing kak. Kita juga diberikan hadiah oleh Kepala Perpustakaan setiap tiga bulan sekali bagi yang rajin meminjam buku, hadiahnya alat tulis saja. Biasanya diumumkan pada hari Senin, selesai upacara bendera”.<sup>130</sup>

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa siswa-siswi diberikan lembar kontrol untuk mempermudah pengurus perpustakaan. Setiap tiga

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku Kepala Perpustakaan Bidang pada tanggal 04 Desember 2019.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Tri Aisyah Rahma selaku pengurus Perpustakaan MI Darul Ulum pada tanggal 04 Desember 2019.

bulan sekali, kepala perpustakaan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi yang rajin meminjam buku, hal ini dapat dilihat dari lembar kontrol tersebut. Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus perpustakaan, pihak madrasah melalui Kepala Perpustakaan melakukan jalan-jalan nanti di akhir tahun.

NO	JUDUL BUKU	TANGGAL PINJAM	TANGGAL KEMBALI
1	Pada...	21	24
2	...	21	24
3	...	21	24
4	...	21	24
5	...	21	24
6	...	21	24
7	...	21	24
8	...	21	24
9	...	21	24
10	...	21	24
11	...	21	24
12	...	21	24
13	...	21	24
14	...	21	24
15	...	21	24
16	...	21	24
17	...	21	24
18	...	21	24
19	...	21	24
20	...	21	24

**Gambar 4.5 Lembar kontrol perpustakaan (Sumber: Dokumentasi, 2019)**

Perpustakaan *out door* ini berjalan sudah satu tahun, *launching* nya tanggal 24 November 2018, dan mulai beroperasi pada bulan Januari 2019. Lamanya peminjaman buku adalah tiga hari, yakni waktu peminjaman adalah hari Senin dan Kamis waktu jam istirahat sekolah, sedangkan waktu pengembalian adalah hari Rabu dan Sabtu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Aminah:

“Perpustakaan yang *out out door* ini memang dibuat pada bulan November Tahun 2018, namun mulai beroperasinya bulan Januari 2019 mas. Lama peminjaman selama tiga hari. Waktu peminjaman

hari Senin dan Kamis dan pengembaliannya hari Rabu dan Sabtu”.<sup>131</sup>

Selama satu tahun perjalanan perpustakaan MI Darul Ulum tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah tidak bisa mendeteksi buku yang hilang. Buku yang hilang disini bukan disebabkan oleh siswa-siswi melainkan karena posisi perpustakaan *out door* itu berada di luar kelas, kalau ada buku yang hilang maka tidak dapat di deteksi sama sekali karena bisa jadi ada pihak luar yang mengambil. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Aminah:

“Setiap bulan kita melakukan rekapitulasi jumlah buku yang ada di perpustakaan dengan daftar jumlah buku yang ada di daftar buku keseluruhan. Kadang kita kehilangan buku, kita cek siapa yang pinjam, ternyata tidak ada yang pinjam pada saat kita cek, walaupun ada yang pinjam buku yang sedang kita cek biasanya sudah dikembalikan. Nah, ini salah satu kendala kita mas, karena sekolah ini tidak ada lagi pagar secara menyeluruh dan bersentuhan dengan perkampungan warga. Ya akhirnya kita biarkan saja”.<sup>132</sup>

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada kendala yang lebih bersifat ekstern, yaitu karena posisi sekolah yang tidak berpagar secara menyeluruh memungkinkan pihak luar melakukan pencurian buku di perpustakaan *out door*.

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku Kepala Perpustakaan Bidang pada tanggal 04 Desember 2019.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku Kepala Perpustakaan Bidang pada tanggal 04 Desember 2019.

Budaya sekolah yang dikembangkan diatas mengandung nilai-nilai anti korupsi. Agar menjadi budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi tentu saja tidak lepas dari seluruh peran warga sekolah, tanpa adanya kerjasama maka budaya sekolah yang mengandung nilai-nilai anti korupsi yang dibangun tidak akan berjalan dengan baik. Pembiasaan perilaku akan menjadi karakter pada diri siswa apabila pembiasaan tersebut dilakukan sedini mungkin, lebih lanjut bagi sekolah akan menjadi budaya yang akan bertahan lama dan menjadi khas tersendiri dari sekolah tersebut.

Berbicara tentang perencanaan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh Malang Corruption Watch (MCW), MI Darul Ulum dan IPNU serta IPPNU, maka pihak MI Darul Ulum dalam hal ini Bapak Ulum Azmi menyatakan:

“Tentang pendidikan anti korupsi yang sudah lama dibahas oleh pemerintah pusat dan KPK, sebenarnya selama ini hanya sebatas wacana. Oleh karena itu kita ber-ikhtiar agar ide tentang pendidikan anti korupsi itu dapat kita implementasikan di lembaga pendidikan. Selaku kepala MI Darul Ulum, saya menyambut dengan baik gagasan pemerintah pusat dan KPK itu. Karena pendidikan anti korupsi ini salah satu upaya untuk membenahi negara kita yang rawan akan penyakit korupsi, kita kenalkan kepada anak-anak tentang sembilan nilai-nilai anti korupsi. Dan Alhamdulillah guru-guru juga mendukung penuh, siswa-siswinya antusias untuk mengikuti program kelas anti korupsi. Yang menarik adalah bahwa saat kita *launching* kelas anti korupsi tahun kemarin (08/12/2018) kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan atensi dari pemerintah Kota Batu”.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pengenalan nilai-nilai anti korupsi harus dieksekusi bukan hanya di gagas kemudian berhenti ketika mendapatkan kritik disana-sini. Karena tujuannya baik, jadi apapun bentuk ikhtiarnya lebih baik daripada sekedar keagungan ide tanpa pelaksanaan.

Hal ini juga didukung oleh peran pihak eksternal, Malang Corruption Watch (MCW) yang concern dalam bidangnya dan menjadi mitra utama bahkan lebih dari itu, peran Malang Corruption Watch (MCW) justru penggagas pertama pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu. Sesuai pernyataan Bapak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum:

“Pada awalnya pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan di MI Darul Ulum ini digagas oleh teman-teman *Malang Corruption Watch* (MCW), kita (MI Darul Ulum) selaku objek dari ide tersebut menyambut baik. Akan tetapi karena teman-teman *Malang Corruption Watch* (MCW) kurang paham tentang keilmuan pendidikan, maka pihak MI Darul Ulum membantu merumuskan modelnya, merumuskan bagaimana modulnya, merumuskan bagaimana metode penyampaian materinya. Kemudian untuk mempermudah teman-teman *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam merumuskan *modelnya*, pihak MI Darul Ulum juga mendayagunakan teman-teman IPNU dan IPPNU Kota Batu, hal ini karena IPNU dan IPPNU cukup mempunyai *background* keilmuan pendidikan untuk membantu *Malang Corruption Watch* (MCW) merumuskan model pendidikan anti korupsi tersebut”.<sup>134</sup>

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MI Darul Ulum beranjak dari ide pihak

<sup>134</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

eksternal, dalam hal ini Malang Corruption Watch (MCW) yang kemudian dibantu oleh pengurus IPNU dan IPPNU Kota Batu. MI Darul Ulum dalam hal diatas sangat terbuka terhadap ide-ide yang konstruktif. Dapat dilihat bahwa MI Darul Ulum menjadi objek, fasilitator sekaligus mediator agar pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan.

Selaku pihak yang concern pada bidang korupsi, Malang Corruption Watch (MCW) terus berikhtiar untuk mengedukasi masyarakat tentang korupsi. Mulai dari pemahaman tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi, nilai-nilai anti korupsi, bahaya korupsi sampai pada hukuman akibat melakukan korupsi. Salah satu ikhtiar itu melalui dunia pendidikan. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan di tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Menurut pihak Malang Corruption Watch (MCW) mengapa pendidikan anti korupsi dilaksanakan di MI Darul Ulum karena anak seusia sekolah dasar akan mudah meniru, mengingat dan merekam perilaku dari orang lain. Jadi harus diperkenalkan tentang korupsi, nilai-nilai anti korupsi, bahaya melakukan korupsi, hukuman melakukan korupsi, bentuk-bentuk korupsi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bayu Agung Prasetya, selaku divisi Pendidikan Malang Corruption Watch (MCW):

“Ide melaksanakan pendidikan anti korupsi pada lembaga pendidikan sebenarnya merupakan kewajiban kita yang memahami betapa bahayanya efek yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Efek yang ditimbulkan bersifat luas dan menyengsarakan rakyat kecil khususnya. Negara kita dirampok oleh sekelompok orang baik itu individu maupun kaum *oligarki*. Kita merasa terpanggil untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan cara mengedukasi masyarakat

dengan cara apapun tentang apa itu korupsi dan kerugian yang ditimbulkannya. Kita sengaja melaksanakan pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah dasar diharapkan mereka kelak akan menjauhi perbuatan korupsi, paling tidak mereka mengetahui bahwa korupsi adalah kejahatan yang berbahaya. Kita memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi kepada mereka supaya mereka tau sedini mungkin”.<sup>135</sup>

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Selain adanya usaha dari pemerintah untuk meminimalisir perbuatan korupsi, masyarakat juga harus mempunyai peran dalam memerangi korupsi. Salah satu caranya dengan mengedukasi masyarakat tentang korupsi, dan dampak yang ditimbulkannya. Mengedukasi masyarakat melalui lembaga pendidikan dinilai tepat apalagi objeknya adalah anak-anak sekolah dasar, hal ini karena anak didik akan mengingat dan meniru apa saja yang didapatkannya dari orang lain.

Sekolah mempunyai peranan yang strategis dalam membentuk kepribadian anak didik yang anti koruptif. Usaha yang preventif ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, karena korupsi mencakup domain kognisi, perilaku dan kebiasaan. Sekolah sebagai basis pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan anti korupsi melalui kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijadikan kebiasaan siswa, artinya dalam skala besar kegiatan-kegiatan itu menjadi budaya sekolah.

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Bayu Agung Prasetya selaku divisi Pendidikan *Malang Corruption Watch* (MCW) pada tanggal 26 Oktober 2019.

Agar siswa-siswi memahami dan dapat mengimplementasikan perilaku yang anti koruptif, maka tentu saja pendidikan anti korupsi harus mempunyai model. Model kelas anti korupsi di MI Darul Ulum dirancang khusus untuk kelas IV dan V tahun ajaran 2017/2018. Kelas IV terdiri dari dua kelas, yakni kelas IV A dan kelas IV B. Kemudian kelas V, yang terdiri dari kelas V A dan kelas V B. Perlu untuk peneliti sampaikan bahwa data pada tabel dibawah ini adalah data siswa pada tahun ajaran 2017-2018, pada saat itu mereka masih duduk di kelas IV dan V, dan untuk sekarang mereka sudah berada di kelas V dan kelas VI. Jumlahnya tetap sama karena tidak ada yang berhenti ataupun yang tidak naik kelas. Jumlah seluruh anak kelas IV A dan B serta kelas V A dan B tahun ajaran 2017-2018 yakni berjumlah 88 siswa-siswi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Jumlah siswa Kelas IV dan kelas V Tahun ajaran 2017-2018.**

No	Kelas	Jumlah			Total Keseluruhan
		Laki-Laki	Perempuan	LP	
1	IV A	17	8	25	88 siswa-siswi.
2	IV B	15	10	25	
3	V A	11	9	20	
4	V B	10	9	18	

Dari total 88 siswa-siswi kelas IV A dan B serta V A dan B diatas kemudian dilakukan seleksi, yakni diambil cuma 31 siswa-siswi saja. Hal ini dilakukan agar kelas anti korupsi agar berjalan efektif dan efisien. Hal ini seperti pernyataan Leady Kholifatur Rohmah selaku Ketua Umum IPPNU Kota Batu:

“Kita melakukan seleksi untuk model kelas anti korupsi agar dapat dikontrol. Namanya juga kelas model mas. Untuk seleksinya kita melakukan pre test kepada seluruh siswa-siswi kelas IV dan kelas V. Kemudian kita dapat melihat pengetahuan mereka tentang korupsi dari hasil pre test tersebut. Lamanya seleksi satu hari saja, kemudian beberapa hari selanjutnya kita langsung melaksanakan program yang sudah kita rumuskan bersama. Memang untuk soal pre testnya yang membuat adalah pihak MCW”.<sup>136</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa proses seleksi dilakukan dengan cara melakukan pre test kepada seluruh siswa-siwi kelas IV dan V, hal ini agar kelas anti korupsi mudah di kontrol. Peran IPNU dan IPPNU sebenarnya lebih ke eksekutor, hal ini karena IPNU dan IPPNU awalnya tidak mempunyai gagasan tentang pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum. Awalnya konsep yang dibawa oleh IPNU dan IPPNU adalah mengabdikan di MI Darul Ulum. Akan tetapi karena kepala MI Darul Ulum meminta untuk membantu *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi, maka gagasan itu dilaksanakan bersama dengan *Malang Corruption Watch* (MCW). Hal ini dapat di lihat dari pernyataan Leady Kholifatur Rohmah:

“Memang ide kelas model anti korupsi ini dibawa oleh teman-teman *Malang Corruption Watch* (MCW), kita IPNU dan IPPNU mengambil peran sebagai eksekutor, misalnya kita menyiapkan pengurus IPNU dan IPPNU untuk menjalankan program-program dari kelas model anti korupsi tersebut. Hal itu dikarenakan pihak *Malang Corruption Watch* (MCW) kekurangan tenaga dalam melaksanakan program-program kelas model anti korupsi. Sebenarnya motivasi awal kita adalah ingin mengabdikan karena kita berada dibawah naungan yang sama yakni NU, kebetulan pak Azmi adalah pengurus NU di Batu. Adapun bentuk

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Leady Kholifatur Rohmah selaku Ketua Umum IPPNU Kota Batu pada tanggal 15 November 2019.

pengabdian kita awalnya ingin membentuk Komisariat IPNU dan IPPNU di MI Darul Ulum. Motivasi pembentukan Komisariat di MI Darul Ulum adalah bentuk pelaksanaan program kerja IPNU dan IPPNU Kota Batu. Fokus kita siswa-siswi yang berumur 12 tahun”.<sup>137</sup>

Kelas model anti korupsi yang digagas di MI Darul Ulum merupakan yang pertama dan satu-satunya di Malang Raya, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai inisiator pertama memang harus berusaha lebih serius dalam membuat perencanaannya, seperti kurikulumnya, pendekatan pembelajarannya, media, dan metode penyampaiannya. Hasil di lapangan menunjukkan bahwasanya kelas model anti korupsi di MI Darul Ulum belum ada kurikulumnya. Model kelas anti korupsi di MI Darul Ulum dilaksanakan dengan menggunakan modul sebagai petunjuk pelaksanaannya. Modul kelas anti korupsi tersebut adalah hasil dari perumusan yang dilakukan oleh MCW, IPNU & IPPNU dan MI Darul Ulum Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Leady Kholifatul Rohmah:

“Kelas model anti korupsi yang dilaksanakan di MI Darul Ulum merupakan kelas model pertama se-Malang Raya, bahkan bisa dibilang baru pertama di Indonesia mas. Karena kita yang pertama memang agak kerepotan dalam merancang kurikulumnya, karena kan banyak unsur-unsur dari sebuah kurikulum. Mulai dari silabusnya, RPP nya, media pembelajarannya, muatan materinya hingga penilaiannya. Karena kita belum begitu menguasai tentang bagaimana cara membuat sebuah kurikulum maka akhirnya kita membuat modul saja. Modul itu berisi materi tentang nilai anti korupsi, setiap satu kali pertemuan akan membahas tentang satu nilai anti korupsi terus metodenya apakah

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Leady Kholifatul Rohmah selaku Ketua Umum IPPNU Kota Batu pada tanggal 15 November 2019.

dilaksanakan di indoor atau di *out door*, kemudian ada soal post tesnya, ada juga semacam refleksi buat siswa-siswinya”.<sup>138</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kelas model anti korupsi di MI Darul Ulum belum memiliki kurikulum, sebagai pedoman pelaksanaannya hanya mengacu kepada modul yang telah dibuat. Modul itu berisi sembilan nilai anti korupsi versi KPK. Jadi setiap satu kali pertemuan siswa-siswi kelas model anti korupsi mempelajari satu nilai karakter anti korupsi.

## **2. Implementasi Penciptaan Budaya Sekolah dalam mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu**

Pelaksanaan model kelas anti korupsi di MI Darul Ulum berlangsung kurang lebih sekitar tiga bulan, dimulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019. *Launching* kelas model anti korupsi memang dilakukan pada bulan Desember tahun 2018. Artinya kurang lebih sekitar satu bulan dari *launching* tersebut kelas anti korupsi belum terlaksana, hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu untuk menyusun modul kelas anti korupsi. Akhirnya pada bulan Februari 2019 kelas anti korupsi mulai berjalan. Hal ini dinyatakan oleh Bayu Agung Prasetya:

“Karena kita tidak mempunyai latar belakang keilmuan *paedagogik*, maka kita memerlukan waktu untuk menyusun modul kelas anti

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Leady Kholifatur Rohmah selaku Ketua Umum IPPNU Kota Batu pada tanggal 15 November 2019.

korupsi. Memang kita punya konsep awal cuma terlalu tinggi untuk siswa-siswi sekolah dasar. Oleh karena itu, kita dibantu oleh teman-teman IPNU & IPPNU dalam merumuskan modul yang tepat untuk siswa sekolah dasar. Akhirnya sekitar bulan Februari 2019 kelas model anti korupsi dapat kita laksanakan dan bulan April 2019 kelas model anti korupsi berakhir dengan diwisudanya siswa-siswi yang mengikuti kelas model anti korupsi ”.<sup>139</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata ada kendala untuk melaksanakan kelas anti korupsi. Kendala itu berupa pembuatan modul untuk kelas anti korupsi. Karena dalam mengedukasi siswa-siswi sekolah dasar tidak boleh monoton seperti pembelajaran tradisional. Akan lebih baik jika dalam penyampaian materi dikemas dalam bentuk yang bervariasi. Maka dirumuskanlah modul dengan dua pendekatan yakni *indoor* dan *out door*.

Pelaksanaan model kelas anti korupsi dilakukan sekali dalam satu minggu, yakni dilaksanakan pada hari Sabtu yang dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 11.30 wib. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kelas model anti korupsi berjalan seiring dengan jam efektif pembelajaran di sekolah. Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa kelas model anti korupsi di MI Darul Ulum tidak termasuk dalam kegiatan *intrakurikuler* maupun *ekstrakurikuler*. Hanya saja model kelas anti korupsi itu merupakan kelas tambahan atau dikenal dengan istilah diskreasi kepala madrasah. Diskreasi kepala madrasah dalam hal ini adalah kebijaksanaan kepala

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bayu Agung Prasetya selaku divisi Pendidikan *Malang Corruption Watch* (MCW) pada tanggal 26 Oktober 2019.

madrasah sebagai seorang pemimpin organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bayu Agung Prasetya:

“Madrasah anti korupsi merupakan kelas tambahan. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan Pak Ulum Azmi selaku pimpinan di MI Darul Ulum. Beliau menginginkan kelas model itu terlaksana, karena kalau mau dimasukkan ke dalam kegiatan *ekstrakurikuler* dan *intrakurikuler* memang harus masuk di kurikulum sekolah”.<sup>140</sup>

Senada dengan Bayu Agung Prasetya, ketua IPPNU Kota Batu menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau mau dikatakan *ekstrakurikuler* sepertinya bukan mas. Karena kelas model itu berdiri sendiri. Kayak kelas tambahan gitu mas, memang proses pembelajarannya di hari Sabtu jam efektif sekolah, dimulai dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 11.30 wib.”<sup>141</sup>

Dari dua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kelas anti korupsi dilakukan pada jam efektif sekolah. Kelas anti korupsi tersebut bukan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kelas anti korupsi itu kelas yang berdiri sendiri atas kebijaksanaan dari kepala madrasah.

Kelas anti korupsi semacam kelas khusus yang dilaksanakan kurang dari satu semester, hanya berkisar selama tiga bulan. Kurang tepat jika kelas tersebut dimasukkan ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini seperti pernyataan pak Suliono:

<sup>140</sup> Wawancara dengan Bayu Agung Prasetya selaku divisi Pendidikan *Malang Corruption Watch* (MCW) pada tanggal 26 Oktober 2019.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Leady Kholifatur Rohmah selaku Ketua Umum IPPNU Kota Batu pada tanggal 15 November 2019.

“Kalau dibilang kegiatan *ekstrakurikuler* bukan mas, karena pelaksanaannya kurang dari satu semester. Kalau kegiatan *ekstrakurikuler* biasanya dapat dilaksanakan oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 dan 6, dan biasanya ada di kurikulum kita. Kelas anti korupsi itu hasil seleksi anak kelas 4 dan 5 yang sekarang mereka kelas 5 dan 6. Kita ada kegiatan *ekstrakurikuler* seperti Pramuka dan Drum Band, dan dua *ekstrakurikuler* itu dilaksanakan selama tahun ajaran berlangsung karena dua kegiatan itu masuk dalam kurikulum kita. Jadi, kelas anti korupsi itu semacam kebijaksanaan pak Azmi saja sebagai kepala madrasah dan kami selaku guru mendukung penuh, anak-anak juga antusias mengikuti kelas anti korupsi itu. Sebenarnya seluruh anak-anak mau ikut, ya mulai dari kelas 1 dan kelas 6 tapi karena sistem kuota jadi cuma dibuat satu kelas saja”.<sup>142</sup>

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa model kelas anti korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan *ekstrakurikuler*, hal ini karena pelaksanaannya kurang dari satu semester. Terlaksananya model kelas anti korupsi karena kebijaksanaan dari kepala madrasah, dan yang menarik adalah bahwa sebenarnya seluruh siswa-siswi MI Darul Ulum ingin mengikuti kelas tersebut tapi karena memakai kuota maka hanya dibuat satu kelas saja.

Pelaksanaan kelas anti korupsi dilakukan dengan dua pendekatan, yakni sistem *indoor* dan *out door*. Penyampaian materi di *indoor* dilakukan dengan cara penayangan film, bermain drama dan simulasi yang terkait dengan materi dalam hal ini nilai anti korupsi yang dibahas. Adapun materi yang dilaksanakan di luar kelas biasanya menggunakan pendekatan *game*. Untuk kegiatan di dalam kelas, siswa-siswi diajak untuk memahami film

<sup>142</sup> Wawancara dengan pak Suliono selaku Waka Kurikulum pada tanggal 14 November 2019.

yang ditayangkan, kemudian setelah selesai siswa-siswi diberikan waktu untuk merefleksi kembali film yang diputar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bayu Agung Prasetya:

“Pelaksanaan kelas anti korupsi di MI Darul Ulum kita laksanakan sebanyak 8 program. Dari 8 program itu kita menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan *indoor* dan *out door*. Untuk yang *indoor* kita mencoba untuk menayangkan film yang mengandung unsur nilai anti korupsi yang sedang kita bahas hari itu. Misalnya di minggu pertama kita membahas tentang nilai kejujuran, maka film yang kita tayangkan juga berkaitan dengan nilai kejujuran. Setelah itu kita minta siswa-siswi untuk merefleksikan film tersebut. Kita bantu mereka mengaitkannya dengan kehidupan mereka”.<sup>143</sup>

Selesai refleksi tentang film, kegiatan selanjutnya adalah bermain drama. Adapun petunjuk dalam bermain drama dimulai dengan memahami sebuah cerita yang telah disediakan oleh MCW dan IPNU & IPPNU. Cerita tersebut dibagikan kepada seluruh siswa-siswi, mereka diminta untuk memahaminya kemudian bermain drama seperti yang ada di cerita tersebut. Misalnya pada minggu pertama, tema tentang kejujuran, adapun judul ceritanya adalah “*Akibat Si Merah yang Suka Bohong*”. Setelah siswa-siswi memahami ceritanya lalu mereka diminta untuk memainkan drama sesuai dengan isi cerita. Proses bermain drama ini biasanya memakan waktu sekitar 30 menit lebih. Setelah semua siswa-siswi mendapatkan peran masing-masing dalam bermain drama, lalu mereka di minta untuk merefleksikan kembali tentang apa yang sudah diperankan dan dikaitkan dengan nilai

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bayu Agung Prasetya selaku divisi Pendidikan *Malang Corruption Watch* (MCW) pada tanggal 26 Oktober 2019.

kejujuran yang sedang dibahas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Leady

Kholifatul Rohmah:

“Untuk pembelajaran di dalam kelas, kita mulai dengan penayangan film yang berkaitan dengan nilai anti korupsi yang sedang dibahas. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi bersama-sama. *Step* selanjutnya kita memberikan *hard copy* yang berisi tentang sebuah cerita yang berkaitan dengan nilai yang sedang kita bahas. Kemudian siswa-siswi kita minta untuk bermain drama sesuai dengan isi cerita. Lalu kita kembali melakukan refleksi dan kita kaitkan dengan kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari”.<sup>144</sup>

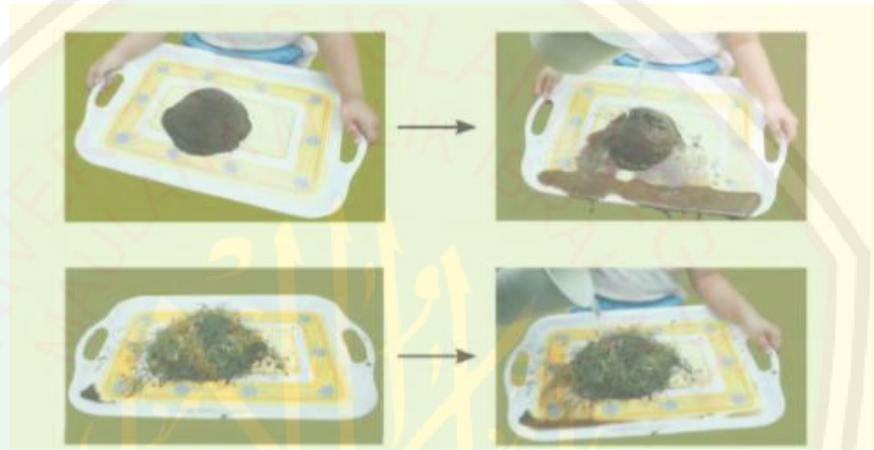
Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaian materi di dalam kelas dilakukan melalui penayangan film dan bermain drama. Selesai dari penayangan film dan bermain drama dilakukan refleksi. Refleksi bertujuan untuk mengingat nilai-nilai yang terkandung dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Penyampaian materi melalui pendekatan *out door* dilakukan di alam terbuka, yakni di lapangan sepak bola dekat sekolah dan di halaman masjid. Metode penyampaian materi di luar kelas ini melalui *game*, dan simulasi. Misalnya pada nilai mandiri yang digabung dengan nilai peduli, pembelajaran dilaksanakan di lapangan. Siswa-siswi dibagi menjadi beberapa kelompok lalu disuruh untuk membuat gunung dari tanah liat. Adapun bahan-bahanya seperti nampan, gayung, tanah, rumput, air dan gayung. Kemudian langkah-langkahnya sebagai berikut:

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Leady Kholifatul Rohmah selaku Ketua Umum IPPNU Kota Batu pada tanggal 15 November 2019.

1. Masing-masing nampan diisi dengan tanah
2. Tanah yang ada di kedua nampan itu dibentuk menyerupai gunung
3. Salah satu gunung dalam nampan tersebut ditutup dengan rumput
4. Miringkan kedua nampan tersebut, kira-kira 20 derajat
5. Guyur kedua gunung itu dengan air
6. Amatilah apa yang terjadi<sup>145</sup>



**Gambar 4.6 Langkah-langkah Membuat Gunung dari Tanah Liat**  
(Sumber: MCW, 2018)

Setelah siswa mensimulasikan kegiatan diatas, lalu siswa diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi sesuai dengan pengamatan dari simulasi tersebut. Setelah itu siswa akan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan simulasi tersebut. Nilai mandiri yang digabung dengan nilai peduli pada simulasi diatas bertujuan agar siswa peduli terhadap alam. Misalnya kalau gunung sudah gundul maka akan merugikan orang banyak khususnya penduduk di sekitar gunung tersebut. Dengan demikian siswa akan

<sup>145</sup> Modul Kelas Anti Korupsi Untuk Tingkat Sekolah Dasar kelas 4-5, *Malang Corruption Watch* (MCW), Bab II Materi Tentang Peduli, hlm. 13.

menyadari bahwa dengan berperilaku peduli akan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

### **3. Dampak Positif Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu**

Penciptaan budaya sekolah yang mencerminkan perilaku anti koruptif di MI Darul Ulum bertujuan untuk membentuk karakter warga madrasah. Karakter anti koruptif tidak bisa dibentuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis dan temporer saja. Dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang bersifat terus menerus dan rutin dilakukan, artinya kegiatan-kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan bagi warga madrasah. Berangkat dari kebiasaan itu maka akan menjadi budaya sekolah.

Budaya sekolah yang ada di MI Darul Ulum hari ini merupakan hasil dari pembiasaan. Pembiasaan yang dibangun akan membentuk watak dan perilaku warga madrasah. Beranjak dari kebiasaan itu maka dapat dilihat sejauh mana tujuannya tercapai. Keberhasilan pengembangan budaya sekolah yang mencerminkan perilaku anti koruptif bisa dilihat dari dampak positifnya terhadap siswa dan guru. Dampak positif itu bisa jadi berupa menurunnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Sesuai dengan pernyataan pak Ulul Azmi selaku Kepala MI Darul Ulum:

“Membiasakan hal-hal yang baik memang butuh waktu mas, untuk disiplin waktu saja saya akui sampai hari ini belum seratus persen berhasil. Artinya masih ada siswa-siswi dan guru yang telat. Tapi *alhamdulillah* setelah adanya model kelas anti korupsi kemarin

ternyata memberikan dampak yang signifikan. Untuk kedisiplinan ada peningkatan sekitar 80 % untuk guru dan siswa. Dari 18 total guru hari ini ada sekitar 3 orang saja yang belum disiplin, dan dari total 205 siswa-siswi ada sekitar 40 an yang belum disiplin. Kemudian siswa-siswi juga lebih peduli terhadap lingkungan sekolah. Siswa yang ikut model kelas anti korupsi kemarin mampu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam bentuk perilaku sehari-hari, dan yang unik nya siswa-siswi yang tidak mengikuti model kelas anti korupsi terkena dampaknya langsung, apa dampaknya? mereka yang tidak ikut ini tau sembilan nilai anti korupsi itu mas”.<sup>146</sup>

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa model kelas anti korupsi memberikan dampak yang signifikan, mulai dari kedisiplinan siswa dan guru, tingkat kepedulian siswa-siswi meningkat dan siswa-siswi hasil didikan kelas anti korupsi mampu menghegemoni siswa-siswi yang lain dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi yang telah mereka pelajari ke dalam perilaku sehari-hari serta memberikan dampak pada siswa-siswi yang tidak mengikuti kelas anti korupsi.

Senada dengan pernyataan pak Ulul Azmi, dalam konteks kedisiplinan ibu Maria Ulfa menyatakan:

“Saya selaku Koordinator BK merasa lega, sekarang saya tidak lagi terlalu sering menghukum siswa-siswi yang telat. Secara umum model kelas anti korupsi kemarin memberikan dampak yang signifikan terhadap kedisiplinan siswa-siswi. Menurut saya harusnya kuota untuk siswa-siswi yang mengikuti kelas anti korupsi itu harus banyak yang ikut, selain siswa-siswi antusias *toh* juga memberikan dampak yang bagus untuk mereka”.<sup>147</sup>

<sup>146</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>147</sup> Wawancara dengan Maria Ulfa selaku wali kelas 5 A sekaligus Koordinator BK pada tanggal 02 November 2019

Dampak positif dalam konteks proses belajar mengajar adalah siswa-siswi lebih percaya diri dalam melakukan tugas, tidak mencontek pekerjaan siswa yang lain. Siswa-siswi lebih bangga dengan hasil kerja sendiri walaupun nilainya kecil dibandingkan nilainya besar tapi hasil mencontek. Sesuai dengan pernyataan ibu Mufidah selaku wali kelas VI A:

“Dalam kegiatan dikelas, anak-anak lebih percaya diri untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Ketika ujian tengah semester dan UAS, anak-anak tidak pernah mencontek, ketika sehari-hari pun demikian. Kecuali memang ada waktunya kita buat anak-anak dalam kelompok-kelompok untuk menyelesaikan tugas, itu bukan mencontek melainkan bekerjasama”.<sup>148</sup>

Senada dengan keterangan diatas, Ibu Siti Aminah wali kelas 5 B menyatakan:

“*Alhamdulillah* siswa-siswi lebih mandiri mas dan jujur terhadap pekerjaan masing-masing. Siswa-siswi tidak masalah jika hasil ujian mereka kecil asal bagi mereka tidak mencontek. Ya, saya sebagai guru senang melihatnya, artinya mereka jujur dan percaya terhadap kemampuan diri sendiri”.<sup>149</sup>

Dari dua keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari budaya sekolah yang anti koruptif tercermin dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Siswa-siswi mandiri dalam melaksanakan tugasnya, tidak mencontek dan lebih percaya diri dalam konteks lebih bangga dengan hasil kerja sendiri apapun hasilnya.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ibu Mufidah selaku wali kelas 6 A pada tanggal 02 November 2019.

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku wali kelas 6 A pada tanggal 02 November 2019.

Dampak lain yang ditimbulkan dari model kelas anti korupsi adalah mampu meningkatkan antusias pengurus perpustakaan, hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Aminah selaku Kepala perpustakaan:

“Pelaksanaan model kelas anti korupsi lumayan berdampak pada pengurus perpustakaan. Awal-awal mereka menjadi pengurus perpustakaan ya kadang kelihatan kurang serius dalam melayani siswa yang pinjam buku, kadang juga kelihatan seperti kebingungan dengan tugasnya selaku pengurus perpustakaan. Sekarang anak-anak selalu siap sedia di meja perpustakaan *out door* itu mas, kan waktu meminjamnya setiap jam istirahat, nah anak-anak pengurus itu selalu bawa *bontot* dari rumah agar mereka tidak lalai dalam menjaga perpustakaan”.<sup>150</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak kelas anti korupsi mampu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa-siswi dalam hal ini adalah pengurus perpustakaan. Pengurus perpustakaan membekali diri mereka dengan membawa makanan dari rumah agar ketika siswa-siswi ingin meminjam buku, pengurus perpustakaan bisa melayani. Hal ini dikarenakan jam peminjaman pada saat jam istirahat.

Dampak terakhir dari model kelas anti korupsi adalah menurunnya tingkat *bullying* diantara siswa. Hal ini sesuai pernyataan ibu Maria Ulfa:

“Dulu siswa-siswi itu saling mem-*bully* antara satu sama lain dengan cara menyebutkan nama orang tua. Sekarang sudah menurun, salah satunya hasil dari kelas anti korupsi itu untuk saling menghargai satu sama lain”.<sup>151</sup>

<sup>150</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku Kepala Perpustakaan Bidang pada tanggal 04 Desember 2019.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Ulfa selaku wali kelas 5 A sekaligus Koordinator BK pada tanggal 02 November 2019

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak kelas anti korupsi ternyata mampu menekan tingkat *bullying* yang ada di MI Darul Ulum.

Hal senada juga diungkapkan oleh pak Slamet Riyadi selaku Waka Bidang Kesiswaan:

“Sering sekali mas dulu siswa-siswi saling sebut nama orang tua diantara mereka, iya itu merupakan bentuk *bullying* siswa-siswi disini. Kita sering menegur dan tidak jarang menghukum mereka. Sekarang sudah jarang tapi masih ada, Cuma intensitasnya tidak sesering dulu”.<sup>152</sup>

Dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai anti korupsi, siswa-siswi diberikan panggung untuk berkreasi dengan cara membuat karya yang berkaitan dengan anti korupsi. Seperti menggambar, membuat tulisan tentang anti korupsi di dinding-dinding pagar sekolah dan prakarya lainnya. Hal ini sesuai pernyataan pak Ulul Azmi:

“Jadi, untuk menguatkan ingatan anak-anak tentang nilai-nilai anti korupsi kita suruh mereka untuk menggambar dan menulis Sembilan nilai anti korupsi di dinding pagar sekolah, ada juga yang membuat prakarya lain yang berhubungan dengan anti korupsi”.<sup>153</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa, pihak sekolah memfasilitasi siswa-siswi untuk menggambar sembilai nilai anti korupsi dipagar sekolah dan membuat

<sup>152</sup> Wawancara dengan pak Slamet Riyadi selaku Waka Bidang Kesiswaan dan wali kelas 4 B pada tanggal 02 November 2019

<sup>153</sup> Wawancara dengan pak Ulul Azmi selaku kepala MI Darul Ulum pada tanggal 28 Oktober 2019.

prakarya lainnya. Hal ini sebagai bentuk ekspresi bahwa sembilan nilai anti korupsi itu harus diingat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.



**Gambar 4.7 Hasil Karya Siswa/I di Pagar Sekolah (Sumber: Dokumentasi hasil karya siswa/i di pagar sekolah, 2019)**

### C. Temuan Penelitian

Berangkat dari paparan diatas, maka dapat ditarik temuan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Temuan Penelitian.**

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Perencanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi	<p><i>Budaya disiplin waktu</i> (datang ke sekolah pukul 06.30 wib, tahlilan dan dhuha setiap hari Selasa sampai dengan hari Jum'at).</p> <p><i>Mandiri dalam menjaga lingkungan sekolah</i> (menyapu dan membersihkan halaman sekolah, membersihkan kaca kelas dan kaca ruang guru,merapikan perpustakaan).</p> <p><i>Mandiri dalam belajar</i> (siswa malu untuk mencontek).</p> <p><i>Budaya tanggung jawab melalui perpustakaan out door.</i></p>
2	Implementasi penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi	<p>Kepala madrasah memberikan teladan dalam pembentukan perilaku mandiri, kepala madrasah dan guru memberikan <i>stressing</i> kepada siswa untuk jujur dan tidak mencontek dalam proses belajar mengajar, kepala madrasah membangun budaya disiplin tepat waktu melalui kelas efektif yang dimulai pukul 06.45 wib dan kegiatan dhuha serta tahlilan, guru memberikan teladan pada budaya disiplin, dan pelaksanaan model kelas anti korupsi oleh pihak eksternal</p>

		<i>Malang Corruption Watch</i> (MCW) dan IPNU serta IPPNU.
3	Dampak positif penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi	Setelah dilaksanakan kelas anti korupsi siswa-siswi lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas, siswa dan guru lebih disiplin waktu dan siswa-siswi peserta kelas anti korupsi memberikan imbas kepada siswa yang tidak ikut, siswa jujur terhadap hasil pekerjaan sendiri, siswa bertanggung jawab terhadap amanah yang di emban sebagai pengurus perpustakaan dan menurunnya <i>bullying</i> di madrasah.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Perencanaan Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu**

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa setidaknya ada empat macam budaya sekolah yang ada di MI Darul Ulum, yakni:

##### 1. Budaya Disiplin Waktu

Budaya disiplin waktu di MI Darul Ulum berjalan sudah tiga tahun semenjak kepemimpinan Bapak Ulul Azmi, sebelumnya kebiasaan masuk kelas pukul 07.30 wib, sekarang pukul 06.45 wib dan sebelum memulai kelas efektif dilakukan rangkaian kegiatan berupa tahlilan dan dhuha terlebih dahulu di masjid. Pukul 07.30 wib proses belajar mengajar telah dilaksanakan. Implementasi budaya disiplin ini menjadi prioritas pihak sekolah, hal ini dapat di lihat dari hukuman yang diberikan kepada siswa-siswi yang terlambat. Hukuman itu bersifat mendidik, yakni menghafal surat-surat pendek tapi apapun bentuk hukumannya dapat dikatakan bahwa pihak sekolah serius dalam menata unsur-unsur di sekolah agar disiplin.

Hasil temuan tentang disiplin di MI Darul Ulum ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syamsul Kurniawan yang menyatakan bahwa

penggunaan aturan sebagai alat, di sekolah hendaklah terdapat aturan-aturan umum, baik aturan-aturan khusus maupun aturan umum. Peraturan tersebut harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pelanggaran yang mendorong perilaku negatif atau tidak disiplin peserta didik.<sup>154</sup>

Senada dengan pernyataan Syamsul Kurniawan diatas, Zubaedi menyatakan bahwa disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.<sup>155</sup>

Pelaksanaan budaya disiplin waktu di MI Darul Ulum bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati untuk merubah perilaku siswa di sekolah dan bukan hanya sekedar sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu untuk membentuk mental disiplin kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi sekolah yang dapat membuat semua personil sekolah untuk taat dan patuh secara sadar untuk mengikuti tata tertib yang ada disekolah tersebut. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Daryanto yang menyebutkan bahwa tata tertib yang ada jangan sampai hanya dilakukan untuk menertibkan warga sekolah dari segi fisik saja, tetapi juga membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semu yang dilakukan karena takut menerima

---

<sup>154</sup> Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 136.

<sup>155</sup> Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan)*, (Cet; ke-2: Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 75.

sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa tata tertib itu memiliki nilai kebenaran sehingga perlu ditaati.<sup>156</sup>

Bagi pelanggar aturan disiplin maka akan diberikan sanksi, yaitu menghafal surat-surat pendek, sanksi yang diberikan bersifat mendidik. Walaupun terkesan sederhana, sebenarnya makna dibalik hukuman itu bagi sebenarnya sebuah upaya untuk mendisiplinkan yang melanggar. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Daryanto bahwa pejatuhan hukuman atas pelanggaran hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan hukuman tersebut. Siswa yang menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan.<sup>157</sup>

## 2. Budaya Mandiri Menjaga Lingkungan Sekolah

Budaya mandiri dalam konteks menjaga lingkungan sekolah di MI Darul Ulum adalah kebiasaan yang dilakukan oleh siswa-siswi sebelum bel tanda kelas di mulai berbunyi. Kebiasaan tersebut adalah siswa-siswi membersihkan halaman sekolah dengan cara menyapu dan membuang sampah, siswa-siswi merapikan perpustakaan, siswa-siswi membersihkan kaca-kaca kelas, kaca-kaca diruangan guru dan kantor tanpa mengganggu jadwal piket mereka masing-masing di kelasnya. Kebiasaan mandiri di MI Darul Ulum ini sesuai dengan teori Herman Holstein yang menyatakan

---

85. <sup>156</sup> Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, (Cet I; Yogyakarta: Gava Media, 2015),.

<sup>157</sup> Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, 89.

bahwa mandiri adalah berlangsungnya pelajaran yang jelas memperlihatkan bahwa pengajar berusaha untuk mengembangkan belajar mandiri melalui bekerja sendiri dan menemukan sendiri. Sikap pengajar dalam pelajaran membuka kesempatan bagi para pelajar untuk mendapat gerak atau ruang kerja seluas-luasnya dalam cara serta waktu kerjanya, ditandai dengan tidak menonjolnya peranan pengajar. Pengajar sedapat-dapatnya menarik diri guna memberikan kesempatan kerja kepada para pelajarnya.<sup>158</sup>

Lebih lanjut Hermann Holstein mengutip Gertrand Becker menyimpulkan bahwa anak yang menjadi besar, dalam sekolah ia belajar untuk mengatur dan membereskan sendiri hubungan dalam lingkungannya dengan manusia dan benda. Dimana ada kemungkinan bertindak dan bersikap mandiri, di situlah sedikit banyaknya dimulai proses belajar mandiri.<sup>159</sup>

### 3. Budaya Mandiri dalam Belajar

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa budaya mandiri dalam konteks belajar di MI Darul Ulum adalah siswa-siswi tidak mencontek ketika ujian. Siswa-siswi ketika belajar sehari-hari diluar ujian juga tidak mencontek satu sama lain kecuali ada materi yang mengharuskan mereka menyelesaikannya secara kelompok. Mandiri dalam konteks belajar ini sesuai dengan teori Said Hamid Hasan yang menyatakan bahwa mandiri

<sup>158</sup> Hermann Holstein, *Murid Belajar Mandiri*, ter. Soeparmo, (Bandung: Remadja Karya, 1987), 9.

<sup>159</sup> Hermann Holstein, *Murid Belajar Mandiri*, ter. Soeparmo, 126.

adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.<sup>160</sup>

Mandiri dalam belajar di MI Darul Ulum senada dengan teori yang disampaikan oleh Tirtahardja yang menyatakan bahwa kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.<sup>161</sup>

Hasil temuan selanjutnya terkait dengan mandiri dalam belajar ini yaitu siswa-siswi lebih bertanggung jawab terhadap hasilnya sendiri. Siswa-siswi merasa bangga dengan hasil kerja sendiri walaupun nilainya kecil daripada nilai besar akan tetapi hasil dari mencontek. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Drost yang mengungkapkan bahwa mandiri adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan usaha pribadi, masalah juga dapat timbul ketika peserta didik melakukan kegiatan belajar. Peserta didik yang memiliki sikap mandiri akan berusaha mengatasi masalah dalam melakukan kegiatan belajar dengan usaha sendiri. Peserta didik tersebut menyadari bahwa hasil dari segala usaha yang telah dilakukan akan

---

<sup>160</sup> Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan)*, 75.

<sup>161</sup> Miftaqul Al Fatihah, "Hubungan Antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas III SDN Panularan Surakarta", *At-Tarbawi*, 2 (Juli-Desember 2016), 199.

memperlihatkan kualitas diri pribadi dan menimbulkan suatu kepuasan tersendiri.<sup>162</sup>

#### 4. Budaya Tanggung Jawab melalui Perpustakaan *Out Door*

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada budaya tanggung jawab yang diimplementasikan di MI Darul Ulum melalui perpustakaan *out door*. Tanggung jawab melalui perpustakaan *out door* ini ditekankan kepada pengurus perpustakaan itu sendiri. Semua alur jalannya manajemen perpustakaan dilakukan oleh siswa-siswi yang menjadi pengurus perpustakaan, mulai dari laporan per hari, laporan per bulan kepada Kepala Perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa amanah yang diberikan oleh sekolah kepada siswa-siswi pengurus perpustakaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Hasil temuan ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Syamsul Kurniawan yang menyatakan bahwa penanaman rasa tanggung jawab di sekolah dapat dilakukan oleh guru dengan tiga (3) cara, yakni: *pertama*, memberi pengertian pada peserta didik apa itu sebenarnya tanggung jawab. *Kedua*, dalam melaksanakan tugas atau kegiatan perlu adanya pembagian tanggung jawab peserta didik satu dengan yang lain, batas-batas dan aturan-aturannya pun harus jelas agar peserta didik lebih mudah diarahkan. *Ketiga*, mulailah memberikan pelajaran kepada peserta didik tentang rasa tanggung

<sup>162</sup> Premita Sari Octa Elviana, “Pembentukan Sikap Mandiri dan Tanggung Jawab Melalui Penerapan Metode Sosiodrama dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan”, *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, ISSN: 2302-433x, 2017, 138.

jawab mulai dari hal-hal kecil, seperti usahakan peserta didik selalu membereskan kursi meja tempat ia duduk sebelum meninggalkan ruangan kelas.<sup>163</sup>

Senada dengan Syamsul Kurniawan diatas, tanggung jawab menurut Kemendikbud adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko atas perbuatannya sendiri.<sup>164</sup>

Hasil temuan menunjukkan bahwa setiap hari pengurus perpustakaan melaporkan tentang berapa denda buku kepada Kepala Perpustakaan, kemudian setiap satu bulan sekali pengurus melaporkan peminjaman dan pengembalian buku kepada Kepala Perpustakaan. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek tanggung jawab terhadap tugas dilakukan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini senada dengan teori Djamarah yang menyatakan bahwa pemberian tugas memiliki banyak kelebihan yang salah satunya adalah dapat menumbuhkan tanggung jawab dan disiplin siswa.<sup>165</sup>

Beberapa budaya sekolah diatas adalah cerminan budaya sekolah yang anti koruptif yang dibangun di MI Darul Ulum, merupakan usaha untuk mengaktualisaikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Dari hasil analisis temuan peneliti diatas dan juga teori yang ditulis

---

<sup>163</sup> Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)*, 158-159.

<sup>164</sup> Palupi Raraswati, *Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak*, (Cet I; Jakarta: 2016), 2.

<sup>165</sup> Faizatul Lutfia Yasmin, Anang Santoso, Sugeng Utaya, "Hubungan Disiplin dengan Tanggung Jawab Belajar Siswa", *Jurnal Pendidikan*, 4 (April, 2016), 693.

oleh Koentjaraningrat dalam Eva Maryamah menghasilkan persamaan yaitu bahwa Koentjaraningrat membagi dimensi budaya terbagi menjadi tiga wujud yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lain-lain, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>166</sup>

Selanjutnya hasil analisis temuan juga selaras dengan teori yang ditulis oleh Muhaimin yang menyatakan bahwa bahwa budaya sekolah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan yang ada didalam sekolah tersebut.<sup>167</sup>

#### **B. Implementasi Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu**

Dari hasil temuan penelitian, implementasi penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum peneliti bagi dalam dua *varian*, yakni;

- 1) Implementasi penciptaan budaya sekolah yang bersifat internal meliputi; kepala madrasah memberikan teladan dalam pembentukan perilaku mandiri,

---

<sup>166</sup> Eva Maryamah, *Pengembangan Budaya Sekolah, Tarbawi*, vol. 2, No. 02, Juli-Desember 2016, 88.

<sup>167</sup> Muhaimin, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, 48.

kepala madrasah dan guru memberikan *stressing* kepada siswa untuk jujur dan tidak mencontek dalam proses belajar mengajar, kepala madrasah membangun budaya disiplin tepat waktu melalui kelas efektif yang dimulai pukul 06.45 wib dan kegiatan dhuha serta tahlilan, guru memberikan teladan pada budaya disiplin.

- 2) Implementasi penciptaan budaya sekolah yang bersifat eksternal yakni dan pelaksanaan model kelas anti korupsi oleh pihak eksternal *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU.

Penjelasan dari hasil temuan dua varian diatas sebagai berikut:

- a) Implementasi penciptaan budaya sekolah bersifat internal

[1] Kepala madrasah membangun budaya mandiri melalui keteladanan

Peran kepala madrasah sebagai *leader* di MI Darul Ulum sangat mempengaruhi segala aspek termasuk dalam hal membangun budaya sekolah. Sebagai pemimpin tentunya harus dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Budaya mandiri yang dibangun oleh kepala madrasah melalui keteladanan adalah budaya membersihkan lingkungan madrasah dan peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. Seperti sudah diuraikan bahwa kepala madrasah mengawali untuk membersihkan lingkungan madrasah dengan cara menyapu halaman madrasah. Hal ini dilakukan secara terus menerus, sampai pada akhirnya guru dan siswa-siswi mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala madrasah tersebut. Hasil

temuan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hendyat Soetopo yang menyatakan bahwa kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan adalah kemampuan untuk mengajak, mempengaruhi, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan orang yang terlibat dalam pendidikan untuk mencapai tujuan.<sup>168</sup>

Senada dengan teori Hendyat Soetopo diatas, Zubaedi menyatakan bahwa tugas pemimpin tidak lah mudah, termasuk dalam hal ini adalah kepala madrasah. Kepala madrasah menjadi panutan semua orang, sebagai *role model (uswatun hasanah)* bagi anak buahnya. Maju mundurnya sekolah bergantung kepada karakter ataupun akhlak kepala sekolah. Pemimpin dituntut menuntun, memandu, dan menunjukkan jalan bagi anak buah atau rakyatnya menuju jalan yang benar dan diridhoi Tuhan.<sup>169</sup>

Dalam terminologi Islam, pemimpin pada dasarnya aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah swt, dengan tidak hanya mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai Allah swt.<sup>170</sup>

Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin karena dalam diri beliau hanya ada

<sup>168</sup> Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi (Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan)*, (Cet:I Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 211.

<sup>169</sup> Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan)*, 171.

<sup>170</sup> Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al-Bayan*, 33 (Januari, 2016), 30.

kebaikan. Hal ini sejalan dengna firman Allah swt dalam QS. al-Ahzab: 21 yakni:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: ” Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. al-Ahzab: 21).

Faiqatul Husna memaparkan sosok *role model* kepemimpinan Rasulullah, yaitu:<sup>171</sup>

- (a) *Sidiq* (Jujur). Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila ia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya.
- (b) *Amanah* (Terpercaya). Amanah merupakan kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya.
- (c) *Tablig* (Komunikatif). Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh

<sup>171</sup> Faiqatul Husna, “Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam”, *Miskyat*, 02 (Desember, 2017), 141-142.

pemimpin. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindahkan sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat manusia yang memiliki beragam kevederungan. Oleh karena itu komunikasi merupakan kunci terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat.

(d) *Fathanah* (Cerdas). Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya agar memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi.

Dengan demikian keteladanan yang dilakukan oleh kepala madrasah mampu menggerakkan warga madrasah untuk mengikutinya dan sampai hari ini konsekuensi dari keteladanan tersebut telah menjadi kebiasaan di MI Darul Ulum.

[2] Kepala madrasah dan guru memberikan *stressing* kepada siswa jujur dan tidak mencontek dalam belajar

Selain keteladanan diatas, kepala madrasah dan guru juga berupaya untuk membangun sebuah kesadaran untuk jujur terhadap diri sendiri dan tidak mencontek dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan agar siswa-siswi dapat memaksimalkan potensi dirinya.

Penekanan untuk tidak mencontek merupakan perilaku anti korupsi yang bertujuan untuk bersikap jujur dan mandiri. Hasil temuan di lapangan tentang budaya jujur dan tidak mencontek ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dharma Kesuma, Cipi Triatna dan Johar Permana yang menyatakan bahwa perbuatan mencontek merupakan perbuatan yang mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada diri sendiri, teman, orang tua dan gurunya.<sup>172</sup>

Dalam perspektif Islam, jujur adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan benar. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu *shiddiq*, hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan dari sikap dusta atau tidak jujur, baik kepada Tuhan-Nya, kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.<sup>173</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah: 119 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah: 119).

Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada konsekuensi dari mencontek yaitu akan mendapatkan hukuman yakni pengasingan di

<sup>172</sup> Dharma Kesuma dkk, *Pendidikan Karakter (Kajian teori dan Praktik di Sekolah)*, (Cet I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 16.

<sup>173</sup> Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 41.

luar kelas. Pelaksanaan hukuman tersebut dimaksudkan supaya siswa malu untuk mencontek. Hasil temuan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Daryanto yang mengatakan bahwa penegakan tata tertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik (dalam hal ini jujur) dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal sekolah maupun di lingkungan luar sekolah.<sup>174</sup>

[3] Kepala madrasah dan guru membangun budaya disiplin melalui tata tertib sekolah

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa budaya disiplin waktu menjadi prioritas utama kepala madrasah, hal ini karena kesadaran akan menghargai waktu masih rendah. Berangkat dari kondisi itu maka kepala madrasah mempunyai komitmen untuk membangun budaya disiplin waktu dari yang sebelumnya masuk kelas pukul 07.30 wib ke pukul 06.45 wib dan kemudian dilaksanakan proses tahlilan dan dhuha bersama di masjid sebelum memulai pelajaran di kelas yang dilaksanakan pukul 07.15 wib. Hasil temuan ini sesuai dengan teori Mulyasa yang menyebutkan bahwa kepala sekolah ideal mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu; *pertama* kepala sekolah ideal harus kreatif dan proaktif. Maksudnya adalah kepala sekolah yang selalu bertindak untuk mencegah munculnya masalah dan kesulitan di masa yang akan datang. *Kedua*, membangun

---

<sup>174</sup> Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, 91.

karakter. Karakter suatu organisasi tercermin dari pola sikap dan perilaku orang-orangnya. Sikap dan perilaku organisasi cenderung menimbulkan rasa senang dan puas pada pihak pelanggan-pelanggannya perlu dibina oleh pimpinan.<sup>175</sup>

Budaya disiplin waktu ini menjadi tanggung jawab semua warga madrasah. Guru dan siswa menjadi pelaku untuk membangun kesadaran tepat waktu. Dengan adanya kegiatan tahlilan dan dhuha yang dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan yang membentuk budaya disiplin. Hasil temuan ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Schein yang menyatakan bahwa pembentukan budaya organisasi (dalam hal ini sekolah) tidak bisa dipisahkan dari peran para pendiri organisasi.<sup>176</sup>

Hasil temuan-temuan yang bersifat internal diatas mempunyai beberapa kesamaan dengan teori yang ditulis oleh Muhammad Nurdin yang menyatakan bahwa setidaknya ada tiga strategi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah yaitu sebagai berikut:

- 1) Model terintegrasi dalam mata pelajaran

---

<sup>175</sup> Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 49.

<sup>176</sup> Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi (Pengertian, Makna dan aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi)*, Edisi II (Cet I; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2009), 216.

- 2) Model di Luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler
- 3) Model pembudayaan aktivitas dan suasana madrasah

Dari ketiga model tersebut, maka model yang cocok untuk implementasi penciptaan budaya sekolah yang bersifat internal adalah model pembudayaan aktivitas dan suasana madrasah. Muhammad Nurdin menyatakan Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya, sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi siswa sekolah dasar, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa dikemudian hari.<sup>177</sup>

Hasil temuan tentang implementasi penciptaan budaya sekolah yang bersifat internal ini juga mempunyai beberapa kesamaan dengan teori yang ditulis oleh David Wijaya yang menyebutkan bahwa ada tiga macam strategi implementasi pendidikan anti korupsi, yakni:

- 1) Integrasi dalam mata pelajaran yang ada
- 2) Mata pelajaran dalam muatan lokal
- 3) Kegiatan pengembangan diri

---

<sup>177</sup> Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi*, 182.

Dari ketiga macam strategi diatas, maka implementasi penciptaan budaya sekolah yang bersifat internal ini selaras dengan kegiatan pengembangan diri. David Wijaya menyatakan bahwa kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu:<sup>178</sup>

- a) Pembudayaan dan pembiasaan, yaitu pengkondisian, kegiatan rutin, keteladanan dan kegiatan spontan
- b) Kegiatan terprogram melalui ekstrakurikuler (Pramuka, PMR, UKS, OSIS) serta bimbingan konseling.

b) Implementasi budaya sekolah bersifat eksternal

[1] Pelaksanaan model kelas anti korupsi oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU

Hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa ada kontribusi pihak *eksternal* dalam hal ini *Malang Corruption Watch* (MCW), IPNU & IPPNU yang mendukung siswa-siswi di MI Darul Ulum dengan menggagas dan melaksanakan kelas anti korupsi yang pertama kali se-Malang Raya. Peranan pihak eksternal ini cukup besar karena pihak eksternal lah yang mempunyai ide awal dan juga dalam melaksanakannya, pihak sekolah hanya menjadi objek dan fasilitator.

---

<sup>178</sup> David Wijaya, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, 30.

Hasil temuan ini mempunyai beberapa kesamaan dengan teori Muhammad Nurdin yang menyatakan bahwa peran pihak luar dapat dikategorikan sebagai model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler. Lebih lengkap Muhammad Nurdin menyatakan penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah/madrasah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga diluar sekolah/madrasah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>179</sup>

Hasil temuan ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh David Wijaya yang menyatakan bahwa ada partisipasi publik untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasinya agar sekolah menjadi institusi yang berbudaya integritas, menurut David Wijaya semua pihak (pemerintah, tenaga kependidikan, orang tua dan tokoh masyarakat) berperan aktif dalam mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dan lingkungannya.<sup>180</sup>

### **C. Dampak Positif yang ditimbulkan dari Penciptaan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu**

---

<sup>179</sup> Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi*, 181.

<sup>180</sup> David Wijaya, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, 32.

Hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa budaya sekolah yang mencerminkan pendidikan anti korupsi di madrasah membawa dampak positif bagi warga madrasah, berikut dampak dari semua pembiasaan yang peneliti temui di lapangan: siswa memiliki sikap disiplin dan jujur. Budaya sekolah yang mencerminkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum adalah upaya pembiasaan yang membentuk perilaku warga sekolah. Hasil temuan ini ada kaitannya dengan teori *operant conditioning* (pembiasaan perilaku respons) yang dikemukakan oleh Burrhus Frederic Skinner. Teori pembiasaan perilaku respons didasarkan pada asumsi bahwa aspek-aspek lingkungan (stimulus, situasi, peristiwa) berperan sebagai tanda-tanda untuk pemberian respons.<sup>181</sup> Penguatan akan memperkuat respons dan meningkatkan kemungkinan terjadinya respons tersebut di masa mendatang ketika terdapat stimulus.

Inti dari teori Skinner dalam Ainul Izzah dan Harmanto menekankan pada pembelajaran dimana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama yaitu penguatan dan hukuman. *Pertama*, penguatan bertanggung jawab terhadap upaya memperkuat respons atau membuat respons-respons makin cenderung terjadi. Skinner membagi penguatan menjadi dua bagian, yaitu; a) penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung

---

<sup>181</sup> Dale H. Schunk, *Learning Theories (An Educational Perspective)*, terj. Eva Hamidah, Rahmat Fajar, Edisi VI (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 157.

(*rewarding*). Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah. b) penguatan negatif adalah penguatan yang berdasarkan pada prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan (tidak menyenangkan). Bentuk-bentuk penguatan negatif berupa menunda atau tidak member penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang. penguatan negatif meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku sedangkan hukuman menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. *Kedua*, hukuman (*punishment*) adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan sesuatu respons atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Dalam bahasa keseharian, hukuman dapat mencegah pemberian sesuatu yang diharapkan organism atau memberi sesuatu yang tidak diinginkannya.<sup>182</sup> Dalam konteks disiplin dan jujur menurut penulis teori Skinner tepat karena pembentukan sikap disiplin dan jujur perlu ada pembiasaan perilaku respons.

Hasil temuan di lapangan selanjutnya menunjukkan bahwa budaya sekolah yang anti koruptif memberikan dampak positif kepada siswa, yakni: siswa memiliki sikap peduli, cinta lingkungan, tanggung jawab, dan menurunya praktek *bullying* diantara siswa. Sikap yang terbentuk pada siswa diatas tidak bisa didapati secara praktis, butuh kegiatan yang terus menerus yang bersifat

---

<sup>182</sup> Ainul Izzah, Harmanto, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Budaya Sekolah di SMPN 38 Surabaya", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 02 (2013), 271.

keteladanan. Kegiatan yang dilakukan melalui keteladanan akan mampu membentuk watak dan perilaku siswa, apalagi objek dari pembiasaan itu adalah siswa-siswi sekolah dasar yang mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain dan melalui pembiasaan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan ini sesuai dengan teori yang ditulis oleh Albert Bandura bahwa proses belajar manusia terjadi dengan mengamati konsekuensi perilaku model.

Albert Bandura dalam Margaret E. Gredler menyatakan bahwa proses belajar sosial kognitif melalui beberapa tahapan yakni, *pertama* proses atensi (perhatian) yaitu belajar adalah proses yang terus berlangsung tetapi ia menunjukkan bahwa hanya yang diamati sajalah yang dapat dipelajari. Perilaku baru tidak bisa diperoleh kecuali pengamat memperhatikan dan memahaminya secara akurat. *Kedua*, proses retensi (ingatan), dalam proses retensi, informasi disimpan secara simbolis melalui dua cara, secara imajinatif dan verbal. Simbol-simbol yang disimpan secara imajinatif adalah gambaran tentang hal-hal yang dialami model. Sedangkan simbolisasi verbal adalah perilaku bisa ditangkap dengan baik dalam wadah kata-kata. *Ketiga*, proses reproduksi motorik (pembentukan perilaku) mencakup pemilihan dan pengorganisasian respons pada level kognitif, diikuti dengan pelaksanaan. Proses pembentukan perilaku menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Margaret E. Gredler, *Learning and Instruction (Teori dan Aplikasi)*, terj. Tri wibowo B.S, Edisi VI (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 439.

Dari hasil temuan peneliti dan juga teori menghasilkan dampak positif pengembangan pendidikan anti korupsi melalui penciptaan budaya sekolah yaitu: siswa memiliki disiplin, sikap peduli, cinta lingkungan, tanggung jawab, jujur dan menurunya praktek *bullying* di sekolah.



## BAB VI

### PENUTUP

Penutup merupakan bab akhir dari penelitian, mengemukakan kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan didasarkan pada paparan data, temuan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan terkait penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Perencanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi dengan menerapkan budaya disiplin waktu, budaya mandiri dalam menjaga lingkungan sekolah, budaya jujur dan mandiri dalam belajar dan budaya tanggung jawab melalui perpustakaan *out door*. Budaya sekolah di MI Darul Ulum dibangun melalui pembiasaan-pembiasaan yang direncanakan sebelumnya oleh kepala madrasah dan guru. Sebagai pemimpin, kepala madrasah mempunyai pandangan dan gagasan dalam membangun budaya sekolah yang baik. Hal itu kemudian mendapat dukungan dari guru-guru, sehingga hari ini budaya sekolah yang ada di MI Darul Ulum dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Implementasi penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi diprakarsai terlebih dahulu oleh kepala madrasah, dengan cara memberikan teladan kepada warga madrasah untuk disiplin dengan cara datang lebih awal, memberikan teladan dalam menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih dengan cara menyapu halaman sekolah. Keteladanan itu secara konsisten dilakukan hingga akhirnya mampu mempengaruhi guru dan siswa untuk mengikutinya. Implementasi penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi yang selanjutnya adalah pelaksanaan model kelas anti korupsi oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU pada bulan Februari sampai dengan April Tahun 2019.
3. Dampak positif yang ditimbulkan dari penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi adalah mampu membuat siswa-siswi lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas. Dampak berikutnya adalah siswa-siswi mampu bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pengurus perpustakaan. Dampak positif selanjutnya adalah siswa-siswi yang menjadi peserta model kelas anti korupsi mampu memberikan imbas positif kepada siswa-siswi yang tidak mengikuti, hal ini dapat dilihat bahwa siswa-siswi yang tidak mengikuti model kelas anti korupsi tahu sembilan nilai anti korupsi walaupun kurang begitu paham. Dampak positif yang terakhir adalah menurunnya praktek *bullying* di sekolah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan berkenaan dengan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum, yaitu:

1. Secara teoritis dalam pelaksanaan penciptaan budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi yang telah dirintis oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU harus tetap dilanjutkan. Pihak sekolah harus mampu menjalankan program-program yang telah dilaksanakan oleh pihak eksternal tersebut, karena pada dasarnya gebrakan melalui model kelas anti korupsi seiring sejalan dengan pendidikan karakter dewasa ini.
2. Secara praktis
  - a. Bagi lembaga pendidikan, dalam pelaksanaan penciptaan budaya sekolah yang mencerminkan pendidikan anti korupsi diharapkan pihak sekolah bukan hanya menjadi *event organizer* dari kontribusi pihak eksternal dalam hal ini *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU berhenti begitu saja, artinya ketika program-program yang mengedukasi yang dilaksanakan oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) dan IPNU serta IPPNU selesai maka tidak ada tindak lanjut dari pihak sekolah. Seharusnya kepala sekolah dan guru lebih terangsang untuk mengembangkan ke dalam setiap aktivitas di sekolah. Sebagai pelaku dalam sebuah organisasi, kepala sekolah dan guru bersinergi dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan termasuk ide dan program dari pihak luar yang bersifat konstruktif.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, supaya dilakukan penelitian lebih lanjut yang mampu mengungkap lebih dalam tentang strategi implementasi budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi khususnya di lembaga tingkat dasar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afuwah, Rifa ‘, *Strategi Pengembangan Budaya Agama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa (Studi Multi Kasus di MTs Surya Buana dan SMP Negeri 13 Malang)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2104).
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer*.
- Al Fatihah, Miftaqul, “Hubungan Antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas III SDN Panularan Surakarta”, *At-Tarbawi*, 2 (Juli-Desember 2016).
- Alamsyah, Wana dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Indonesian Corruption Watch, 2018).
- Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Jabal, 2010).
- Anam, Nurul, *Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Pesantren*, vol. 6, No. 02, September, 2014.
- Anggraini, Melani Septi Arista, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SDN Kotagede 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017*, vol. 3, No. 3, Mei 2017.
- Ansyar, Mohammad, *Kurikulum; Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015).
- Ansyori, Miftahol, *Pembentukan Perilaku Keagamaan Melalui Budaya Sekolah (Studi Multi Kasus Pada SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan dan MI Sirojut Tholibin I Pamekasan)*, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Arifin, M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Ed. Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Arliman, Laurensius S, *Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Anti korupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi*, vol. 17, No. 1, Juni, 2017.

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Choiriyah dkk, *Konsep Pembelajaran Pkn dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar*, vol. 01, No. 01, Juni 2017.
- Creswell, John W., *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Edisi IV, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Daryanto, *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*, (Cet. I; Yogyakarta: Gava Media, 2015).
- Dasrizal, *Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang*, vol. 8, No. 2, Oktober 2017.
- Efianingrum, Ariefa, *Kultur Sekolah*, vol. 2, No. 1, Mei 2013.
- Elviana, Premita Sari Octa, “Pembentukan Sikap Mandiri dan Tanggung Jawab Melalui Penerapan Metode Sociodrama dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan”, *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, ISSN: 2302-433x, 2017.
- Ezy dkk, *Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang*, *Journal of Civic Education*, ISSN: 2622-237X.
- Gredler, Margaret E., *Learning and Instruction (Teori dan Aplikasi)*, terj. Tri wibowo B.S, Edisi VI (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Hadziq, Abdulloh, *Konsepsi Pendidikan Agama Anti Korupsi di Sekolah Dasar*, vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Hakim, Lukmanul, *Model Integrasi Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, vol. 10, No. 2, 2012.
- Handayani, Titik, *Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, vol. IV, No. 2, 2009.
- Handoyo, Eko, *Pendidikan Antikorupsi*, (Cet I; Semarang: Ombak, 2013).

- Harto, Kasinyo, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama*,” vol. 20, No. 1, 2014.
- Hergenhahn, B.R & Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, terj. Tri Wibowo B.S, Edisi VII (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Holstein, Hermann, *Murid Belajar Mandiri*, ter. Soeparmo, (Bandung: Remadja Karya, 1987).
- <https://kbbi.web.id/implikasi>, (diakses, 10 Agustus 2019).
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/192221/20181208/191143/mi-darul-ulum-buka-kelas-anti-korupsi/>, diakses 17 Agustus 2019.
- Husna, Faiqatul, “Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam”, *Miskyat*, 02 (Desember, 2017).
- Jati, Rizqy Narendra, *Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi Peserta Didik Pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/cipta>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.
- Kesuma, Dharma dkk, *Pendidikan Karakter (Kajian teori dan Praktik di Sekolah)*, (Cet I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).
- Lolowang, Melvin Grady dkk, *Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Berlian Kharisma Pasifik Manado*, vol. 4, No. 2, Juni 2016.
- Mahmud, *Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Anti korupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Manurung, Rosida Tiurma, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*, Edisi 27, Desember 2012.
- Maryamah, Eva, *Pengembangan Budaya Sekolah*, *Tarbawi*, vol. 2, No. 02, Juli-Desember 2016.

- MCW, 2018. *Modul Kelas Anti Korupsi Untuk Tingkat Sekolah Dasar kelas 4-5. Malang Corruption Watch (MCW): Malang*
- Miles, Matthew B. & A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (UI-Press, 2014).
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Mubayyinah, Fira, *SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, ISSN (P): 2598-9588, 1 (2017).
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Grup, 2011).
- Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Murdiono, Mukhamad, *Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP*, vol. 15, No. 1, Juni 2016.
- Mustari, Mohammad, *Budaya Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Indonesia*, vol. 1, No. 2, Juli 2013, ISSN: 2337-7623; EISSN:2337-7615.
- Neprializa, *Manajemen Budaya Sekolah*, vol. 9, No. 3, Juli 2015.
- Novianti, *Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada detik.com dan Tempo Interaktif*, vol. 8, No. 2, Agustus 2010.
- Nurdin, Muhamad, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014).
- Nurhayati, Isti, *Implikasi Budaya Sekolah Terhadap Peri Kehidupan Akademis*, vol. 11, No. 1, Februari 2016.
- Nurkholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, vol. 1, No. 1, November 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Pradana, Yudha, *Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah (Studi Deskriptif di SD Amaliah Ciawi Bogor)*, vol. 1, No. 1, April 2016. ISSN: 2541-6693.
- Putra, Ilham Andika dkk, *Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi*, vol. 8, No. 1, 2018.
- Qomariyah, Nurul dan Minhaji, *Religious Environment: Penciptaan Suasana Religius di Sekolah*, vol. 10, No. 2, Desember, 2016.
- Rachman, Muhammad Abdul, *Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadharma Ali di Kompas.com (Periode Juni 2015)*, vol. 4, No. 2, 2016.
- Raraswati, Palupi, *Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak*, (Cet I; Jakarta: 2016).
- Rusdini, Siti Ekowati dkk, *Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kudus*, *Journal of Educational Social Studies* , 1 Maret 2016.
- Saat, Sulaiman, *Faktor-Faktor Determinan Dalam Pendidikan*, vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Sa' i, *Penanaman Rasa Tabu Korupsi Pada Anak Sekolah Dasar*, *Al-Ijtimaiyyah*, vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al-Bayan*, 33 (Januari, 2016).
- Salistina, Dewi, *Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral*, vol. 03, No. 02, November 2015.
- Santoso, Bangun, *5 kasus Korupsi Terbesar di Indonesia dengan Kerugian Negara Fantastis*, *Suara.com*, Senin, 11 Februari 2019, <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis>, diakses 17 Agustus 2019.
- Setiyono, Budi, *Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus*, *Politika*, vol. 8, No. 1, April 2017.
- Shohichah, Aas Siti, *Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an*, vol. 07, No. 1, April 2018.

- Sobirin, Achmad, *Budaya Organisasi (Pengertian, Makna dan aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi)*, Edisi II (Cet I; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2009).
- Soetopo, Hendyat, *Perilaku Organisasi (Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan)*, (Cet;I Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Sumbulah, Umi dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Supandi, Agus dkk, *Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Rangka mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi*, vol. 1, No. 2, April 2015.
- Thoyyibah, Imadah, *Pendidikan Dasar Anti Korupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam*, vol. XII, No. 80, Februari 2018.
- Touwe, Mochtar dkk, *Investigasi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam Kasus Megaproyek Sarana Olahraga Hambalang*, vol. 4. No. 1, ISSN: 2302-6340.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I (Ketentuan Umum), pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wijaya, David, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Indeks, 2014).
- Yasin, Ahmad Fatah, *Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Studi Kasus di MIN 1)*, vol. 1, No. 5, April 2011.
- Yasmin, Faizatul Lutfia dkk “Hubungan Disiplin dengan Tanggung Jawab Belajar Siswa”, *Jurnal Pendidikan*, 4 (April, 2016).

- Yin, Robert K., *Studi Kasus; Desain dan Metode*, terj. M.Djauzi Mudzakir, (Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Yuliono, Agus, *Pengembangan Budaya Sekolah Berprestasi: Studi Tentang Penanaman Nilai dan Etos Berprestasi di SMA Karangturi*, 3 (2), (2011).
- Warsilah dkk, *Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah di UPT SD Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, vol. 2, No. 1, April 2015.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan)*, (Cet; ke-2: Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Zuber, Ahmad, *Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, vol. 1, No. 2, Oktober 2018.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Instrumen Penelitian

## Pedoman Wawancara

No	Teknik Pengumpulan Data	Fokus Penelitian	Informan	Kode	Pertanyaan
1	Wawancara	F 1	Kepala Sekolah	KS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah telah diterapkan budaya anti korupsi di sekolah ini?</li> <li>2) Seperti apa budaya anti korupsi di sekolah ini?</li> <li>3) Jam berapa siswa datang ke sekolah?</li> <li>4) Apakah siswa datang tepat waktu?</li> <li>5) Apakah ada pihak lain yang menjadi <i>mitra</i> dalam merancang pendidikan anti korupsi di sekolah ini?</li> <li>6) Siapa saja yang menjadi objek pendidikan anti korupsi di sekolah ini?</li> </ol>
2	Wawancara	F 1	Guru	GR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah siswa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?</li> <li>2) Apakah siswa mengerjakan tugasnya secara mandiri?</li> <li>3) Bagaimana pola interaksi guru dan siswa?</li> </ol>
3	Wawancara	F 2	Siswa	Ssw	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah adik mengetahui apa itu korupsi?</li> <li>2) Apakah adik mengetahui nilai-nilai anti korupsi?</li> <li>3) Menurut adik, apakah mencontek adalah bagian dari korupsi?</li> <li>4) Menurut adik apakah mendapatkan nilai yang bagus tetapi mencontek atau mendapatkan nilai yang jelek tetapi hasil pekerjaan sendiri?</li> <li>5) Apakah menurut adik terlambat datang ke sekolah itu bagian dari korupsi?</li> </ol>

					<p>6) Bagaimana jika kamu melihat teman mu tidak melaksanakan piket?</p> <p>7) Apakah adik senang dengan nilai yang di dapat dari hasil pekerjaan sendiri?</p>
4	Wawancara	F 3	Kepala Sekolah	KS	<p>1) Seberapa efektif penerapan budaya disiplin terhadap nilai anti korupsi siswa?</p> <p>2) Apakah ada kendala selama pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di sekolah ini?</p> <p>3) Kalau ada, kendala seperti apa?</p> <p>4) Apa bentuk <i>goal setting</i> pendidikan anti korupsi yang telah terlaksana di MI Darul Ulum?</p> <p>5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai <i>men-design</i> sampai tercapainya <i>goal setting</i> pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum?</p> <p>6) Apakah ada perubahan perilaku siswa sebelum dan setelah dilaksanakan pendidikan anti korupsi?</p> <p>7) Apakah guru mencerminkan nilai-nilai anti korupsi dalam aktivitas di sekolah?</p>
5	Wawancara	F 1	Malang Corruption Watch	MC W	<p>1) Apa yang melatarbelakangi MCW <i>men-design</i> pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum?</p> <p>2) Bagaimana konsep pendidikan anti korupsi yang MCW tawarkan di sekolah ini?</p> <p>3) Apa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi menurut MCW yang telah dilaksanakan di MI Darul Ulum?</p> <p>4) Apakah semua siswa dari kelas 1-6 di edukasi</p>

					<p>pendidikan anti korupsi oleh MCW?</p> <p>5) Apakah hanya siswa yang mendapatkan edukasi tentang pendidikan anti korupsi?</p> <p>6) Apakah pihak sekolah tidak keberatan dengan konsep pendidikan anti korupsi yang ditawarkan oleh MCW?</p> <p>7) Apa tujuan akhir dari program pendidikan anti korupsi yang diharapkan oleh MCW pada sekolah ini?</p>
6	Wawancara	F 2	Malang Corrupti on Watch	MC W	<p>1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum?</p> <p>2) Apakah MCW mengalami hambatan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum?</p> <p>3) Berapa lama waktu dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum?</p> <p>4) Apakah pendidikan anti korupsi dilaksanakan secara <i>intrakurikuler</i> atau <i>ekstrakurikuler</i> ?</p> <p>5) Apakah ada pihak lain yang menjadi mitra MCW dalam <i>men-design</i> dan melaksanakan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum?</p>

**PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati keadaan fisik sarana dan prasarana yang menunjang dalam membangun budaya anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu.
2. Mengamati aktivitas yang mencerminkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum Kota Batu.
3. Mengamati kegiatan-kegiatan yang menjadi budaya sekolah di MI Darul Ulum.



**PEDOMAN DATA DOKUMENTER**

1. Profil MI Darul Ulum
2. Data tentang guru, karyawan dan siswa MI Darul Ulum
3. Data tentang sarana dan prasarana yang menunjang budaya sekolah dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi di MI Darul Ulum
4. Data tentang struktur organisasi, nama-nama pengurus, dan program kegiatan MI Darul Ulum
5. Data tentang pelaksanaan model kelas anti korupsi
6. Data tentang siswa yang menjadi peserta model kelas anti korupsi
7. Data tentang visi, misi dan tujuan MI Darul Ulum
8. Data tentang modul model kelas anti korupsi di MI Darul Ulum

Lampiran 4



Gambar 1.1 MI Darul Ulum Tampak Depan



Gambar 1.2 Struktur Organisasi MI Darul Ulum

A poster titled "KODE ETIK GURU INDONESIA" (Code of Ethics for Indonesian Teachers). It lists ten principles for teachers, such as being a role model, being professional, and being committed to their duties.

Gambar 1.3 Kode Etik Guru



Gambar 1.4 Piagam Prestasi Siswa

A large table with a grid structure, likely containing teacher data. The header includes "DATA PERENCANAAN KEGIATAN KURIKULER MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM" and "REKAMATAAN SIKIP KOTA DATI TAHUN PELAJARAN 2019/2020". The table has multiple columns and rows, but the content is mostly illegible.

Gambar 1.5 Data Guru



Gambar 1.6 Pelaksanaan Kelas Anti Korupsi di dalam Ruangan Kelas



Gambar 1.7 Pelaksanaan Kelas Anti Korupsi di dalam Luar Kelas (Penyiraman Air Kembang sebagai simbol Penyucian dari pikiran dan perilaku korupsi)



Gambar 1.8 Wisuda Perdana Siswa kelas Model Anti Korupsi

## Lampiran 6



Gambar 1.9 Hasil Karya Siswa/i dalam mengekspresikan nilai-nilai anti korupsi yang di lukis di dinding pagar sekolah.



Gambar 2 Sembilan Nilai Anti Korupsi

Lampiran 7



Gambar 2.1 Perpustakaan *Out Door*



Gambar 2.1 Perpustakaan dalam Kelas



Gambar 2.1 Perpustakaan Induk